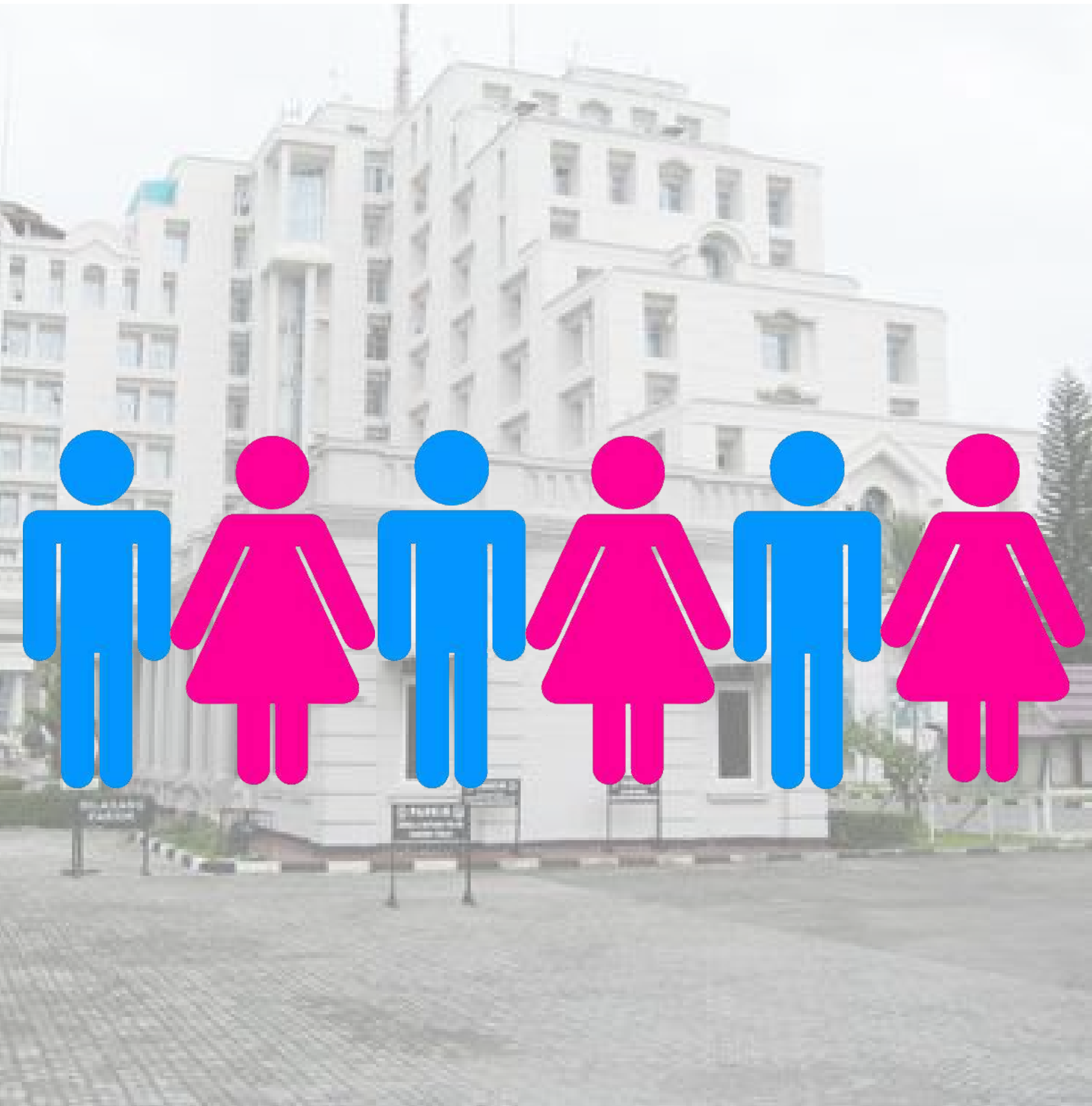


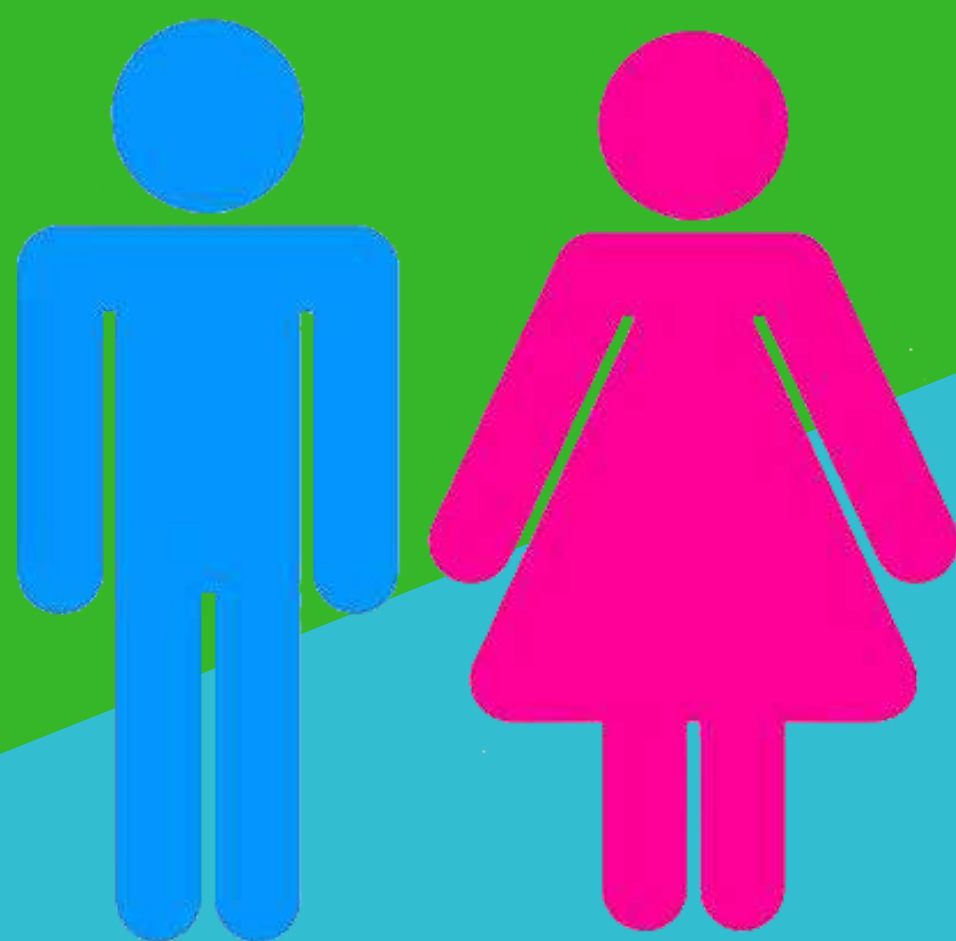
PROFIL GENDER

**PROVINSI SUMATERA UTARA
2017**



**KERJASAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1.....	Latar
Belakang.....	1
1.2.....	Tujuan
.....	3
1.3.....	Sumber
Data.....	4
1.4.....	Metode
Penelitian.....	4
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	 5
2.1. Geografi	5
2.2. Sejarah.....	5
2.3. Sosial Budaya.....	10
 BAB III JUMLAH KOMPOSISI PENDUDUK	 13
3.1. Jumlah Penduduk	14
 BAB IV PENDIDIKAN	 23
4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan.....	25
4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah..	29
4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan.....	33
4.4. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur.....	36
4.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin.....	41
4.6. Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi	45
4.7. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin	48
4.8. Jumlah Guru Negeri / Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi.....	51
4.9. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, dan C Serta Keaksaraan Fungsional (KF) Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	57
4.10. Jumlah Kelulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	59

BAB V BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN LINGKUNGAN	61
5.1. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara	61
5.2. Dampak Bencana Lingkungan Terhadap Gender.....	64
BAB VI KESEHATAN.....	66
6.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin.....	67
6.2. Persentase Penyebab Kematian Ibu Pada Masa Hamil, Melahirkan dan Nifas Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	70
6.3. Jumlah dan Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provsu.....	74
6.4. Jumlah dan Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	76
6.5. Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	79
6.6. Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	81
6.7. Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	84
6.8. Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	87
6.9. Persentase Penduduk Perempuan Usai 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	89
6.10. Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	91
6.11. Unmet Need, Jumlah PUS dan Jumlah WUS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	94
6.12. Pengguna Narkoti, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	97
BAB VII TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA....	98
7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	101

7.2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	103
7.3. Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	105
7.4. Pekerja Di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	107
7.5. Jumlah Pekerja Di Lembaga Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	109
7.6. Jumlah Pekerja Di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	111
7.7. Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	113
7.8. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	115
7.9. Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	117
7.10. Jumlah Dan Persentase Perempuan Pekerja Profesional Dan Manajerial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara..	119
7.11. Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	120
7.12. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	125
7.13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	131
BAB VIII POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	137
8.1. Jumlah Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	136
8.2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	141
8.3. Jumlah PNS Menurut Golongan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	144
8.4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.....	147
8.5. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa, Jenis Kelamin di Wilayah	

Provinsi Sumatera Utara.....	151
8.6. Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara.....	155
8.7. Jumlah Hakim Menurut Jenis Jabatan Hakim, Jenis Kelamin Dipengadilan Negeri Di Provinsi Sumatera Utara.....	158
8.8. Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan Dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara.....	161
8.9. Jumlah Pejabat Kepolisian Menurut Jenis Kelamin Dan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara.....	169
BAB IX HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....	172
9.1. Jumlah Penghuni Menurut Jenis Lapas Dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara.....	172
BAB X DATA KEKERASAN	175
10.1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	175
10.2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	182
10.3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	184
10.4. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	187
10.5. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	190
10.6. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	193

10.7. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	196
.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	205

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin.....	15
Tabel 3.3. Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin.....	19
Tabel 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	22
Tabel 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan.....	26
Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah.....	29
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan.....	33
Tabel 4.4. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur.....	37
Tabel 4.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.6. Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	45
Tabel 4.7. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.8. Jumlah Guru Negeri/Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi.....	52
Tabel 4.9. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, Dan C Serta Keaksaraan Fungsional (Kf) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	58
Tabel 4.10. Jumlah Kelulusan Paket A, B, dan C menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	59
Tabel 5.1. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Sumatera....	61
Tabel 5.2. Dampak Bencana Lingkungan Terhadap Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Utara.....	64
Tabel 6.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Persentase Tahun dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	67

Tabel 6.2. Jumlah Dan Usia Kematian Ibu Hamil, Melahirkan, Dan Nifas Menurut Kelompok Usia Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	70
Tabel 6.3. Jumlah Dan Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	74
Tabel 6.4. Jumlah dan Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	76
Tabel 6.5 Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	79
Tabel 6.6. Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	81
Tabel 6.7. Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	84
Tabel 6.8. Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	87
Tabel 6.9. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	89
Tabel 6.10. Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	91
Tabel 6.11. Unmet Need, Jumlah Pus Dan Jumlah Wus Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	94
Tabel 6.12. Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	97
Tabel 7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	101

Tabel 7.2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	103
Tabel 7.3. Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	105
Tabel 7.4. Pekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	107
Tabel 7.5. Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	109
Tabel 7.6. Jumlah Pekerja di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	111
Tabel 7.7. Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	113
Tabel 7.8. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	115
Tabel 7.9. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin	117
Tabel 7.10. Jumlah Dan Prosentase Perempuan Pekerja Profesional Dan Manajerial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	119
Tabel 7.11. Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	120
Tabel 7.12. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	125
Tabel 7.13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	131
Tabel 8.1. Jumlah Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	138
Tabel 8.2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	141

Tabel 8.3. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	145
Tabel 8.4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	149
Tabel 8.5. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa, Jenis Kelamin di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.....	151
Tabel 8.6. Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara.....	157
Tabel 8.7. Jumlah Hakim Menurut Jenis Jabatan Hakim, Jenis Kelamin Dipengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Utara.....	158
Tabel 8.8. Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan Dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara.....	166
Tabel 8.9. Jumlah Pejabat Kepolisian Menurut Jenis Kelamin Dan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara.....	169
Tabel 9.1. Jumlah Penghuni Menurut Jenis Lapas Dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara.....	172
Tabel 10.1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	180
Tabel 10.2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	182
Tabel 10.3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	184
Tabel 10.4. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	187
Tabel 10.5. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	

Menurut Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	190
.....	

Tabel 10.6. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Layanan Yang Diberikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	193
.....	

Tabel 10.7. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	196
.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Persentase Penduduk Menurut Agama.....	11
Gambar 2.2. Grafik Persentase Penduduk Menurut Suku Bangsa	12
Gambar 3.1. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara.....	15
Gambar 3.2. Grafik Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3.3. Grafik Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin.....	21
Gambar 4.1. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD dan Jenis Kelamin.....	27
Gambar 4.2. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SLTP dan Jenis Kelamin.....	28
Gambar 4.3. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SLTA dan Jenis Kelamin.....	28
Gambar 4.4. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki).....	31
Gambar 4.5. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Perempuan).....	32
Gambar 4.6. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan).....	32
Gambar 4.7. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SD) dan Jenis Kelamin.....	34
Gambar 4.8. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SLTP) dan Jenis Kelamin.....	35
Gambar 4.9. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SLTA) dan Jenis Kelamin.....	35
Gambar 4.10. Grafik Persentase Laki-Laki Angka Melek Huruf.....	39
Gambar 4.11. Grafik Persentase Perempuan Angka Melek Huruf.....	40
Gambar 4.12. Grafik Persentase Laki-Laki+Perempuan Angka Melek Huruf.....	40
Gambar 4.13. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SD.....	44

Gambar 4.14. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTP.	44
Gambar 4.15. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTA.	44
Gambar 4.16. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SD) yang Ditamatkan.....	47
Gambar 4.17. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTP) yang Ditamatkan.....	47
Gambar 4.18. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTA) yang Ditamatkan.....	48
Gambar 4.19. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin.....	50
Gambar 4.20. Grafik Jumlah Guru SD Yang Bersertifikasi.....	56
Gambar 4.21. Grafik Jumlah Guru SLTP Yang Bersertifikasi.....	56
Gambar 4.22. Grafik Jumlah Guru SLTA Yang Bersertifikasi.....	57
Gambar 6.1. Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Persentase.....	69
Gambar 6.2. Grafik Jumlah Kematian Ibu Hamil.....	72
Gambar 6.3. Grafik Jumlah Kematian Ibu Bersalin.....	72
Gambar 6.4. Grafik Jumlah Kematian Ibu Nifas.....	73
Gambar 6.5. Grafik Jumlah Kematian Ibu.....	73
Gambar 6.6. Grafik Jumlah K1 dan K4.....	75
Gambar 6.7. Grafik Persentase K1 dan K4.....	75
Gambar 6.8. Grafik Persentase Imunisasi Tetanus Toksoid Pada Ibu Hamil...	78
Gambar 6.9. Grafik Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe).....	80
Gambar 6.10. Grafik Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe).....	80
Gambar 6.11. Grafik Persentase Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/Kota.....	82
Gambar 6.12. Grafik Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko.....	83
Gambar 6.13. Grafik Persentase Penderita HIV.....	85
Gambar 6.14. Grafik Persentase Penderita AIDS.....	86
Gambar 6.15. Grafik Persentase Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan.....	88
Gambar 6.16. Grafik Persentase Penduduk Perempuan Menurut Usia 10 Tahun Keatas Menurut Perkawinan Pertama.....	90

Gambar 6.17. Grafik Persentase Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin	93
Gambar 6.18. Grafik Persentase Unmet Need.....	95
Gambar 6.19. Grafik Persentase PUS.....	96
Gambar 6.20. Grafik Pengguna NAPZA, Psikotropika dan Zat Adiktif.....	97
Gambar 7.1. Grafik Persentase Tingkat Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin.....	102
Gambar 7.2. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Miskin.....	104
Gambar 7.3. Grafik Persentase Pekerja di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin.....	106
Gambar 7.4. Grafik Persentase Pekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin.....	108
Gambar 7.5. Grafik Jumlah Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	110
Gambar 7.6. Grafik Jumlah Pekerja Di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin.....	112
Gambar 7.7. Grafik Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin.....	114
Gambar 7.8. Grafik Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin.	116
Gambar 7.9. Grafik Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Menurut Jenis Kelamin. .	118
Gambar 7.10. Grafik Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial.....	119
Gambar 7.11. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki.....	123
Gambar 7.12. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Perempuan....	123
Gambar 7.13. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki+Perempuan.....	124
Gambar 7.14. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan.....	130
Gambar 7.15. Grafik Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin.....	136
Gambar 8.1. Grafik Jumlah Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) Menurut Jenis Kelamin.....	140
Gambar 8.2. Grafik Jumlah Kepala Daerah (Wakil Bupati/Wali Kota) Menurut Jenis Kelamin.....	140
Gambar 8.3. Grafik Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin.....	143
Gambar 8.4. Grafik Jumlah PNS Menurut Golongan, Jenis Kelamin.....	146
Gambar 8.5. Grafik Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin.....	150
Gambar 8.6. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa-Struktural.....	154

Gambar 8.7. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa-Fungsional.....	154
Gambar 8.8. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa.....	154
Gambar 8.9. Grafik Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama.....	157
Gambar 8.10. Grafik Hakim Menurut Jenis Jabatan-Ketua.....	160
Gambar 8.11. Grafik Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin.....	167
Gambar 8.12. Grafik Jumlah Pejabat Kepolisian Kapolda Menurut Jenis Kelamin.....	171
Gambar 8.13. Grafik Jumlah Pejabat Kepolisian Kapolsek Menurut Jenis Kelamin.....	171
Gambar 9.1. Grafik Jumlah Penghuni Lapas.....	174
Gambar 10.1. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur.....	181
Gambar 10.2. Grafik Persentase Total Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur.....	181
Gambar 10.3. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan.....	183
Gambar 10.4. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan.....	183
Gambar 10.5. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan.....	186
Gambar 10.6. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan.....	189
Gambar 10.7. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Kekerasan.....	189
Gambar 10.8. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian.....	191
Gambar 10.9. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian.....	194

Gambar 10.10. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan.....	195
.....	
Gambar 10.11. Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin.....	198
.....	
Gambar 10.12. Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur.....	198
Gambar 10.13. Grafik Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan korban.....	201
.....	
Gambar 10.14. Grafik Korban Perdagangan Orang Menurut Status Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	204

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya akhirnya Penyusunan/Pembuatan Profil Gender Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 akhirnya bisa terwujud.

Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan, sehingga bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar selanjutnya Indonesia telah melaksanakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak anak. Untuk itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI telah meluncurkan program unggulan Three Ends yaitu meliputi 1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Akhiri perdagangan manusia 3. Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal (RPJPN) tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam RPJMD Provsu 2013-2018. Dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan serta memantau pelaksanaan berbagai program/kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk mengintegrasikan pengalaman, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan kaum laki-laki dan perempuan ke dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender diberbagai aspek pembangunan.

Melalui profil ini digambarkan tentang kondisi secara umum laki-laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya, politik dan pengambilan keputusan serta kekerasan melalui profil ini dapat dilihat sejauh mana peran serta laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, apakah memperoleh akses yang sama, serta dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil.

Profil ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan kebijakan program yang responsif gender dan peduli anak, terkait pencapaian kualitas hidup manusia khususnya masyarakat Sumatera Utara.

Akhirnya kepada berbagai pihak terutama Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara besertanya jajarannya diucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasamanya dalam penyusunan/pembuatan profil gender ini.

Waasalamu'alikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Hj. NURLELA, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621023 198602 2 001**

KATA PENGANTAR

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan dalam *Human Development Report* bahwa salah satu elemen penting dalam pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara adil baik antar generasi, antar etnis, antar jenis kelamin, maupun antar wilayah. Salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender. Dimensi ini juga menjadi salah satu komitmen global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka mencapai kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam mengukur pembangunan gender sebagai salah satu ukuran pembangunan manusia, UNDP mengembangkan Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM) melalui Human Development Report 1995. Berbagai keterbatasan terhadap penggunaan indeks-indeks tersebut mendorong UNDP memperluas pengukuran dalam mendefinisi Ketimpangan Gender dalam Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Melalui Human Development Report 2010, UNDP memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) sebagai alat ukur kuantitatif yang memotret kehilangan pencapaian dalam kehidupan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu kesehatan reproduktif, pemberdayaan, dan pekerjaan.

Di Indonesia, proses pembangunan wanita telah berlangsung dalam satu jangka masa yang panjang dari zaman kerajaan Hindu sehinggalah masa selepas kemerdekaan Indonesia. Ia bermula dengan munculnya perjuangan wanita secara perseorangan termasuklah oleh para ratu dan pahlawan wanita Indonesia dan kemudiannya perjuangan wanita secara berkumpulan. Selanjutnya dengan dibentuknya kementerian urusan wanita di Indonesia pada tahun 1978 kemudian dilanjutkan kementerian ini pada reformasi dan kabinet 2014 ini bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta semua di daerah Indonesia adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu percepatan dan peningkatan perempuan secara sistematis dengan kebijakan, program dan kegiatannya yang berguna bagi mencapai *gender equality and justice* (kesetaraan gender dan keadilan gender), walaupun perjuangan tersebut masih banyak ketimpangan disana sini untuk terus ditingkatkan di masa depan.

Profil gender disusun untuk keperluan pemetaan pembangunan gender di Provinsi Sumatera Utara dalam usaha meningkatkan peran gender di masa depan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017. Adapun tim penyusunan/pembuatan buku profil gender tersebut yaitu; Prof. Pujiati, M.Soc.Sc, Ph.D, Hariani Siregar, S.Sos, M.SP, Ahmad Dzaky Ridho, ST, Indah Permata Sari Siregar, S.E, Muhammad Reza Zulkarnain, ST yang telah dapat melaksanakannya dengan maksimal atas bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, tim penyusunan/pembuatan profil ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan/pembuatan profil ini, khususnya:

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Lembaga Penelitian USU
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikianlah kata pengantar ini semoga buku profil gender ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Serta pembangunan bangsa dalam usaha meningkatkan peran gender yang setara dan berkeadilan.

Medan, November 2017
An. Lembaga Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Sekretaris,

Dr. Dra. Ir. Chairani Hanum, MS
NIP. 19610831 198803 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan keadilan gender sebagai salah satu syarat untuk mencapai hasil pembangunan yang berkeadilan gender dan membawa manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang memperhatikan keadilan gender adalah adanya analisis gender terhadap masing-masing program pembangunan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan. Analisis ini hanya dapat dilaksanakan apabila para perancang program dan para pengambil keputusan memahami tentang keadilan gender dan penerapannya dalam program-program pembangunan serta selalu mengikuti isu-isu gender terbaru dalam masyarakat yang terus berkembang.

Konteks di atas mensyaratkan ketersediaan data yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak dengan analisis berdasarkan konteks perkembangan masing-masing daerah. Ketersediaan data tersebut sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, dan peduli anak. Dengan menggunakan statistik gender, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat guna sehingga memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi gender di Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan penyusunan profil gender sebagai salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan gambaran tentang kondisi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan. Pembangunan sumber manusia yang dilaksanakan selama ini masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan yang telah dilaksanakan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya dan politik dan pengambilan keputusan di berbagai aspek lainnya.

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Provinsi Sumatera Utara 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
4. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem data gender dan anak
7. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provsu Tahun 2017
8. Peraturan Gubernur No. 4 tahun 2017 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provsu Tahun 2017.

Data gender harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah. Justru karena sifat dinamis dan selalu berubah itulah, maka data dan informasi harus selalu dievaluasi dan diperhatikan perubahannya dan dimutakhirkan kembali pada tahun 2017. Kegiatan pemutakhiran data gender menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan arah pembangunan gender ke depan di Sumatera Utara.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi daerah setempat sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur di berbagai bidang untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara. Data ini secara berkala perlu dianalisis untuk mendapatkan makna yang lebih lengkap tentang kondisi gender di Sumatera Utara. Profil Gender menggambarkan berbagai isu gender yang selama ini masih terabaikan atau belum digarap secara optimal khususnya di wilayah yang masih tertinggal.

Dalam sistem perencanaan nasional, isu-isu gender di daerah juga menggambarkan permasalahan nasional yang harus ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan oleh daerah. Oleh karena itu, profil hasil analisis yang dilakukan di tingkat Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara akan menjadi input yang sangat berharga dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi kesenjangan gender dapat digunakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor strategis ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan. Ketersediaan fakta, data, dan informasi kesenjangan gender, berupa data terpilah dan fakta kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan juga sangat dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki serta perempuan.

Data gender harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap OPD harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perancangan program kegiatan.
2. Melakukan analisis terhadap indikator-indikator penting tersebut untuk menemukan isu-isu prioritas dalam pembangunan di Sumatera Utara khususnya data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, statistik gender dan

isu-isu prioritas terkait pembangunan gender, pemberdayaan perempuan di daerah.

1.3. Sumber Data

Data yang diperoleh merupakan fakta maupun data statistik gender di 33 Kabupaten/ Kota, yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara, yang disajikan dalam bentuk data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya dan kekerasan terhadap perempuan. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Utara. Data-data yang telah diperoleh dibawa ke Forum Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh perwakilan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provusu untuk meminta masukan terhadap kekurangan data yang sudah diperoleh. Hasil Forum Group Discussion (FGD) akan memperkaya data-data yang akan dianalisis.

1.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu sosial dengan cara mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif di lapangan dengan mengambil data SUMUT dalam angka melalui BPS Sumut dan OPD yang berkaitan dengan profil gender di Sumatera utara tentang data kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan sebagainya

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis dari data dokumen dan peristiwa perilaku gender yang dapat diamati dan dianalisis mengikuti kaidah saintifik.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1. Geografi

Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Sumatera berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di bagian Utara dan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau di bagian Selatan. Provinsi Sumatera Utara secara geografis terletak antara 1°- 4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur serta diapit oleh lautan India di bagian Barat dan Selat Malaka di bagian Timur. Luas Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680 Km² dengan sebagian besar pegunungan di bagian Barat dan dataran di bagian Timur. Dengan kemiringan semacam ini letak provinsi diatas permukaan laut berjarak cukup ekstrim dengan minimum 0-4 M diatas permukaan laut di Kota Tanjung Balai dan 0-1915 M diatas permukaan laut di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.2. Sejarah

Pada Zaman Pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatera*, yang meliputi seluruh Sumatera, di kepalai oleh seorang *Gouverneur* berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan Keresidenan. Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintahan yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.

Pada sidang I Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan-kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan, diputuskan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 sub Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatera Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli), sub Provinsi Sumatera Tengah, dan sub Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-undang No.10 Tahun 1948 tanggal 15 april 1948, Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

1. Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

2. Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
3. Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung.

Dengan mendasarkan kepada Undang-undang No.10 Tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Pebruari 1973 No. 4585/25, DPRD Tingkat I Sumatera Utara dengan keputusannya tanggal 13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Sumatera Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah tanggal 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya UU No. 10 tahun 1948 tersebut.

Pada awal tahun 1949 berkaitan dengan meningkatnya serangan Belanda, diadakanlah reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Pada waktu itu, keadaan memerlukan suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan sempurna. Oleh karena itu perlu dipusatkan alat-alat kekuatan sipil dan militer dalam tiap-tiap Daerah Militer Istimewa yang berada dalam suatu tangan yaitu Gubernur Militer. Sehingga penduduk sipil dan militer berada dibawah kekuasaan satu pemerintah.

Perubahan demikian ini ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 No. 21/Pem/ P.D.R.I yang diikuti Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 17 Mei 1949 No. 22/ Pem/ P. D. R. I jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan.

Gubernur yang bersangkutan diangkat menjadi komisaris dengan tugas-tugas memberi pengawasan dan tuntutan terhadap pemerintahan, baik sipil maupun militer. Selanjutnya dengan intruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 15 September 1949, Sumatera Utara dibagi menjadi Daerah Militer Istimewa yaitu Aceh dan Tanah Karo diketuai oleh Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureuen dan Tapanuli/ Sumatera Timur oleh Gubernur Militer Dr. F. L Tobing.

Selanjutnya, dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Desember 1949 No.8/Des/W.K.P.M dibentuklah Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/ Sumatera Timur. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Agustus 1949 No.8/Des/W.K.P.M tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan daerah yang meliputi daerah Keresidenan Aceh, Sumatera

Timur, dan Tapanuli. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, pada waktu RIS, ditetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah-daerah Provinsi, yaitu:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Sumatera Tengah
6. Sumatera Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda Kecil

Pada tanggal 7 Desember 1956 diundangkanlah Undang-undang No 24 Tahun 1956 yaitu Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 1 Undang- undang No.24 Tahun 1956 ini menyebutkan :

1. Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten: Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Besar Kutaraja, daerah-daerah tersebut dipisahkan dari lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950 sehingga daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Provinsi Aceh.
2. Provinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayah nya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Provinsi Aceh, tetap disebut Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No.8 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No.9 Tahun 1956, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri 17 Kabupaten/Kota. Tetapi dengan terbitnya Undang-undang No.12 Tahun 1998, tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) serta Undang-undang No.4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan, Undang-undang No. 9 tahun 2003 tentang

pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, serta Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, dan tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2007, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 disahkan Undang-undang No. 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-undang No. 38 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2008 kembali diterbitkan Undang-undang No. 22 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Undang-undang nomor 23 tahun 2008 tentang pembentukan Labuhanbatu Utara, Undang-undang 45 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-undang No 46 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan undang-undang No. 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunung Sitoli, dengan demikian wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Wilayah Kabupaten :

1. Asahan
2. Batubara
3. Dairi
4. Deli serdang
5. Humbang Hasundutan
6. Karo
7. Labuhan Batu
8. Labuhanbatu Selatan
9. Labuhanbatu Utara
10. Langkat
11. Mandailing Natal
12. Nias
13. Nias Barat
14. Nias Selatan
15. Nias Utara
16. Padang Lawas
17. Padang Lawas Utara
18. Pakpak Bharat
19. Samosir

20. Serdang Bedagai
21. Simalungun
22. Tapanuli Selatan
23. Tapanuli Tengah
24. Tapanuli Utara
25. Toba Samosir

Wilayah Kota :

1. Binjai
2. Gunungsitoli
3. Medan
4. Padangsidempuan
5. Pematangsiantar
6. Sibolga
7. Tanjung Balai
8. Tebing Tinggi

Dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah maka kelembagaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami perubahan. Berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh keluarnya Perda No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 40 OPD, yaitu :

1. Sekretariat Daerah (terdiri dari 9 Biro)
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Wilayah Provinsi
4. Bappeda
5. BKD
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Badan Penghubung Daerah Provinsi

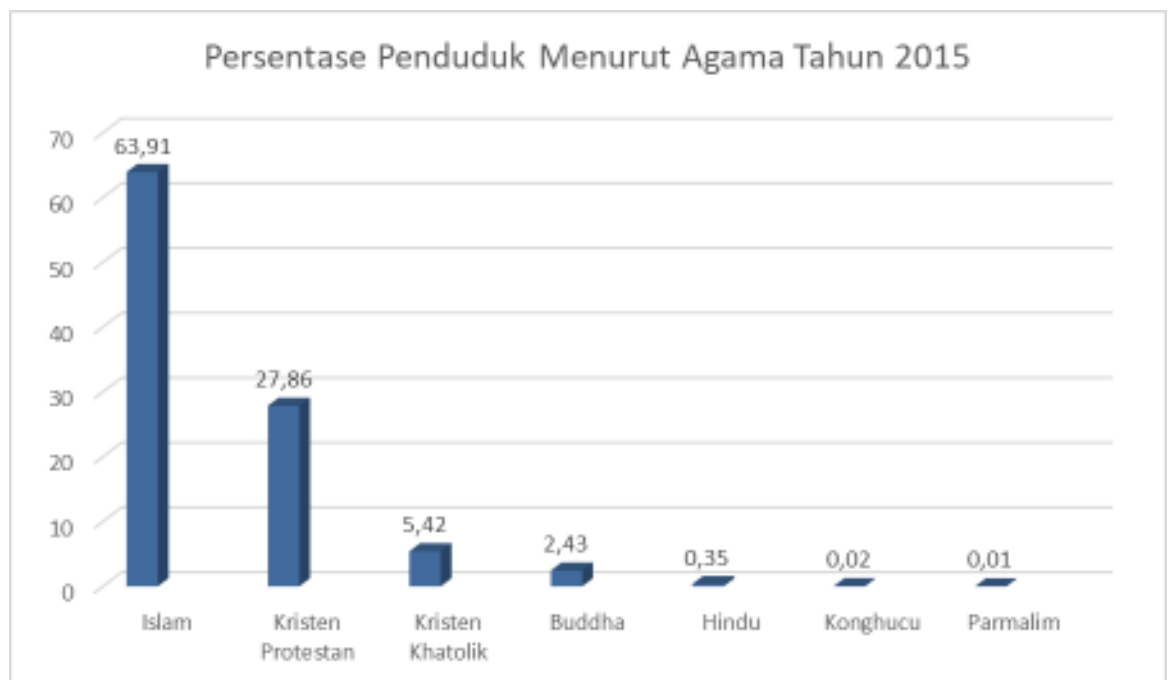
14. Dinas Pendidikan
15. Dinas Kesehatan
16. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
19. Satuan Polisi Pamong Praja
20. Dinas Sosial
21. Dinas Tenaga Kerja
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
25. Dinas Lingkungan Hidup
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu
32. Dinas Pemuda dan Olahraga
33. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
34. Dinas Perpustakaan dan Arsip
35. Dinas Kelautan dan Perikanan
36. Dinas Kehutanan
37. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39. Dinas Perkebunan
40. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2.3. Sosial Budaya

Provinsi Sumatera Utara secara administratif tahun 2016 terbagi dalam 25 Kabupaten dan 8 Kota, 443 Kecamatan, dan 6.112 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.102.911 jiwa dan pusat pemerintahan provinsi terletak di Kota Medan yang berpenduduk sekitar 2.229.408 jiwa pada tahun 2016.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan daerah pantai. Keragaman wilayah tersebut juga menggambarkan keanekaragaman suku bangsa dan agama yang dianut penduduknya. Namun dalam sumpah muda mengikrarkan kesatuan dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan kekayaan khasanah sosial dan budaya tidak menyebabkan perpecahan tetapi mempererat persatuan dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

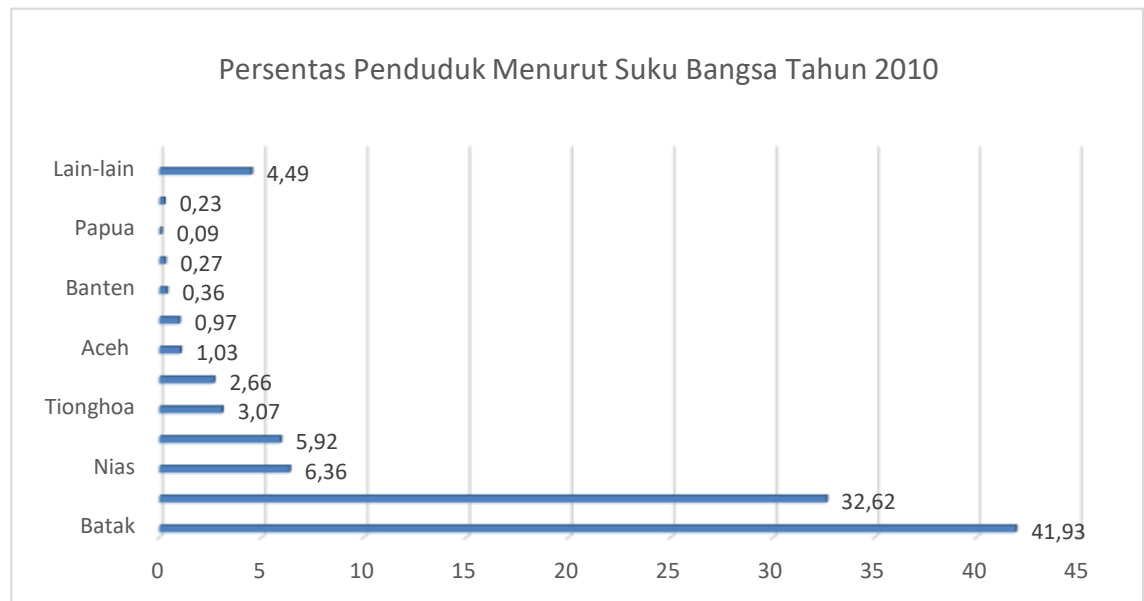
Agama Islam merupakan jumlah terbesar yang dianut oleh penduduk Sumatera Utara, yaitu 63,91 persen., selanjutnya Kristen Protestan 27,86 persen, Kristen Khatolik 5,42 persen, Buddha 2,43 persen, Hindu 0,35 persen, Konghucu 0,02 persen dan Parmalim 0,01 persen seperti terlihat pada Gambar 2.1. Dilihat secara geografis penganut agama islam umumnya mendiami daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di sepanjang Pantai Timur dan sebagian dataran tinggi, sedangkan penduduk yang menganut agama Kristen (Khatolik dan Protestan) sebagian besar mendiami wilayah Pantai Barat dan wilayah dataran tinggi.



Gambar 2.1. Grafik Persentase Penduduk Menurut Agama Tahun 2015

Sedangkan penganut agama Hindu dan Buddha biasanya berada di daerah kota, baik ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi. Selain keragaman agama di Sumatera Utara terdapat juga keragaman suku bangsa yang juga merupakan potensi daerah. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 Provinsi Sumatera Utara didiami

oleh beberapa suku besar yaitu suku Jawa, Batak, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, Banten, Sunda Papua, Asal Luar Negeri, Lain-lain. Suku bangsa terbesar adalah Batak sebesar 41,93 persen, Jawa sebesar 32,63 persen, Nias 6,36 persen, Melayu 5,92 persen, Tionghoa 3,07 persen, Minang 2,66 persen, Aceh 1,03 persen, Banjar 0,97 persen, Banten 0,36 persen, Sunda 0,27 persen, Papua 0,09 persen, Asal luar Negeri 0,23 persen dan lain lain 4,49 persen.



Gambar 2.2. Grafik Persentase Penduduk Menurut Suku Bangsa Tahun 2010

BAB III

JUMLAH DAN KOMPOSISI PENDUDUK

Jumlah komposisi penduduk adalah : pengelompokan atau susunan penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria- kriteria tertentu. Contoh komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain, karena setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Pemerintah dapat merancang kegiatan atau perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan penduduk. Pemerintah juga dapat menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

Karakteristik sosial dan ekonomi penduduk berhubungan dengan kualitas (mutu) sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara, sangat ditentukan oleh kualitas penduduk yang ada baik secara fisik maupun mental. Sumber daya manusia atau penduduk menjadi aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan.

3.1. Jumlah Penduduk

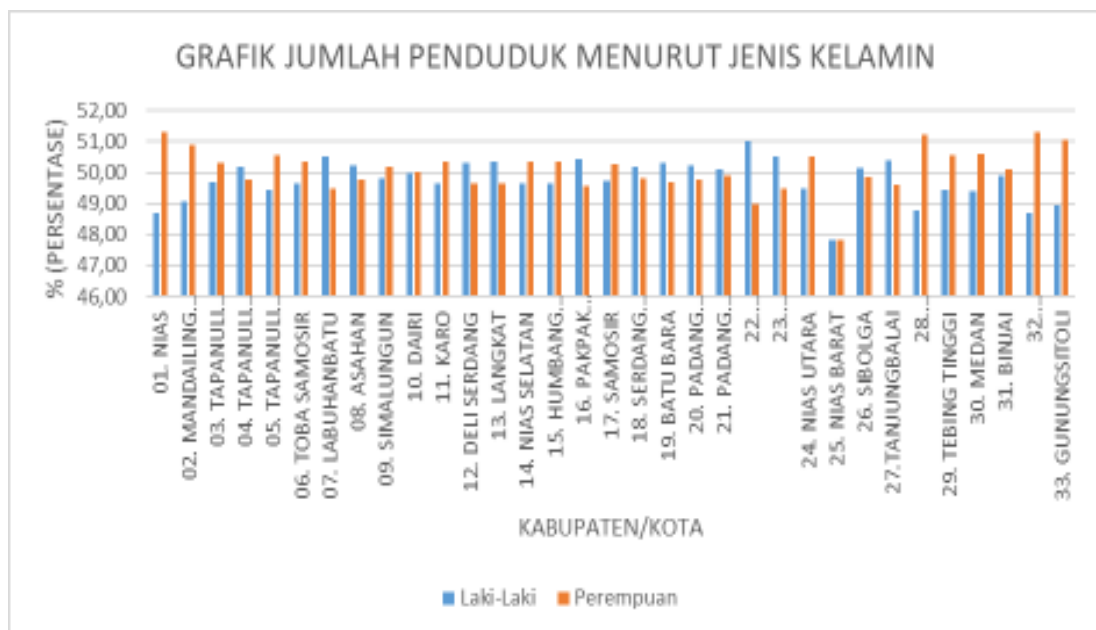
Tabel 3.1. Jumlah Dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK			PERSENTASE PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NIAS	66 682	70 215	136 897	48,71	51,29	100,00
2	MANDAILING NATAL	213 682	221 621	435 303	49,09	50,91	100,00
3	TAPANULI SELATAN	137 590	139 299	276 889	49,69	50,31	100,00
4	TAPANULI TENGAH	179 194	177 724	356 918	50,21	49,79	100,00
5	TAPANULI UTARA	146 104	149 509	295 613	49,42	50,58	100,00
6	TOBA SAMOSIR	89 688	91 006	180 694	49,64	50,36	100,00
7	LABUHANBATU	237 719	232 792	470 511	50,52	49,48	100,00
8	ASAHAN	357 900	354 784	712 684	50,22	49,78	100,00
9	SIMALUNGUN	425 794	428 695	854 489	49,83	50,17	100,00
10	DAIRI	140 200	140 410	280 610	49,96	50,04	100,00
11	KARO	196 898	199 700	396 598	49,65	50,35	100,00
12	DELI SERDANG	1 043 114	1 029 407	2 072 521	50,33	49,67	100,00
13	LANGKAT	514 211	506 997	1 021 208	50,35	49,65	100,00
14	NIAS SELATAN	154 519	156 800	311 319	49,63	50,37	100,00
15	HUMBANG HASUNDUTAN	91 789	93 126	184 915	49,64	50,36	100,00
16	PAKPAK BHARAT	23 393	22 999	46 392	50,42	49,58	100,00
17	SAMOSIR	61 904	62 592	124 496	49,72	50,28	100,00
18	SERDANG BEDAGAI	306 620	304 286	610 906	50,19	49,81	100,00
19	BATU BARA	203 689	201 299	404 988	50,30	49,70	100,00
20	PADANG LAWAS UTARA	129 514	128 293	257 807	50,24	49,76	100,00
21	PADANG LAWAS	132 181	131 603	263 784	50,11	49,89	100,00
22	LABUHANBATU SELATAN	163 390	156 991	320 381	51,00	49,00	100,00
23	LAB. BATU UTARA	179 105	175 380	354 485	50,53	49,47	100,00
24	NIAS UTARA	66 816	68 197	135 013	49,49	50,51	100,00
25	NIAS BARAT	40 805	40 805	85 291	47,84	47,84	100,00
26	SIBOLGA	43 515	43 274	86 789	50,14	49,86	100,00
27	TANJUNGBALAI	85 213	83 871	169 084	50,40	49,60	100,00
28	PEMATANGSIANTAR	121 684	127 821	249 505	48,77	51,23	100,00

29	TEBING TINGGI	78 582	80 320	158 902	49,45	50,55	100,00
30	MEDAN	1 101 020	1 128 388	2 229 408	49,39	50,61	100,00
31	BINJAI	133 692	134 209	267 901	49,90	50,10	100,00
32	PADANGSIDIMPUAN	103 709	109 208	212 917	48,71	51,29	100,00
33	GUNUNGSITOLI	67 410	70 283	137 693	48,96	51,04	100,00
	SUMATERA UTARA	7 037 326	7 065 585	14 102 911	49,90	50,07	100,00

Sumber data : BPS

Berdasarkan data tabel 3.1, penduduk Sumatera Utara lebih banyak perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki 7.037.326 (49,90 %) dan perempuan 7.061.904 (50,07 %).



Gambar 3.1. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara

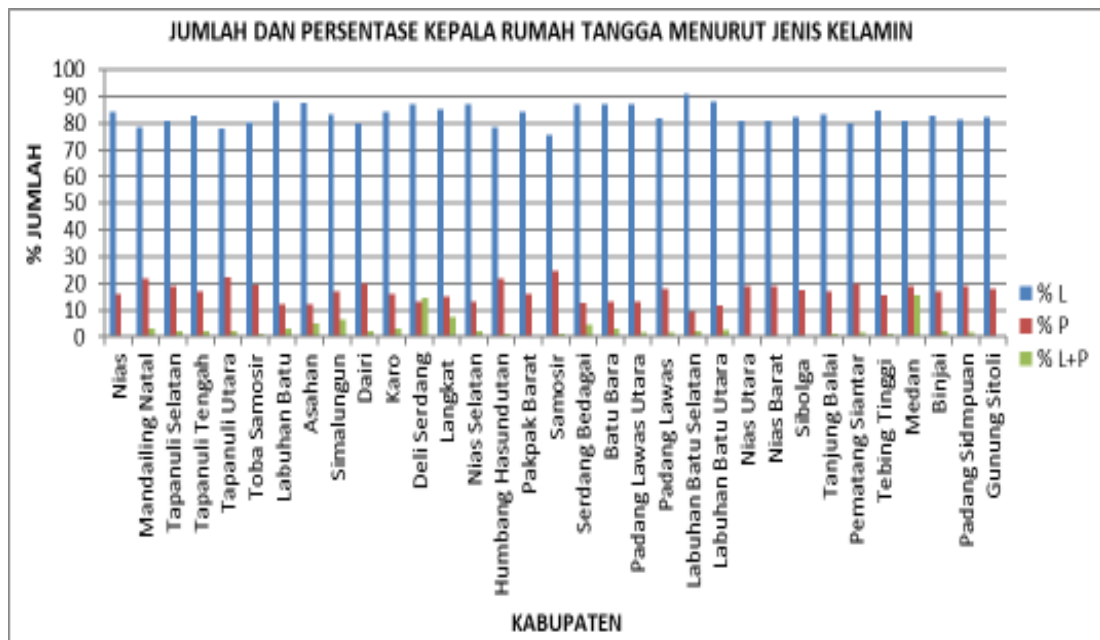
Tabel 3.2 Jumlah Dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA					
		L	%	P	%	L+P	% L+P
1	Nias	23603	84.01	4493	15.99	28096	0.85
2	Mandailing Natal	79903	78.41	22007	21.59	101910	3.09

3	Tapanuli Selatan	51857	80.92	12230	19.08	64087	1.94
4	Tapanuli Tengah	63434	82.81	13167	17.19	76601	2.32
5	Tapanuli Utara	53107	77.74	15209	22.26	68316	2.07
6	Toba Samosir	35581	80.41	8667	19.59	44248	1.34
7	Labuhan Batu	93208	87.92	12804	12.08	106012	3.21
8	Asahan	145853	87.64	20577	12.36	166430	5.04
9	Simalungun	181086	83.04	36979	16.96	218065	6.61
10	Dairi	53754	80	13435	20	67189	2.03
11	Karo	89858	84.1	16984	15.9	106842	3.24
12	Deli Serdang	422621	87.05	62867	12.95	485488	14.73
13	Langkat	213160	84.93	37811	15.07	250971	7.61
14	Nias Selatan	56444	87.02	8420	12.98	64864	1.96
15	Humbang Hasundutan	32790	78.2	9140	21.8	41930	1.27
16	Pakpak Barat	8703	83.95	1664	16.05	10367	0.31
17	Samosir	22671	75.55	7336	24.45	30007	0.91
18	Serdang Bedagai	129752	87.12	19190	12.88	148942	4.51
19	Batu Bara	80761	86.97	12098	13.03	92859	2.81
20	Padang Lawas Utara	52141	86.94	7832	13.06	59973	1.81
21	Padang Lawas	49928	81.99	10972	18.01	60900	1.84
22	Labuhan Batu Selatan	68964	90.92	6890	9.08	75854	2.30
23	Labuhan Batu Utara	72286	88.07	9793	11.93	82079	2.49
24	Nias Utara	22449	80.93	5289	19.07	27738	0.84
25	Nias Barat	12893	80.97	3031	19.03	15924	0.48
26	Sibolga	15359	82.47	3265	17.53	18624	0.56
27	Tanjung Balai	30062	83.16	6089	16.84	36151	1.09
28	Pematang Siantar	46629	79.94	11704	20.06	58333	1.76
29	Tebing Tinggi	32116	84.57	5860	15.43	37976	1.15
30	Medan	413999	80.94	97516	19.06	511515	15.52
31	Binjai	50964	82.85	10554	17.15	61518	1.86
32	Padang Sidempuan	38687	81.08	9026	18.92	47713	1.44
33	Gunung Sitoli	23152	82.16	5027	17.84	28179	0.85
SUMATERA UTARA		2.767,775	83.97	527.926	16.03	3295701	100

Sumber data: BPS

Berdasarkan data diatas tabel 3.2 bahwa kepala keluarga masih didominasi laki-laki dibandingkan perempuan yaitu 2.767,775 (83.97%) sedangkan perempuan 527.926 (16.03%). Ini didasari sistem budaya patriaki yaitu bahwa laki-laki/bapak berkuasa atas keluarga dan garis keturunan keluarga dengan membawa garis keturunan laki-laki(bapak) dan kemungkinan juga sedikitnya perempuan sebagai ibu tunggal (*singel parent*) dalam sebuah keluarga.



Gambar 3.2. Grafik Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin

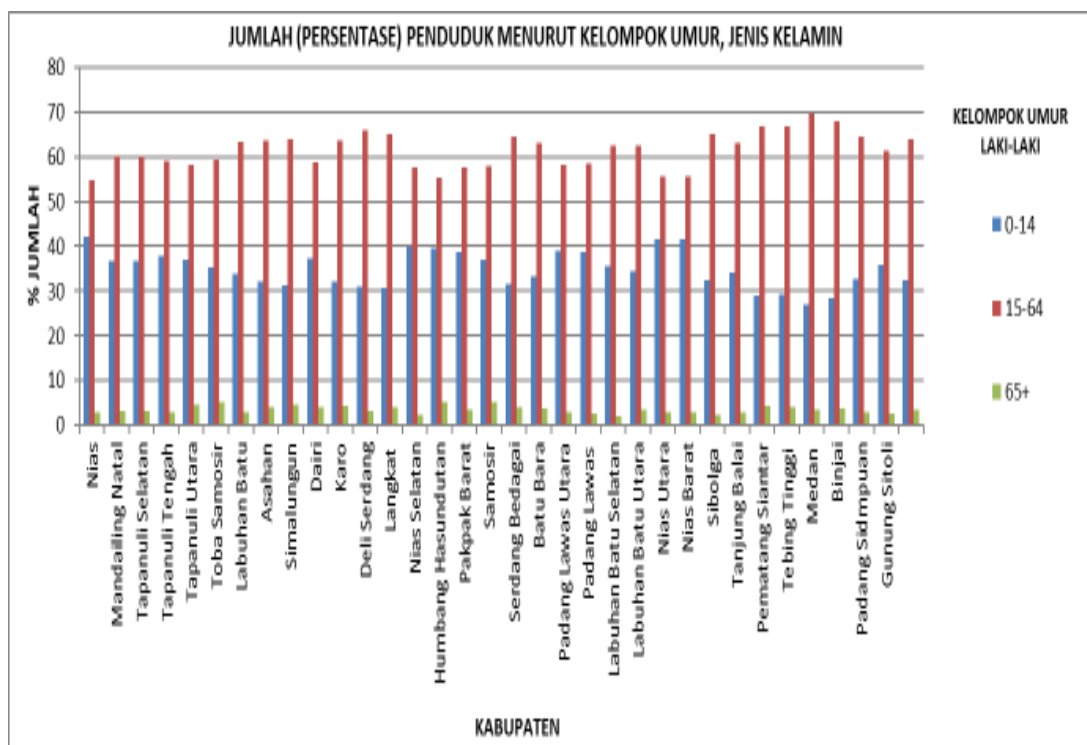
**Tabel 3.3 Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016**

No	KAB./KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+PEREMPUAN			
		KELOMPOK UMUR			JUMLAH	KELOMPOK UMUR			JUMLAH	KELOMPOK UMUR			JUMLAH
		0-14	15-64	65+		0-14	15-64	65+		0-14	15-64	65+	
1	Nias	42.25	54.83	2.92	100	38.54	58.33	3.14	100	40.34	56.62	3.03	100
2	Mandailing Natal	36.62	60.13	3.25	100	34.13	61.06	4.82	100	35.35	60.6	4.05	100
3	Tapanuli Selatan	36.75	59.93	3.32	100	34.23	60.62	5.15	100	35.48	60.28	4.24	100
4	Tapanuli Tengah	37.99	59.14	2.87	100	36.71	58.7	4.59	100	37.35	58.92	3.72	100
5	Tapanuli Utara	37.01	58.29	4.71	100	34.37	57.38	8.25	100	35.67	57.83	6.5	100
6	Toba Samosir	35.32	59.42	5.26	100	33.25	58.72	8.04	100	34.28	59.07	6.66	100
7	Labuhan Batu	33.7	63.41	2.9	100	33.31	63.13	3.56	100	33.51	63.27	3.22	100
8	Asahan	32.23	63.73	4.04	100	31.44	63.61	4.95	100	31.84	63.67	4.49	100
9	Simalungun	31.39	63.88	4.74	100	29.82	63.77	6.41	100	30.6	63.83	5.58	100
10	Dairi	37.23	58.83	3.95	100	35.2	58.72	6.08	100	36.21	58.77	5.01	100
11	Karo	32.18	63.47	4.35	100	30.4	63.21	6.39	100	31.29	63.34	5.38	100
12	Deli Serdang	30.87	66	3.13	100	29.91	66.34	3.75	100	30.39	66.17	3.44	100
13	Langkat	30.81	65.1	4.09	100	30.02	65.16	4.81	100	30.42	65.13	4.45	100
14	Nias Selatan	39.94	57.6	2.46	100	37.86	59.89	2.26	100	38.89	58.75	2.36	100
15	Humbang Hasundutan	39.44	55.27	5.3	100	36.87	54.56	8.57	100	38.14	54.91	6.94	100

16	Pakpak Barat	38.79	57.67	3.54	100	38.03	57.28	4.7	100	38.41	57.48	4.11	100
17	Samosir	36.87	57.81	5.32	100	34.29	57.41	8.3	100	35.57	57.61	6.82	100
18	Serdang Bedagai	31.42	64.38	4.2	100	30.24	64.38	5.39	100	30.83	64.38	4.79	100
19	Batu Bara	33.17	62.95	3.88	100	32.24	62.79	4.96	100	32.71	62.87	4.42	100
20	Padang Lawas Utara	39.03	58.1	2.87	100	37.85	58.54	3.6	100	38.44	58.32	3.23	100
21	Padang Lawas	38.79	58.46	2.75	100	37.53	59.15	3.32	100	38.16	58.81	3.03	100
22	Labuhan Batu Selatan	35.49	62.38	2.13	100	35.37	62.16	2.46	100	35.43	62.28	2.29	100
23	Labuhan Batu Utara	34.3	62.33	3.37	100	33.91	62.11	3.98	100	34.11	62.22	3.67	100
24	Nias Utara	41.48	55.53	3	100	37.8	58.88	3.31	100	39.62	57.22	3.16	100
25	Nias Barat	41.59	55.46	2.96	100	37.07	59.55	3.39	100	39.23	57.59	3.18	100
26	Sibolga	32.54	65.16	2.3	100	31.67	64.43	3.9	100	32.11	64.8	3.1	100
27	Tanjung Balai	33.99	63.1	2.91	100	33.13	62.83	4.04	100	33.56	62.97	3.47	100
28	Pematang Siantar	28.92	66.72	4.36	100	26.81	67.09	6.1	100	27.84	66.91	5.25	100
29	Tebing Tinggi	29.37	66.62	4.02	100	27.74	67.14	5.12	100	28.55	66.88	4.57	100
30	Medan	27.02	69.56	3.42	100	25.22	70.57	4.21	100	26.11	70.07	3.82	100
31	Binjai	28.41	67.79	3.8	100	27.01	68.48	4.5	100	27.71	68.14	4.15	100
32	Padang Sidempuan	32.67	64.52	2.81	100	30.28	65.78	3.95	100	31.44	65.16	3.39	100
33	Gunung Sitoli	35.95	61.39	2.66	100	32.36	63.75	3.89	100	34.11	62.6	3.29	100
SUMATERA UTARA		32.55	63.86	3.59	100	31.07	64.25	4.68	100	31.81	64.06	4.14	100

Sumberdata: BPS

Berdasarkan tabel 3.3, maka jumlah penduduk di Sumatera Utara menurut kelompok umur yaitu di usia produktif 15-64 dengan jumlah persentasi yaitu 64.06. Sedangkan dari segi jenis kelamin lebih banyak perempuan di usia produktif yaitu 64.25 dibandingkan laki-laki hanya 63.86. Sedangkan Kabupaten/kota jumlah penduduk yang tertinggi dari usia produktif adalah di kota Medan 70.07 dibandingkan kota atau kabupaten lainnya yang terdapat di Sumatera Utara.



Gambar 3.3. Grafik Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin

Tabel 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2016

No	KAB./KOTA	IPM (2016)	Peringkat	IPG (2015)	Peringkat	IDG (2015)	Peringkat
1	Nias	59,75	31	89.01	23	51.70	32
2	Mandailing Natal	64,55	29	92.61	15	64.80	12
3	Tapanuli Selatan	68,04	20	91.50	16	67.61	10
4	Tapanuli Tengah	67,27	22	95.29	10	60.93	19
5	Tapanuli Utara	71,96	10	99.16	2	65.34	11
6	Toba Samosir	73,61	4	98.13	4	62.75	15
7	Labuhan Batu	70,50	12	90.73	20	75.90	1
8	Asahan	68,71	18	90.82	17	61.63	17
9	Simalungun	71,48	11	92.84	14	64.52	13
10	Dairi	69,61	15	98.57	3	61.58	18
11	Karo	73,29	8	95.95	9	75.59	2
12	Deli Serdang	73,51	7	90.75	19	60.00	21
13	Langkat	69,13	16	88.42	25	56.00	30
14	Nias Selatan	59,14	32	86.89	28	57.45	28
15	Humbang	66,56	25	97.44	7	59.22	23
16	Pakpak Barat	65,81	28	99.63	1	53.91	31
17	Samosir	68,82	17	96.17	8	75.50	3
18	Serdang Bedagai	68,77	19	87.69	26	67.65	9
19	Batu Bara	66,69	26	81.29	32	68.33	8
20	Padang Lawas	68,05	21	86.24	29	59.65	22
21	Padang Lawas	66,23	27	85.95	30	57.56	27
22	Labuhan Batu	70,28	14	86.92	27	58.22	26
23	Labuhan Batu	70,26	13	89.47	22	46.77	33
24	Nias Utara	60,23	30	78.43	33	58.44	25
25	Nias Barat	59,03	33	84.56	31	70.04	6
26	Sibolga	72,00	9	97.46	6	73.80	4
27	Tanjung Balai	67,09	23	88.67	24	59.20	24
28	Pematang Siantar	76,90	2	95.18	11	73.29	5
29	Tebing Tinggi	73,58	5	93.45	12	56.82	29
30	Medan	79,34	1	93.16	13	60.54	20
31	Binjai	74,11	3	90.79	18	69.44	7
32	Padang Sidempuan	73,42	6	97.47	5	61.95	16
33	Gunung Sitoli	66,85	24	89.58	21	63.67	14
	PROVSU	70,00	10	90.96		66.83	

Sumber data: BPS

Berdasarkan tabel 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di peringkat 1 adalah kota Medan dengan jumlah 79,34 (Tahun 2016), sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) peringkat 1 adalah Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah 99,16 (Tahun 2015), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi adalah dikabupaten Labuhan Batu dengan jumlah 75,90 (Tahun 2015)

BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan telah menjadi sektor strategis dalam sistem dan program pembangunan suatu bangsa. Banyak negara telah menjadikan *leading sector*, sektor utama atau unggulan dalam program pembangunannya. Dari berbagai studi yang dilakukan, ternyata bahwa negara-negara yang menjadikan pendidikan sebagai *leading sector*, telah menjadi negara maju dan mampu menguasai pasar dunia.

Tujuan pembentukan Negara pada alinea empat Pembukaan UUD 1945 mengandung implikasi imperatif bagi pendidikan nasional yang harus menyiapkan seluruh lapisan bangsa, menyangkut proses alih generasi, yang cinta bangsa dan tanah air, peduli dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, berkehidupan yang cerdas sebagai bangsa yang berjati diri yang mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan bertanggungjawab di dalam memelihara dan membangun perdamaian dan kedamaian hidup umat manusia. Pesan ini memberikan bahwa pembangunan pendidikan, untuk menyiapkan generasi bangsa secara berkelanjutan, harus membuat bangsa ini memiliki kemampuan melihat ke dalam (*inward looking*) dan melihat ke luar (*outward looking*), yang akan membangun bangsa ini dalam keseimbangan antara Nasionalisme dan Internasionalisasi atau globalisasi.

Pendidikan merupakan satu elemen yang penting untuk membentuk manusia yang berketerampilan dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dengan pemerintah yang perlu berlangsung seumur hidup.

Kemiskinan ilmu yang menyelimuti perempuan akan membuatkan rakyatnya tertinggal dalam pembangunan di Indonesia dan khususnya Sumatera Utara. Oleh sebab itu untuk memajukan suatu bangsa, dibuka seluas-luasnya kesempatan kepada perempuan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

Menurut Suryadi (1999) kebijaksanaan pendidikan tentu harus memperhitungkan perubahan masyarakat yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, agar semakin realistis dan sesuai dengan tantangan zaman yang terus berubah. Ki Hadjar Dewantara (1977) mengemukakan bahwa mendidik seorang anak merupakan mendidik rakyat yang akan menuju kepada kemerdekaan dirinya lahir

dan batin dan sebagai manusia merdeka bersandar hanya kepada kekuatan dirinya bukan orang lain.

Kewajiban Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan kewajiban pendidikan oleh seluruh rakyat Indonesia minimal harus mengikuti pendidikan wajib selama 9 tahun yaitu dari tingkat SD selama 6 tahun dan tingkat SMP selama 3 tahun sehingga jumlah 9 tahun sebagai jangka waktu pada 2 jenjang pendidikan yang harus diikuti segenap bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah. Ini berarti peserta didik: anak siapapun, di manapun, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus, berhak mengikuti pendidikan tanpa membayar, dan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20/2003).
2. Setiap sekolah harus segera dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk lapangan olah raga (sesuai dengan pasal-pasal dalam Bab VII PP No. 19/2005) dan kepada peserta didik diberikan (atau dipinjamkan) buku pelajaran dan buku tulis, terutama untuk mereka yang datang dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Di samping itu untuk daerah terpencil seperti Papua perlu dirintis sekolah berasrama.
3. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus mengakses seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak tak beruntung, populasi khusus, yang harus dilayani dengan diversifikasi program layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing, dan sekolah harus menyiapkan diversifikasi layanan secara inklusif.
4. Sebagai persiapan memasuki pendidikan menengah pada tingkat pendidikan dasar harus dirancang dengan sistematis sehingga hanya lulusan pendidikan dasar yang bersifat wajib, yang memenuhi syarat memasuki pendidikan menengah, dan yang tidak memenuhi syarat untuk masuk SMA dipersiapkan untuk memasuki SMK dan/atau latihan kerja (kursus) yang sifatnya jangka pendek untuk memasuki dunia kerja.

Adapun Standar Nasional Pendidikan yang harus diperhatikan pemerintah yang berguna bagi sekolah dan penyelenggara sekolah, masyarakat yaitu:

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional serta akreditasi tingkat kelayakan sekolah di seluruh Indonesia.

Evaluasi diperlukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang mutu pelayanan pendidikan dalam sembilan komponen penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 2 PP No. 19/2005.

2. Pemerintah harus menyusun program dan melaksanakan secara konsisten program-program tersebut untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan dalam PP No. 19/2005 dengan urutan prioritas; guru, sarana dan prasarana, isi dan proses, penilaian, pembiayaan, pengelolaan dan yang terakhir kompetensi lulusan.

Secara umum pendidikan terbagi kedalam dua bahagian yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang didapat disekolah dimana ada guru sebagai pengajar atau disebut juga sebagai orang tua di luar rumah dan siswa sebagai pelajar. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diajarkan dirumah oleh orang tua kepada anaknya untuk menjadikan seorang anak itu baik atau buruk sifatnya dan biasanya pendidikan non formal itu diikuti dengan pergaulan dilingkungan sekitar yang juga membentuk peribadi anak (Ulwan, 1998).

4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penyangga utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Melalui pendidikan merupakan salah satu cara yang utama untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

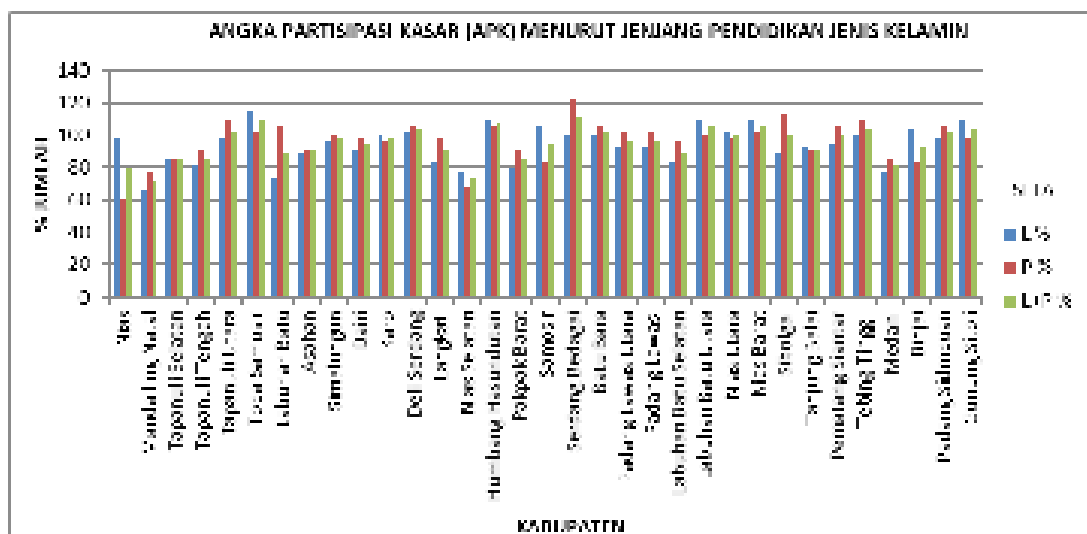
Tabel 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Nias	110.51	111.99	111.22	97.64	96.08	96.97	98.01	60.49	78.63
2	Mandailing Natal	120.14	105.92	112.58	95.81	99.77	97.74	67.28	77.55	72.38
3	Tapanuli Selatan	114.01	107.56	110.78	91.69	100.06	95.54	84.59	85.58	85.06
4	Tapanuli Tengah	113.06	117.24	115.02	105.41	98.07	101.95	80.86	90.87	85.73
5	Tapanuli Utara	112.85	116.54	114.56	101.66	96.79	99.4	97.53	109.05	102.49
6	Toba Samosir	108.24	118.63	113.25	83.28	95.48	89.21	114.63	102.5	109.93
7	Labuhan Batu	106.76	115.01	110.81	95.95	89.14	92.26	73.93	105.42	88.43
8	Asahan	106.77	112.07	109.29	93.73	77.77	85.59	89.38	91.45	90.31
9	Simalungun	113.25	109.41	111.41	98.07	81.2	90.04	95.95	100.13	98.11
10	Dairi	116.53	114.47	115.53	93.82	96.74	95.26	90.42	98.18	94.23
11	Karo	106.76	113.83	110.31	86.51	90.67	88.41	100.91	96.43	98.47
12	Deli Serdang	110.75	115.94	113.28	74.99	74.77	74.88	101.25	105.19	103.11
13	Langkat	112.59	113.33	112.93	97.64	79.99	88.48	83.56	99.12	91.14
14	Nias Selatan	108.97	109.75	109.34	78.65	88.49	82.98	78.14	68.9	73.67
15	Humbang Hasundutan	122.06	111.17	116.36	90.34	95.01	92.6	110.18	105.74	108.12
16	Pakpak Barat	112.69	113.91	113.27	88.38	98.97	94.13	80.43	90.5	84.78
17	Samosir	115.37	113.78	114.55	86.37	105.48	94.18	105.06	83.29	94.21
18	Serdang Bedagai	118.53	108.52	113.38	81.31	84.15	82.6	100.44	122.62	112.05
19	Batu Bara	113.81	117.51	115.58	83.87	91.1	87.3	99.32	104.96	102.2
20	Padang Lawas Utara	109.22	110.39	109.81	94.03	99.78	96.96	91.83	102.88	97.07
21	Padang Lawas	114.38	111.62	112.86	87	87.42	87.17	92.45	101.83	95.94
22	Labuhan Batu Selatan	106.37	104.23	105.36	85.81	93.26	89.63	83.76	97.1	89.67
23	Labuhan Batu Utara	106.64	116.63	111.64	89.98	83.18	86.77	109.42	100.41	104.81
24	Nias Utara	117.77	113.2	115.45	82.81	87.38	84.76	101.64	98.41	99.9
25	Nias Barat	117.48	113.38	115.47	80.9	89.01	84.93	110.37	102.12	106.12
26	Sibolga	112.68	114.99	113.89	104.05	89.39	96.29	89.6	114.15	99.48
27	Tanjung Balai	110.44	105.24	107.97	88.35	91.03	89.62	92.26	90.34	91.22
28	Pematang Siantar	113.6	122.91	118.17	96.19	92.29	94.17	94.82	105.39	99.98
29	Tebing Tinggi	111.61	105.5	108.69	92.25	116.56	103.08	99.51	108.7	104.21
30	Medan	98.51	103.64	101.01	109.76	108.7	109.21	77.2	85.29	81.12
31	Binjai	119.14	111.76	115.69	71.83	93.17	81.99	104.5	82.87	93.51
32	Padang Sidempuan	104.49	112.05	108.16	96.11	94.27	95.14	98.31	105.71	102.4
33	Gunung Sitoli	122.15	111.03	116.69	91.91	86.15	88.88	108.82	99.14	104.63
	SUMATERA UTARA	110.27	111.54	110.89	91.35	90.06	90.71	90.67	96.01	93.25
	- Perkotaan	108.66	110.8	109.7	91.2	91.64	91.42	91.92	94.54	93.2
	- Perdesaan	111.73	112.19	111.96	91.47	88.65	90.11	89.4	97.52	93.31

Sumber data: BPS

[illegible][illegible]

27



Gambar 4.3. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SLTA dan Jenis Kelamin

4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

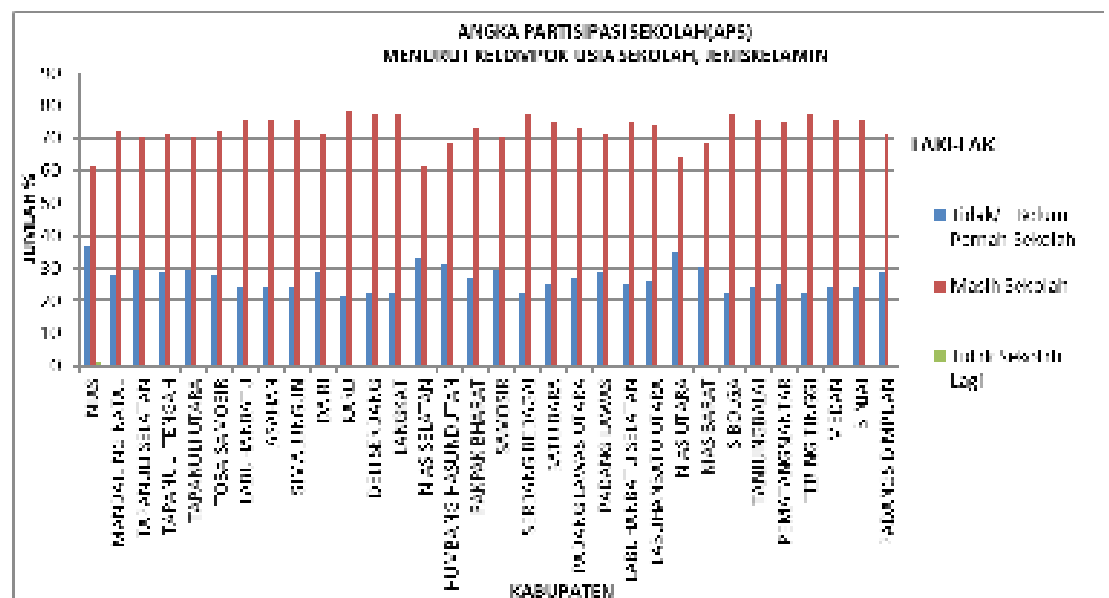
NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+		PEREMPUAN	
		Tidak/ Belum Pernah Sekola h	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	JUMLA H	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	JUMLA H	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	JUMLA H
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
01.	NIAS	1.75	36.82	61.43	100	3.51	27.19	69.3	100	2.65	31.88	65.47	100
02.	MANDAILING NATAL	0.16	27.65	72.19	100		25.59	74.41	100	0.08	26.59	73.33	100
03.	TAPANULI SELATAN	0.74	29.21	70.05	100	0.15	27.2	72.65	100	0.44	28.19	71.37	100
04.	TAPANULI TENGAH	0.28	28.71	71.01	100	0.05	28.71	71.25	100	0.16	28.71	71.13	100
05.	TAPANULI UTARA		30.03	69.97	100		28.35	71.65	100		29.17	70.83	100
06.	TOBA SAMOSIR	0.27	27.89	71.83	100	0.25	24.71	75.04	100	0.26	26.28	73.46	100
07.	LABUHANBATU	0.26	24.36	75.38	100	0.22	25.65	74.13	100	0.24	25	74.76	100
08.	ASAHAN	0.07	24.32	75.61	100		23.13	76.87	100	0.03	23.73	76.24	100
09.	SIMALUNGUN		24.11	75.89	100	0.05	21.86	78.09	100	0.03	22.97	77	100
10.	DAIRI	0.52	28.31	71.17	100	0.13	26.13	73.74	100	0.32	27.21	72.47	100
11.	KARO	0.35	21.25	78.4	100	0.21	21.71	78.08	100	0.28	21.48	78.24	100
12.	DELI SERDANG	0.35	22.59	77.06	100	0.07	23.56	76.37	100	0.21	23.07	76.72	100
13.	LANGKAT		22.17	77.83	100	0.1	22.01	77.89	100	0.05	22.09	77.86	100
14.	NIAS SELATAN	5.19	33.02	61.78	100	7.48	28.69	63.83	100	6.33	30.88	62.8	100
15.	HUMBANG HASUNDUTAN	0.14	31.08	68.78	100		27.12	72.88	100	0.07	29.07	70.86	100
16.	PAKPAK BHARAT		27.07	72.93	100		27.85	72.15	100		27.46	72.54	100
17.	SAMOSIR	0.02	29.21	70.77	100		25.15	74.85	100	0.01	27.16	72.83	100

18.	SERDANG BEDAGAI		22.11	77.89	100	0.17	23.32	76.51	100	0.08	22.72	77.2	100
19.	BATU BARA	0.12	25.21	74.67	100		25.87	74.13	100	0.06	25.54	74.4	100
20.	PADANG LAWAS UTARA	0.15	26.89	72.96	100		27.49	72.51	100	0.07	27.19	72.73	100
21.	PADANG LAWAS	0.22	28.65	71.13	100		25.18	74.82	100	0.11	26.93	72.96	100
22.	LABUHANBATU SELATAN	0.48	24.81	74.71	100	0.3	26.15	73.54	100	0.39	25.47	74.14	100
23.	LABUHANBATU UTARA	0.07	25.69	74.24	100		26.11	73.89	100	0.03	25.89	74.07	100
24.	NIAS UTARA	0.49	34.98	64.53	100	0.91	30.78	68.31	100	0.71	32.83	66.47	100
25.	NIAS BARAT	0.65	30.78	68.56	100	2.15	25.76	72.1	100	1.45	28.11	70.44	100
26.	SIBOLGA		22.81	77.19	100		24.35	75.65	100		23.58	76.42	100
27.	TANJUNGBALAI	0.14	24.49	75.37	100	0.67	25.84	73.49	100	0.4	25.16	74.43	100
28.	PEMATANGSIANTAR	0.09	25.26	74.65	100		24.15	75.85	100	0.04	24.69	75.27	100
29.	TEBING TINGGI	0.33	22.46	77.22	100	0.19	22.06	77.75	100	0.26	22.25	77.49	100
30.	MEDAN	0.03	23.85	76.12	100	0.23	24.94	74.83	100	0.13	24.4	75.47	100
31.	BINJAI		24.37	75.63	100	0.14	22.66	77.2	100	0.07	23.51	76.42	100
32.	PADANGSIDIMPUAN		28.39	71.61	100		30.13	69.87	100		29.29	70.71	100
33.	GUNUNGSITOLI	0.29	29.67	70.04	100	0.3	25.24	74.46	100	0.3	27.38	72.32	100
	SUMATERA UTARA	0.29	25.03	74.67	100	0.33	24.68	74.99	100	0.31	24.85	74.84	100
	Perkotaan	0.14	23.88	75.98	100	0.14	24.5	75.35	100	0.14	24.2	75.66	100
	Perdesaan	0.46	26.23	73.31	100	0.53	24.86	74.61	100	0.49	25.54	73.97	100

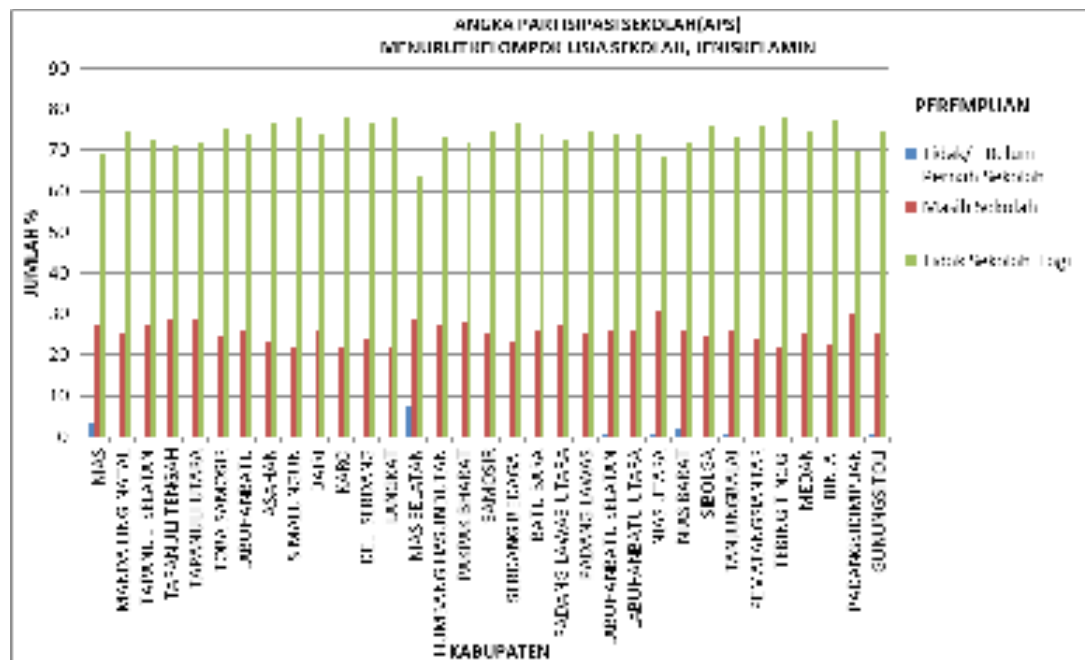
Sumber data: BPS

Berdasarkan data 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari jenis kelamin laki-laki tertinggi yang tidak pernah/belum bersekolah yaitu di Kabupaten Nias Selatan 5.19 sedangkan laki-laki yang masih sekolah angka tertinggi dari Kabupaten Nias Selatan 36.82, tidak sekolah lagi angka tertinggi dari Kabupaten Karo 78,40.

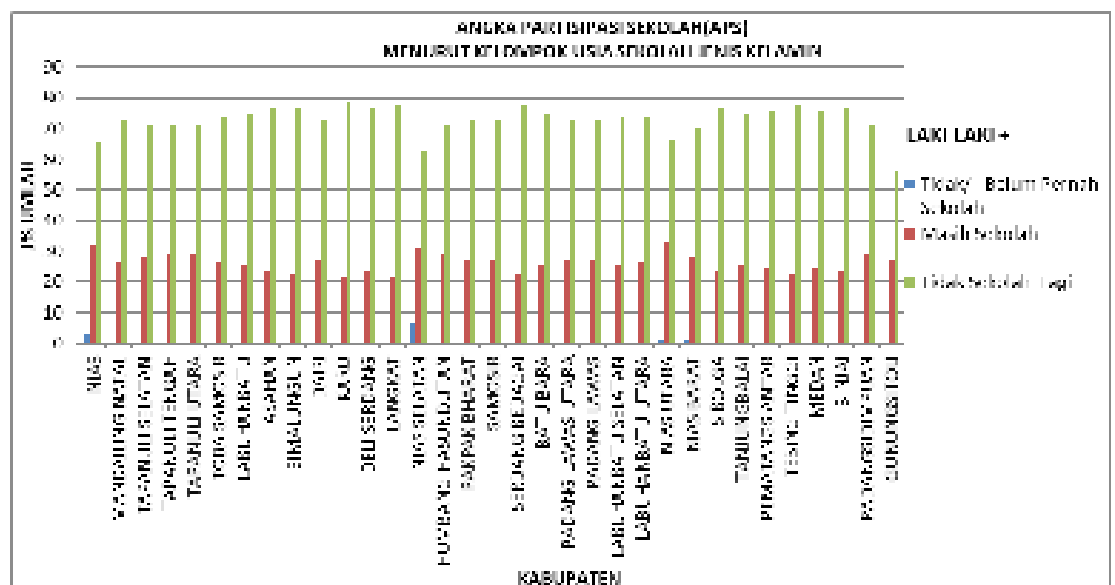
Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari jenis kelamin perempuan tertinggi yang tidak pernah/belum bersekolah yaitu di Kabupaten Nias Selatan 7.48 sedangkan perempuan yang masih sekolah angka tertinggi 30.78 dari Kabupaten Nias Utara, tidak sekolah lagi angka tertinggi dari Kabupaten Simalungun 78,09. Sedangkan dari segi jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan yang tidak pernah/belum bersekolah yaitu di Kabupaten Nias Selatan 6.33 sedangkan yang masih sekolah angka tertinggi dari Kabupaten Nias 31.88, tidak sekolah lagi angka tertinggi dari Kabupaten Karo 78,24.



Gambar 4.4. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki)



Gambar 4.5. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Perempuan)



Gambar 4.6. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan)

4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis

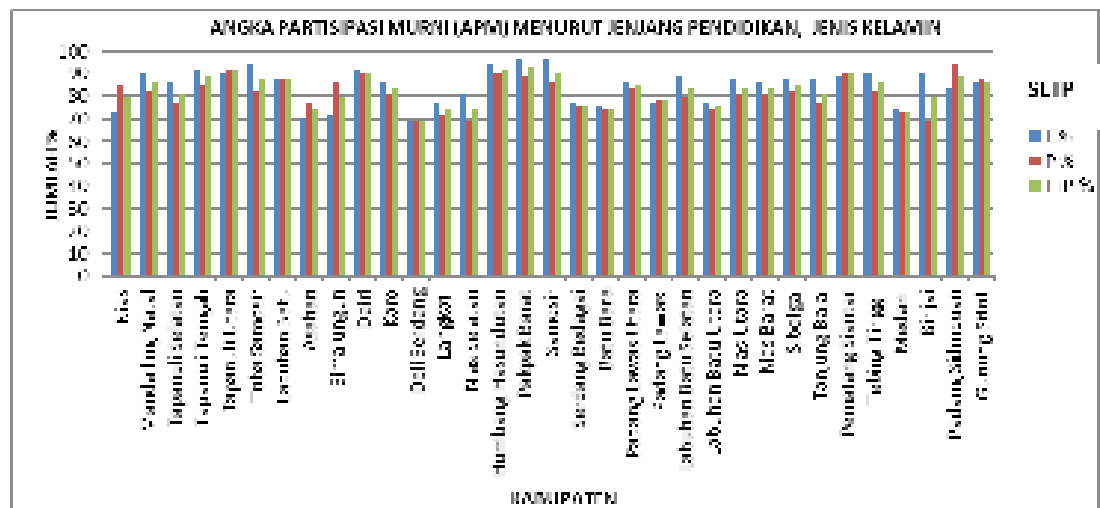
Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		P	L	P+L	P	L	P+L	P	L	P+L
1	Nias	96.94	99.48	98.25	73.30	84.25	79.55	48.02	76.84	61.95
2	Mandailing Natal	97.42	97.73	97.56	89.45	82.55	85.92	62.03	51.24	56.60
3	Tapanuli Selatan	98.01	98.99	98.50	85.46	76.99	80.88	71.42	55.54	63.02
4	Tapanuli Tengah	98,26	97.33	97.76	91.55	85.32	88.26	79.04	53.23	65.78
5	Tapanuli Utara	100.00	100.00	100.00	90.51	91.31	90.93	77.36	7564	76.38
6	Toba Samosir	99.58	98.39	98.96	94.45	81.51	87.80	95.92	80.97	86.76
7	Labuhan Batu	98.60	99.40	99.01	87.52	87.20	87.37	74.20	54.00	63.30
8	Asahan	99.14	94.19	96.54	70.76	77.35	73.99	53.95	63.36	59.17
9	Simalungun	99.25	98.96	99.10	71.49	86.73	79.48	62.98	65.71	64.29
10	Dairi	100.00	97.99	98.96	91.10	89.79	90.43	83.82	77.33	80.52
11	Karo	100.00	98.68	99.35	86.03	81.32	83.47	79.33	72.57	76.25
12	Deli Serdang	98.55	98.54	98.54	69.44	68.91	69.17	67.96	72.35	70.27
13	Langkat	97.67	91.25	94.24	77.45	71.96	74.81	69.05	54.09	61.38
14	Nias Selatan	95.07	96.52	95.83	80.82	68.82	74.10	56.73	59.04	57.92
15	Humbang Hasundutan	100.00	100.00	100.00	93.44	90.34	91.84	89.82	86.06	87.80
16	Pakpak Barat	98.86	100.00	99.46	97.07	88.38	93.10	87.50	69.55	77.30
17	Samosir	100.00	100.00	100.00	97.29	85.58	90.36	79.20	77.96	78.58
18	Serdang Bedagai	97.54	97.68	97.61	76.56	75.06	75.74	75.25	57.75	66.91
19	Batu Bara	95.78	98.07	96.98	74.99	73.64	74.28	75.48	48.35	62.21
20	Padang Lawas Utara	94.48	97.76	96.12	86.57	83.54	85.08	84.24	60.47	71.76
21	Padang Lawas	97.44	99.05	98.17	77.25	78.73	78.12	72.41	63.77	66.98
22	Labuhan Batu Selatan	97.19	98.75	98.01	88.22	79.44	83.94	85.22	69.96	76.72
23	Labuhan Batu Utara	100.00	93.94	96.97	77.00	73.62	75.22	71.90	62.46	67.29
24	Nias Utara	98.14	99.31	98.72	86.99	80.74	83.41	82.83	72.41	78.00
25	Nias Barat	100.00	100.00	100.00	85.75	80.90	83.32	88.92	81.76	85.45
26	Sibolga	99.03	90.58	94.99	87.39	82.74	85.20	95.55	78.51	85.37
27	Tanjung Balai	98,13	96.81	97.44	87.05	76.44	81.47	81.99	62.25	72.90
28	Pematang Siantar	100.00	99.21	99.60	89.18	90.46	89.80	83.92	76.12	79.92
29	Tebing Tinggi	90.61	100.00	95.52	89.99	81.85	8547	76.90	68.13	72.61
30	Medan	87.41	87.87	87.65	74.10	72.55	73.36	62.18	5172	56.79
31	Binjai	100.00	98.98	99.46	90.25	69.49	79.37	71.62	77.68	74.60
32	Padang Sidmpuan	98.71	99.14	98.93	83.70	94.09	88.58	83.52	79.52	81.73
33	Gunung Sitoli	99.69	100.00	99.85	85.48	87.80	86.58	88.20	80.77	83.99
	SUMATERA UTARA	96.83	96.32	96.57	79.59	77.87	78.71	70.48	63.45	66.85
	- Perkotaan	95.57	94.67	95.11	78.40	74.84	76.62	68.77	62.91	65.76
	- Perdesaan	97.94	97.80	97.87	80.64	80.36	80.49	72.24	64.00	67.96

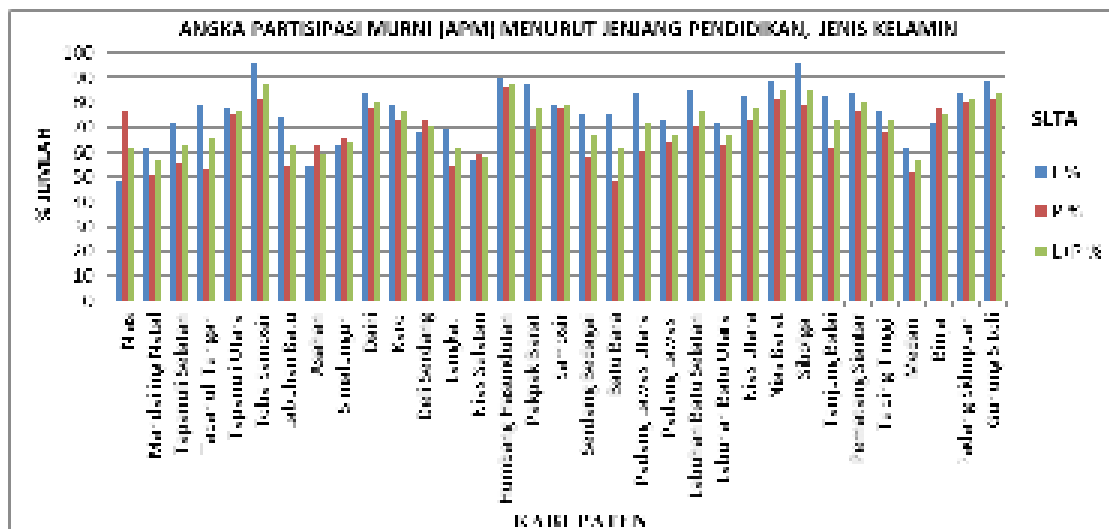
Sumber data: BPS

Berdasarkan tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan tertinggi 100,00 SD dari jenis kelamin laki-laki adalah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, Nias Barat, Tebing Tinggi, Gunung Sitoli. jenjang pendidikan terendah 87,87 SD dari jenis kelamin laki-laki adalah Medan. Jenjang pendidikan tertinggi 100,00 SD dari jenis kelamin perempuan adalah Tapanuli Utara, Dairi, Karo, Humbang Hasudutan, Samosir, Labuhan Batu Utara, Nias Barat, Pematang Siantar, Binjai. Jenjang pendidikan terendah 87,41 SD dari jenis kelamin perempuan adalah Medan. Jenjang pendidikan tertinggi 94,09 SLTP dari jenis kelamin laki-laki adalah Kota Padang Sidempuan. Jenjang pendidikan terendah 68,82 SLTP dari jenis kelamin laki-laki adalah Nias Selatan. Jenjang pendidikan tertinggi 97,29 SLTP dari jenis kelamin perempuan adalah Samosir. Jenjang pendidikan terendah 69,44 SLTP dari jenis kelamin perempuan adalah Deli Serdang. Jenjang pendidikan tertinggi 86,06 SLTA dari jenis kelamin laki-laki adalah Humbang hasundutan. Jenjang pendidikan terendah 51,24 SLTA dari jenis kelamin laki-laki adalah Mandailing Natal. Jenis pendidikan tertinggi 95,92 SLTA dari jenis kelamin perempuan adalah Toba Samosir. Jenis pendidikan terendah 48,02 SLTA dari jenis kelamin perempuan adalah Nias.

Gambar 4.7. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SD) dan Jenis Kelamin



Gambar 4.8. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SLTP) dan Jenis Kelamin



Gambar 4.9. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SLTA) dan Jenis Kelamin

4.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator Angka Melek Huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH). Angka Melek Huruf (AMH) ialah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Buta Huruf (ABH) ialah angka buta huruf yaitu proporsi ketidakmampuan penduduk dalam membaca dan menulis huruf latin khususnya bahasa Indonesia dan huruf lainnya.

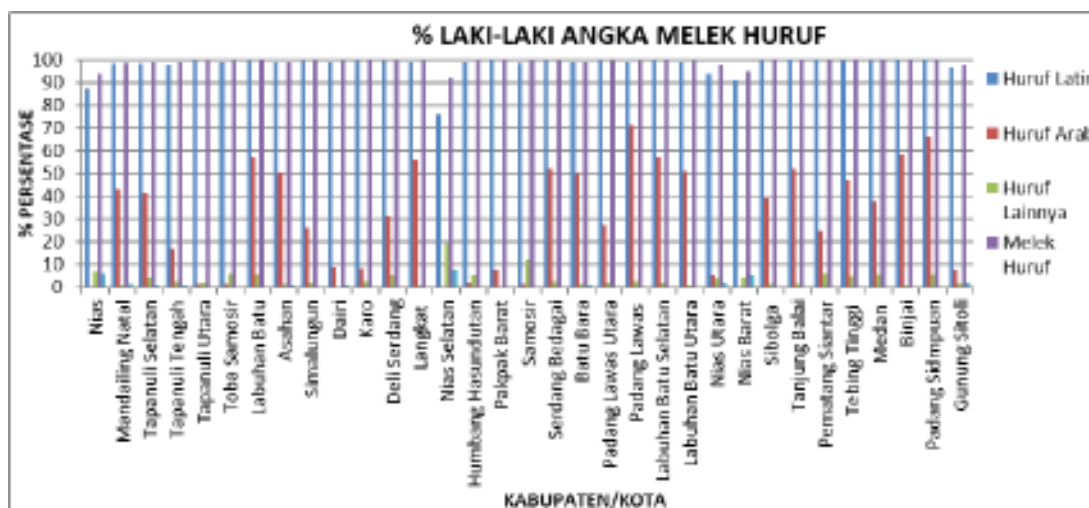
**Tabel 4.4. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016**

N O	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI					PEREMPUAN					LAKI-LAKI + PEREMPUAN				
		Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainny	Melek Huruf	Buta Huruf	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainny	Melek Huruf	Buta Huruf	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Melek Huruf	Buta Huruf
1	Nias	87.2	0.36	7.1	93.95	6.05	72.98	0.3	18.9	91.44	8.56	79.9	0.33	13.16	92.66	7.34
2	Mandailing Natal	98.33	43.16	0.97	98.76	1.24	97.76	51.8	1.78	98.88	1.12	98.04	47.6	1.39	98.82	1.18
3	Tapanuli Selatan	98.29	41.47	4.15	99.24	0.76	98.08	47.88	3.76	98.84	1.16	98.18	44.72	3.95	99.04	0.96
4	Tapanuli Tengah	97.77	16.72	2.48	99.15	0.85	96.91	17.59	2.8	98.18	1.82	97.34	17.16	2.65	98.67	1.33
5	Tapanuli Utara	99.7	1.12	1.92	99.7	0.3	98.57	1.6	1.66	98.75	1.25	99.12	1.37	1.79	99.22	0.78
6	Toba Samosir	98.91	1.22	5.88	99.55	0.45	97.98	1.46	3.91	98.49	1.51	98.44	1.34	4.88	99.01	0.99
7	Labuhan Batu	99.71	57.35	5.49	99.9	0.1	99.2	56.8	5.17	99.32	0.68	99.46	57.08	5.33	99.61	0.39
8	Asahan	98.87	50.45	1.46	99.29	0.71	96.8	55.58	1.23	97.98	2.02	97.83	53.01	1.35	98.64	1.36
9	Simalungun	99.33	25.84	2.06	99.54	0.46	97.53	26.04	2.48	97.99	2.01	98.42	25.94	2.27	98.76	1.24
10	Dairi	99.01	8.79	0.5	99.33	0.67	98.49	9.09	0.31	98.7	1.3	98.75	8.94	0.41	99.01	0.99
11	Karo	99.7	8.21	2.39	99.92	0.08	98.45	9.39	2.68	99.53	0.47	99.07	8.81	2.54	99.72	0.28
12	Deli Serdang	99.33	31.35	5.27	99.64	0.36	98.98	31.3	5.13	99.42	0.58	99.15	31.33	5.2	99.53	0.47
13	Langkat	99.11	55.95	1.03	99.42	0.58	97.56	59.61	1.21	98.43	1.57	98.34	57.77	1.12	98.93	1.07
14	Nias Selatan	76.16	0.09	19.14	92.2	7.8	67.81	0.36	23.14	88.52	11.48	72.02	0.22	21.12	90.38	9.62
15	Humbang Hasundutan	99.17	2.31	5.25	99.49	0.51	98.01	1.94	4.55	98.49	1.51	98.58	2.12	4.89	98.98	1.02
16	Pakpak Barat	99.8	7.96	0.21	99.8	0.2	98.12	9.35	0.57	98.36	1.64	98.97	8.65	0.39	99.09	0.91
17	Samosir	98.83	1.33	12.1	99.45	0.55	95.69	0.73	9.92	96.08	3.92	97.24	1.03	11	97.74	2.26
18	Serdang Bedagai	99.4	52.18	2.44	99.51	0.49	97.06	56.43	2.93	98.4	1.6	98.23	54.31	2.68	98.95	1.05
19	Batu Bara	98.96	49.9	1.08	99.26	0.74	96.5	54.71	1.84	97.86	2.14	97.73	52.3	1.46	98.56	1.44
20	Padang Lawas Utara	99.45	27.48	2.14	99.69	0.31	98.92	30.22	2.7	99.53	0.47	99.18	28.86	2.42	99.61	0.39
21	Padang Lawas	98.97	71.45	2.41	99.68	0.32	98.4	72.66	1.69	99.15	0.85	98.69	72.05	2.05	99.42	0.58
22	Labuhan Batu Selatan	99.33	57.52	2.34	99.78	0.22	98.99	59.35	2.84	99.49	0.51	99.16	58.42	2.58	99.63	0.37
23	Labuhan Batu Utara	99.19	51.04	0.72	99.46	0.54	97.22	55.09	0.82	97.38	2.62	98.22	53.05	0.77	98.43	1.57
24	Nias Utara	93.96	5.25	3.66	97.7	2.3	85.11	4.79	9.48	94.66	5.34	89.42	5.01	6.65	96.14	3.86

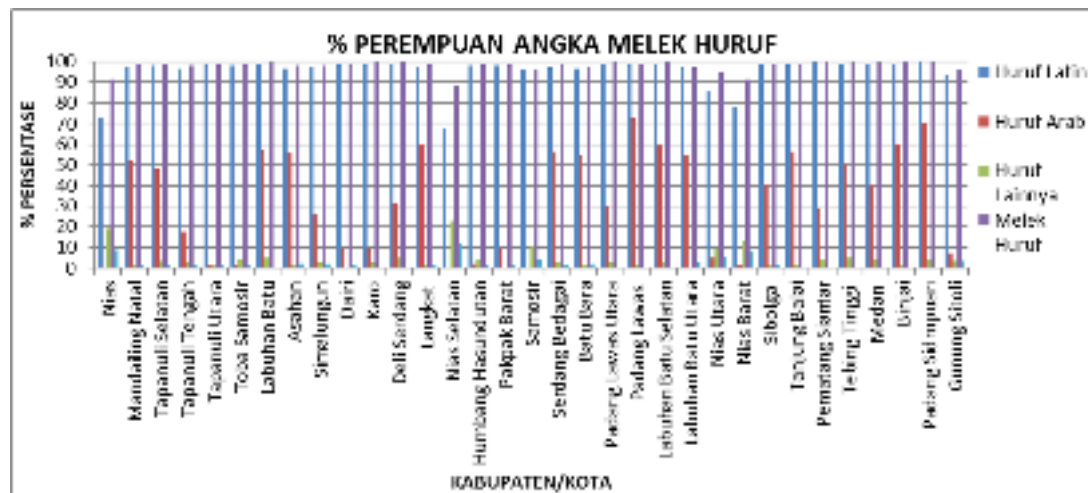
25	Nias Barat	90.84	0.44	4.27	95.01	4.99	78.38	0.93	13.19	91.53	8.47	84.21	0.7	9.02	93.16	6.84
26	Sibolga	99.63	39.03	1.42	99.84	0.16	98.92	40.24	1.15	99.05	0.95	99.27	39.64	1.29	99.44	0.56
27	Tanjung Balai	100	52.12	1.08	100	0	98.78	56.67	1.21	99.24	0.76	99.39	54.39	1.15	99.62	0.38
28	Pematang Siantar	99.91	24.82	5.96	100	0	99.43	28.45	4.4	99.43	0.57	99.66	26.7	5.16	99.71	0.29
29	Tebing Tinggi	99.48	46.7	4.74	99.9	0.1	99.15	50.17	5.13	99.55	0.45	99.31	48.47	4.94	99.72	0.28
30	Medan	99.73	37.66	5.41	99.96	0.04	99.26	39.96	4.11	99.5	0.5	99.49	38.83	4.75	99.72	0.28
31	Binjai	99.97	58.1	0.85	100	0	99.23	59.76	1.04	99.55	0.45	99.6	58.94	0.95	99.77	0.23
32	Padang Sidempuan	99.94	66.06	5.44	99.94	0.06	99.53	70.71	4.33	100	0	99.73	68.46	4.86	99.97	0.03
33	Gunung Sitoli	96.33	7.96	1.74	97.82	2.18	93.17	7.42	3.47	96.33	3.67	94.7	7.68	2.63	97.05	2.95
	SUMATERA UTARA	98.56	36.11	3.79	99.35	0.65	97.12	38.07	3.88	98.49	1.51	97.83	37.1	3.84	98.92	1.08
	- Perkotaan	99.58	39.66	4.55	99.83	0.17	98.84	41.9	4.07	99.28	0.72	99.2	40.79	4.3	99.55	0.45
	- Perdesaan	97.5	32.41	3	98.84	1.16	95.29	34.02	3.69	97.66	2.34	96.39	33.22	3.34	98.25	1.75

Sumber data : BPS

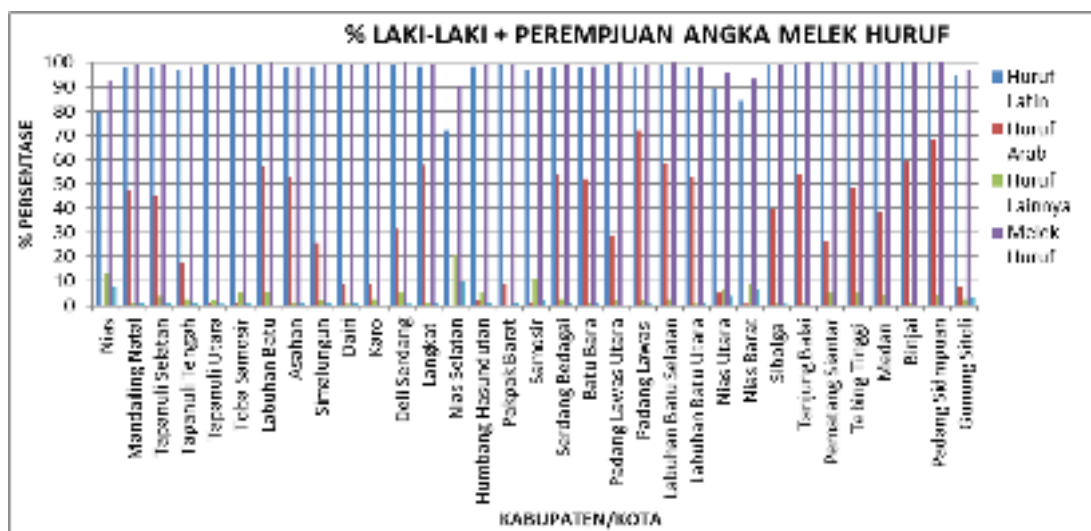
Berdasarkan tabel 4.4. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf latin jenis kelamin laki-laki tertinggi 100,00 adalah Kota Tanjung Balai dan terendah 76,16 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf arab jenis kelamin laki-laki tertinggi 71,45 adalah Kabupaten Padang Lawas dan terendah 0,09 Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf lainnya jenis kelamin laki-laki tertinggi 19,14 adalah Kabupaten Nias Selatan dan terendah 0,21 adalah Kabupaten Pakpak Barat. Angka Melek Huruf (AMH) untuk melek huruf tertinggi 100,00 adalah Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, dan Kota Binjai dan terendah 92,20 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Buta Huruf (ABH) huruf tertinggi 7,80 adalah Kabupaten Nias Selatan, dan terendah 0,10 adalah Kabupaten Labuhanbatu. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf latin jenis kelamin perempuan tertinggi 99,53 adalah Kota Padang Sidempuan dan terendah 67,81 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf arab jenis kelamin perempuan tertinggi 72,66 adalah Kabupaten Padang Lawas dan terendah 0,30 adalah Kabupaten Nias. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf lainnya jenis kelamin perempuan tertinggi 23,14 adalah Kabupaten Nias Selatan dan terendah 0,31 adalah Kabupaten Dairi. Angka Melek Huruf (AMH) untuk melek huruf jenis kelamin perempuan tertinggi 100,00 adalah Kota Padang Sidempuan dan terendah 88,52 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk buta huruf jenis kelamin perempuan tertinggi 11,48 adalah Kabupaten Nias Selatan dan terendah 0,45 adalah Kota Tebing Tinggi dan Kota Binjai.



Gambar 4.10. Grafik Persentase Laki-Laki Angka Melek Huruf



Gambar 4.11. Grafik Persentase Perempuan Angka Melek Huruf



Gambar 4.12. Grafik Persentase Laki-Laki + Perempuan Angka Melek Huruf

4.5 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Begitupula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Benarkah ini karena faktor ekonomi, budaya atau sistem yang tidak berpihak pada mereka?

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik. Sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu. Berikut ini dijelaskan deskripsi anak putus sekolah di Provinsi Sumatera Utara.

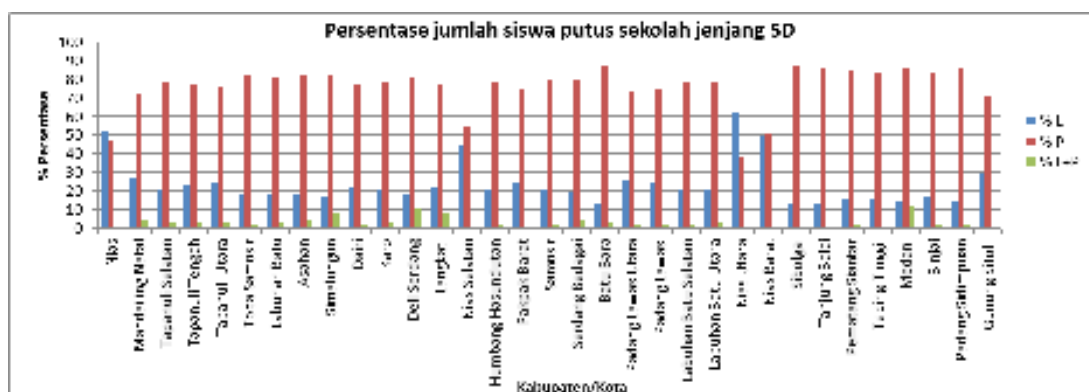
Tabel 4.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	SD						SLTP						SLTA					
		L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P
1	Nias	201	52.48	182	47.52	383	0.74	50	61.73	31	38.27	81	0.37	20	45.45	24	54.55	44	0.37
2	Mandailing Natal	642	27.28	1711	72.72	2353	4.53	227	32.99	461	67.01	688	3.15	112	36.25	197	63.75	309	2.59
3	Tapanuli Selatan	286	20.92	1081	79.08	1367	2.63	150	28.85	370	71.15	520	2.38	69	36.7	119	63.3	188	1.58
4	Tapanuli Tengah	340	23.04	1136	76.96	1476	2.84	151	37.47	252	62.53	403	1.85	97	39.92	146	60.08	243	2.04
5	Tapanuli Utara	370	24.42	1145	75.58	1515	2.92	248	36.1	439	63.9	687	3.15	156	40.41	230	59.59	386	3.24
6	Toba Samosir	179	17.83	825	82.17	1004	1.93	177	32.07	375	67.93	552	2.53	105	37.5	175	62.5	280	2.35
7	Labuhan Batu	306	18.5	1348	81.5	1654	3.19	147	32.17	310	67.83	457	2.09	124	35.94	221	64.06	345	2.89
8	Asahan	426	17.82	1964	82.18	2390	4.6	278	33.94	541	66.06	819	3.75	163	36.38	285	63.62	448	3.76
9	Simalungun	724	17.23	3479	82.77	4203	8.1	568	34.07	1099	65.93	1667	7.64	280	39.83	423	60.17	703	5.89
10	Dairi	273	22.27	953	77.73	1226	2.36	210	34.94	391	65.06	601	2.75	123	41.84	171	58.16	294	2.46
11	Karo	346	20.87	1312	79.13	1658	3.19	297	33.94	578	66.06	875	4.01	198	42.13	272	57.87	470	3.94
12	Deli Serdang	1052	18.31	4693	81.69	5745	11.1	783	31.62	1693	68.38	2476	11.3	406	38.3	654	61.7	1060	8.89
13	Langkat	919	22.24	3214	77.76	4133	7.96	591	39.74	896	60.26	1487	6.81	264	42.31	360	57.69	624	5.23
14	Nias Selatan	145	44.89	178	55.11	323	0.62	82	56.16	64	43.84	146	0.67	54	57.45	40	42.55	94	0.79
15	Humbang Hasundutan	211	21.33	778	78.67	989	1.9	179	37.37	300	62.63	479	2.19	101	42.26	138	57.74	239	2
16	Pakpak Barat	61	24.6	187	75.4	248	0.48	42	28.19	107	71.81	149	0.68	28	35.9	50	64.1	78	0.65
17	Samosir	159	20.65	611	79.35	770	1.48	121	38.54	193	61.46	314	1.44	56	36.6	97	63.4	153	1.28

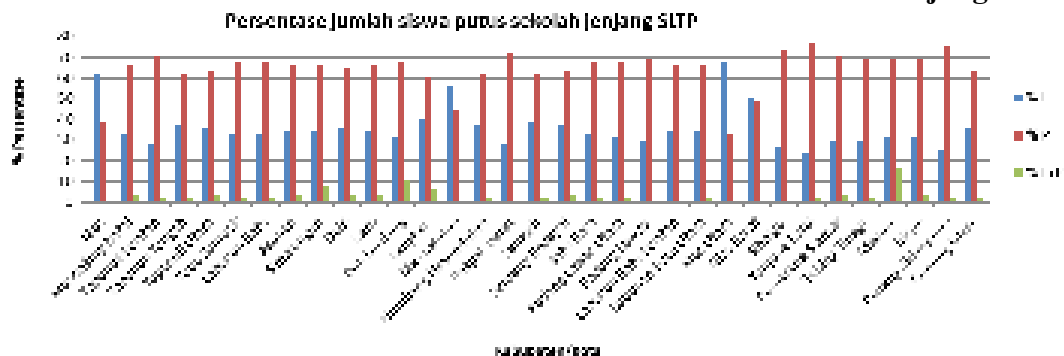
18	Serdang Bedagai	461	19.83	1864	80.17	2325	4.48	301	36.48	524	63.52	825	3.78	149	35.73	268	64.27	417	3.5
19	Batu Bara	188	13.17	1240	86.83	1428	2.75	182	32.5	378	67.5	560	2.57	74	30.58	168	69.42	242	2.03
20	Padang Lawas Utara	244	26.32	683	73.68	927	1.79	81	31.4	177	68.6	258	1.18	44	31.43	96	68.57	140	1.17
21	Padang Lawas	241	24.9	727	75.1	968	1.86	71	30.21	164	69.79	235	1.08	40	32.26	84	67.74	124	1.04
22	Labuhan Batu Selatan	194	21.3	717	78.7	911	1.75	64	34.22	123	65.78	187	0.86	47	35.61	85	64.39	132	1.11
23	Labuhan Batu Utara	306	20.99	1152	79.01	1458	2.81	116	33.53	230	66.47	346	1.59	79	38.54	126	61.46	205	1.72
24	Nias Utara	276	62.02	169	37.98	445	0.86	72	67.92	34	32.08	106	0.49	16	44.44	20	55.56	36	0.3
25	Nias Barat	166	49.11	172	50.89	338	0.65	60	50.85	58	49.15	118	0.54	34	54.84	28	45.16	62	0.52
26	Sibolga	53	12.65	366	87.35	419	0.81	52	26.53	144	73.47	196	0.9	47	32.64	97	67.36	144	1.21
27	Tanjung Balai	74	13.63	469	86.37	543	1.05	68	24.03	215	75.97	283	1.3	58	33.53	115	66.47	173	1.45
28	Pematang Siantar	173	15.54	940	84.46	1113	2.14	254	29.06	620	70.94	874	4	251	38.5	401	61.5	652	5.47
29	Tebing Tinggi	108	16.19	559	83.81	667	1.28	122	29.9	286	70.1	408	1.87	100	36.9	171	63.1	271	2.27
30	Medan	854	13.94	5271	86.06	6125	11.8	106 7	30.78	2400	69.22	3467	15.9	807	34.58	1527	65.42	2334	19.6
31	Binjai	196	16.74	975	83.26	1171	2.26	220	30.51	501	69.49	721	3.3	185	36.93	316	63.07	501	4.2
32	Padang Sidempuan	139	14.29	834	85.71	973	1.87	133	24.72	405	75.28	538	2.47	115	28.75	285	71.25	400	3.35
33	Gunung Sitoli	196	29.21	475	70.79	671	1.29	108	36	192	64	300	1.37	49	35.51	89	64.49	138	1.16
PROVSU		10509	20.24	41410	79.76	51919	100	727 2	33.32	14551	66.68	21823	100	4451	37.31	7478	62.69	####	100

Sumber data : BPS

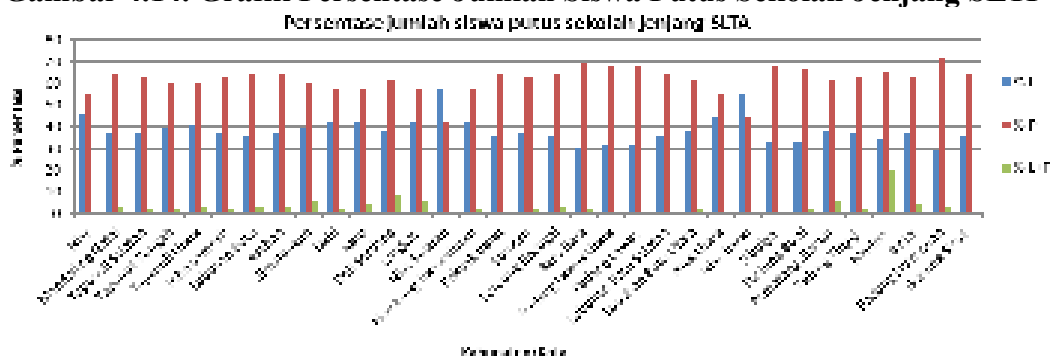
Berdasarkan tabel 4.5 jumlah siswa putus sekolah SD tertinggi 1052 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Deli Serdang dan terendah 53 adalah Sibolga. Jumlah siswa putus sekolah SD tertinggi 5271 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 169 adalah Nias Utara. Jumlah siswa putus sekolah SLTP tertinggi 1067 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Medan dan terendah 42 adalah Pakpak Barat. Jumlah siswa putus sekolah SLTP tertinggi 2400 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 31 adalah Nias. Jumlah siswa putus sekolah SLTA tertinggi 807 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Medan dan terendah 16 adalah Nias Utara. Jumlah siswa putus sekolah SLTA tertinggi 1527 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 20 adalah Nias Utara.



Gambar 4.13. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SD



Gambar 4.14. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTP



Gambar 4.15. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTA

4.6 Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin dan Kaupaten/Kota di Provsu Tahun 2016.

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA dan Akademi atau Perguruan Tinggi berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

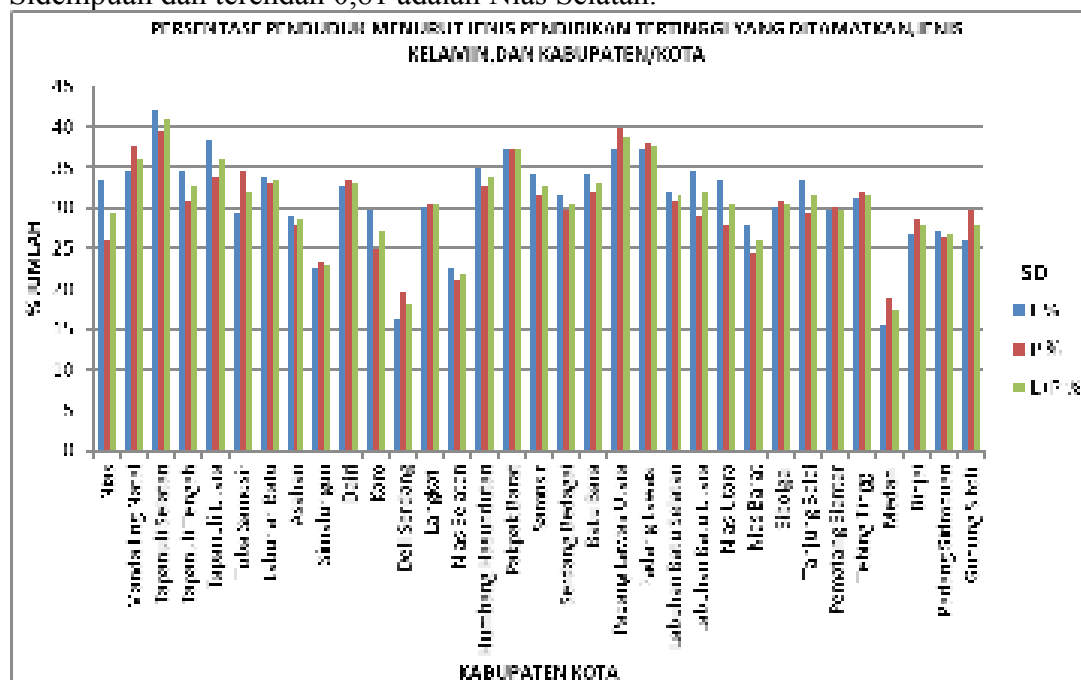
Tabel 4.6 Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA			Akademi/PT		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Nias	33.37	25.77	29.47	11.39	7.65	9.47	13.43	9.16	11.24	2.29	2.55	2.42
2	Mandailing Natal	34.61	37.67	36.18	18.03	12.85	15.36	18.06	20.30	19.21	3.75	4.98	4.38
3	Tapanuli Selatan	42.08	39.49	40.77	13.70	9.82	11.74	18.07	20.50	19.30	2.13	3.12	2.63
4	Tapanuli Tengah	34.64	30.86	32.74	15.22	15.00	15.11	15.20	16.84	16.02	3.99	3.77	3.88
5	Tapanuli Utara	38.39	33.98	36.14	13.86	10.82	12.30	21.89	19.83	20.83	4.52	5.23	4.89
6	Toba Samosir	29.24	34.60	31.96	16.58	8.35	12.41	22.08	23.44	22.77	5.44	3.93	4.67
7	Labuhan Batu	33.83	33.24	33.54	17.82	17.59	17.70	22.01	22.59	22.30	4.20	4.14	4.17
8	Asahan	28.87	27.93	28.40	21.64	17.10	19.37	21.04	20.92	20.98	2.82	4.12	3.47
9	Simalungun	22.68	23.50	23.09	22.98	22.58	22.78	27.65	23.68	25.65	2.36	2.97	2.67
10	Dairi	32.81	33.58	33.20	16.77	14.14	15.44	21.63	23.49	22.57	2.78	2.72	2.75
11	Karo	29.88	24.65	27.23	17.01	20.41	18.73	24.41	24.79	24.60	4.36	6.48	5.43
12	Deli Serdang	16.38	19.53	17.95	18.66	23.71	21.18	39.68	33.61	36.65	5.38	4.77	5.08
13	Langkat	30.14	30.63	30.39	21.47	20.79	21.13	20.45	20.46	20.45	3.21	3.93	3.57
14	Nias Selatan	22.42	21.08	21.75	9.60	8.87	9.24	12.09	10.83	11.47	2.64	0.81	1.74
15	Humbang	35.11	32.57	33.82	16.99	11.77	14.34	20.12	19.89	20.00	2.87	5.54	4.22
16	Pakpak Barat	37.10	37.29	37.19	13.02	9.45	11.25	17.87	17.53	17.70	4.56	4.14	4.35
17	Samosir	34.08	31.70	32.87	9.89	9.70	9.79	27.20	18.83	22.96	5.09	6.02	5.56
18	Serdang Bedagai	31.62	29.60	30.61	19.97	20.96	20.47	22.06	18.31	20.18	2.28	3.38	2.83
19	Batu Bara	34.18	31.83	33.00	15.06	13.76	14.41	18.73	18.66	18.70	2.54	3.41	2.98
20	Padang Lawas	37.29	39.80	38.56	12.15	10.48	11.31	26.09	23.08	24.57	3.05	4.45	3.76
21	Padang Lawas	37.04	38.10	37.56	19.42	14.65	17.06	19.19	18.20	18.70	3.95	3.44	3.70
22	Labuhan Batu	32.01	30.77	31.41	17.01	16.94	16.98	23.55	21.39	22.49	2.70	5.88	4.26
23	Labuhan Batu Utara	34.62	28.94	31.80	19.99	19.61	19.80	22.17	20.24	21.22	2.61	3.61	3.11
24	Nias Utara	33.45	27.96	30.63	12.07	13.32	12.71	14.84	10.58	12.65	4.09	2.21	3.12
25	Nias Barat	27.70	24.56	26.03	14.81	12.23	13.44	16.08	9.78	12.73	4.23	3.15	3.66
26	Sibolga	30.01	30.71	30.36	15.36	11.82	13.58	26.46	24.30	25.37	4.71	6.77	5.74
27	Tanjung Balai	33.47	29.29	31.39	11.24	11.47	11.35	20.94	23.31	22.12	5.41	5.63	5.52
28	Pematang Siantar	29.52	30.19	29.87	13.00	11.48	12.21	31.40	32.55	31.99	7.04	5.89	6.45
29	Tebing Tinggi	31.37	31.96	31.67	13.54	11.16	12.32	28.71	30.89	29.82	5.88	6.42	6.16

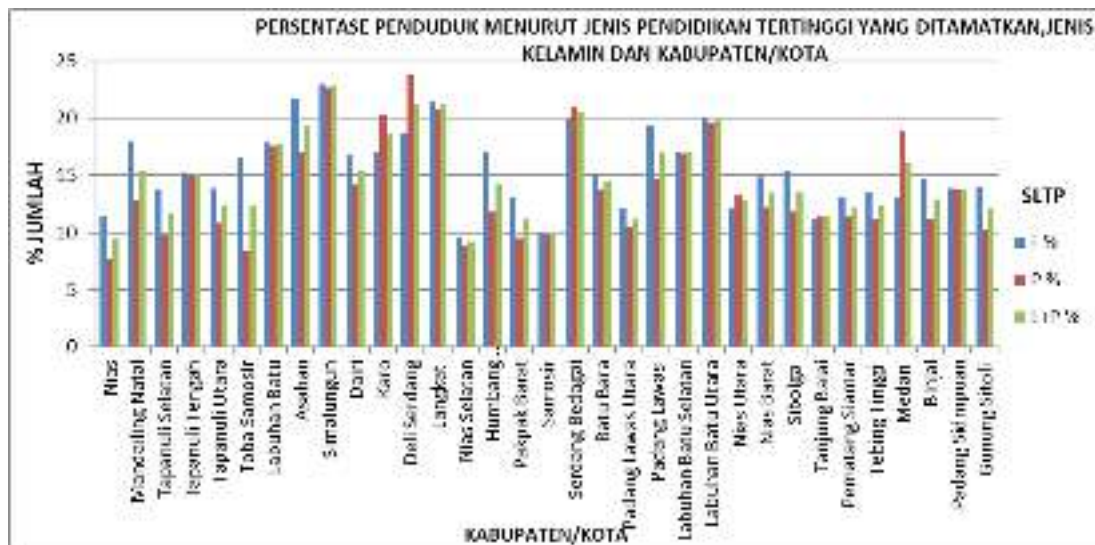
30	Medan	15.60	18.67	17.17	13.11	18.89	16.05	45.00	38.60	41.74	9.10	8.07	8.58
31	Binjai	26.67	28.60	27.64	14.71	11.19	12.93	30.95	32.55	31.76	8.77	8.28	8.52
32	Padang Sidmpuan	27.06	26.49	26.76	13.87	13.66	13.77	29.40	27.15	28.24	9.63	10.58	10.12
33	Gunung Sitoli	25.91	29.76	27.90	14.03	10.26	12.08	18.53	13.53	15.95	8.36	5.6	7.12
	SUMATERA	26.44	26.77	26.60	16.87	17.44	17.16	28.37	25.88	27.12	4.87	5.04	4.95
	- Perkotaan	21.63	23.39	22.52	15.40	17.37	16.40	35.69	32.23	33.94	7.02	6.87	6.94
	- Perdesaan	31.44	30.34	30.89	18.41	17.51	17.96	20.76	19.14	19.95	2.63	3.10	2.86

Sumber data: BPS

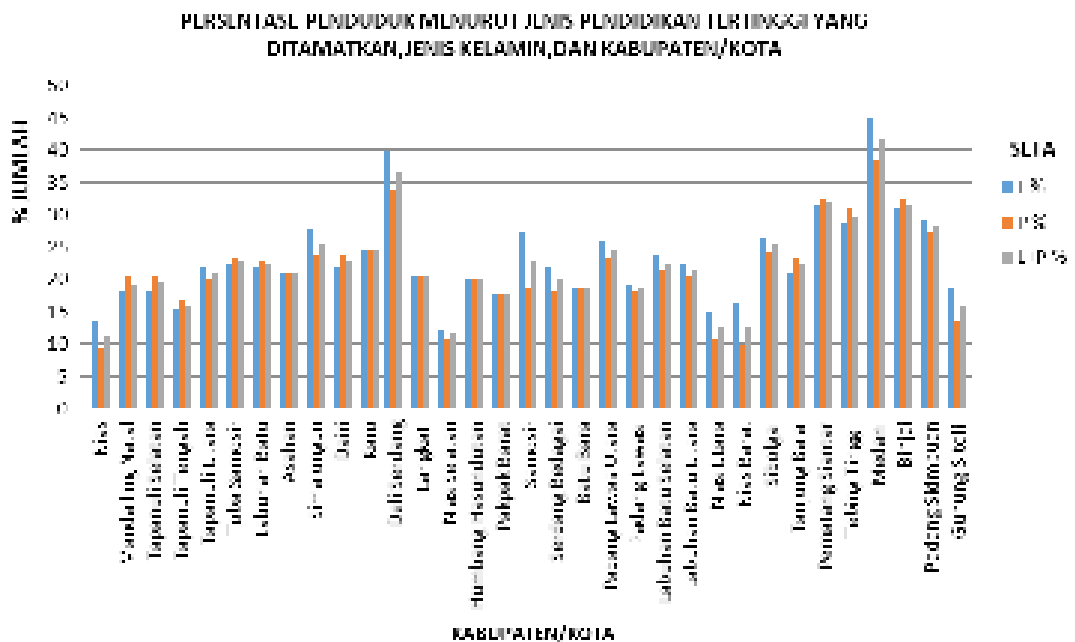
Berdasarkan tabel 4.6. persentase penduduk yang tamat SD tertinggi 42,08 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Tapanuli Selatan dan terendah 15,60 adalah Medan. persentase penduduk yang tamat SD tertinggi 39,49 untuk jenis kelamin perempuan adalah Tapanuli Selatan dan terendah 18,67 adalah Medan. persentase penduduk yang tamat SLTP tertinggi 22,98 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Simalungun dan terendah 9,60 adalah Nias Selatan. Persentase penduduk yang tamat SLTP tertinggi 23,71 untuk jenis kelamin perempuan adalah Deli Serdang dan terendah 7,65 adalah Nias. Persentase penduduk yang tamat SLTA tertinggi 45,00 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Medan dan terendah 12,08 adalah Kota Gunung Sitoli . Persentase penduduk yang tamat SLTA tertinggi 38,60 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 9,16 adalah Nias. Persentase penduduk yang lulus tahap akademik tertinggi 9,63 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Padang Sidempuan dan terendah 2,13 adalah Tapanuli Selatan. Persentase penduduk yang lulus tahap Akademik tertinggi 10,58 untuk jenis kelamin perempuan adalah Padang Sidempuan dan terendah 0,81 adalah Nias Selatan.



Gambar 4.16. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SD) yang Ditamatkan, Jenis Kelamin di Kabutapen/Kota



Gambar 4.17 Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTP) yang Ditamatkan, Jenis Kelamin di Kabutapen/Kota



Gambar 4.18. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTA) yang di tamatkan, Jenis Kelamin di Kabutapen/Kota

4.7 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.7. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	JenisKelamin		L+P
		Laki-	Perempuan	
1	Nias	7.15	5.46	6.26
2	Mandailing Natal	8.6	8.56	8.58
3	Tapanuli Selatan	8.37	8.26	8.31
4	Tapanuli Tengah	8.32	8.15	8.23
5	Tapanuli Utara	9.12	8.66	8.89
6	Toba Samosir	9.7	8.98	9.35
7	Labuhan Batu	9.04	9	9.02
8	Asahan	8.83	8.44	8.64
9	Simalungun	9.53	8.98	9.25
10	Dairi	8.85	8.66	8.76
11	Karo	9.22	9.41	9.32
12	Deli Serdang	10.75	10.24	10.49
13	Langkat	8.98	8.69	8.83
14	Nias Selatan	5.96	4.99	5.47
15	Humbang Hasundutan	9.09	8.54	8.8
16	Pakpak Barat	8.73	8.44	8.59
17	Samosir	9.3	8.4	8.84
18	Serdang Bedagai	9.2	8.37	8.69
19	Batu Bara	8.25	7.89	8.07
20	Padang Lawas Utara	9.1	8.85	8.93
21	Padang Lawas	8.88	8.28	8.58
22	Labuhan Batu Selatan	8.89	8.89	8.89
23	Labuhan Batu Utara	8.76	8.59	8.72
24	Nias Utara	7.89	6.45	7.13
25	Nias Barat	7.86	6.15	6.94
26	Sibolga	9.6	9.55	9.57
27	Tanjung Balai	9.07	9.13	9.1
28	Pematang Siantar	10.23	10.06	10.14
29	Tebing Tinggi	9.68	9.71	9.69
30	Medan	11.57	11.01	11.28
31	Binjai	10.48	10.29	10.38
32	Padang Sidmpuan	10.57	10.59	10.58
33	Gunung Sitoli	9.43	7.92	8.65
PROVSU		9.67	9.25	9.46

Sumber data : BPS

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kota Medan sebanyak 11.57 laki-laki dan 11.01 perempuan.



4.8 Jumlah Guru Negeri / Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kinerja dan kompetensi guru memikul tanggung jawab utama dalam transformasi orientasi peserta didik dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, dengan metode-metode pembelajaran bukan lagi mempersiapkan peserta didik yang pasif, melainkan peserta didik berpengetahuan yang senantiasa mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru dengan berfikir, bertanya, menggali, mencipta dan mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya.

Dalam kurun waktu 10 tahun proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) telah mencapai angka signifikan. Di Indonesia, Sejak 2007 hingga 2017, total guru yang sudah tersertifikasi mencapai 1.471.812 orang. Sedangkan, guru yang belum tersertifikasi sekitar 656.150 orang. Melalui kerjasama dengan sekitar 46 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) diharapkan para guru tersebut dapat dituntaskan proses sertifikasinya. Adapun jumlah guru di Provinsi Sumatera Utara yang sudah disertifikasi sebagai berikut:

Tabel. 4.8. Jumlah Guru Negeri/Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	Guru SD						Guru SLTP						Guru SLTA						L+P Total
		L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P	
1	Kabupaten Asahan	426	17.82	1964	82.18	2390	4.60	278	33.94	541	66.06	819	3.75	163	36.38	285	63.62	448	3.75	3657
2	Kabupaten Batubara	188	13.17	1240	86.83	1428	2.75	182	32.5	378	67.5	560	2.56	73	30.29	168	69.71	241	2.02	2229
3	Kabupaten Dairi	273	22.27	953	77.73	1226	2.36	210	34.94	391	65.06	601	2.75	123	41.84	171	58.16	294	2.46	2121
4	Kabupaten Deli Serdang	1052	18.31	4693	81.69	5745	11.06	783	31.62	1693	68.38	2476	11.34	406	38.3	654	61.7	1060	8.88	9281
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	211	21.33	778	78.67	989	1.90	179	37.37	300	62.63	479	2.19	101	42.26	138	57.74	239	2.00	1707
6	Kabupaten Karo	346	20.87	1312	79.13	1658	3.19	297	33.94	578	66.06	875	4.00	198	42.13	272	57.87	470	3.94	3003
7	Kabupaten Labuhan Batu	306	18.5	1348	81.5	1654	3.18	147	32.17	310	67.83	457	2.09	124	35.94	221	64.06	345	2.89	2456

8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	198	21.64	717	78.36	915	1.76	64	34.22	123	65.78	187	0.85	47	35.61	85	64.39	132	1.10	1234
9	Kabupaten Labuhan Batu	306	20.99	1152	79.01	1458	2.80	116	33.53	230	66.47	346	1.58	79	38.54	126	61.46	205	1.71	2009

	Utara																			
10	Kabupaten Langkat	919	22.24	3214	77.76	4133	7.96	591	39.74	896	60.26	1487	6.81	264	42.31	360	57.69	624	5.23	6244
11	Kabupaten Mandailing Natal	642	27.28	1711	72.72	2353	4.53	227	32.99	461	67.01	688	3.15	112	36.25	197	63.75	309	2.59	3350
12	Kabupaten Nias	201	52.48	182	47.52	383	0.73	50	61.73	31	38.27	81	0.37	20	45.45	24	54.55	44	0.36	508
13	Kabupaten Nias Barat	166	49.11	172	50.89	338	0.65	60	50.85	58	49.15	118	0.54	34	54.84	28	45.16	62	0.51	518
14	Kabupaten Nias Selatan	145	44.89	178	55.11	323	0.62	82	56.16	64	43.84	146	0.66	54	57.45	40	42.55	94	0.78	563
15	Kabupaten Nias Utara	276	62.02	169	37.98	445	0.85	72	67.92	34	32.08	106	0.48	16	44.44	20	55.56	36	0.30	587
16	Kabupaten Padang Lawas	241	24.9	727	75.1	968	1.86	71	30.21	164	69.79	235	1.07	40	32.26	84	67.74	124	1.03	1327
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	244	26.32	683	73.68	927	1.78	81	31.4	177	68.6	258	1.18	44	31.43	96	68.57	140	1.17	1325
18	Kabupaten Pakpak Barat	61	24.6	187	75.4	248	0.47	42	28.19	107	71.81	149	0.68	28	35.9	50	64.1	78	0.65	475
19	Kabupaten Samosir	159	20.65	611	79.35	770	1.48	121	38.54	93	29.62	314	1.43	56	36.6	97	63.4	153	1.28	1237
20	Kabupaten Serdang Bedagai	461	19.83	1864	80.17	2325	4.47	301	36.48	524	63.52	825	3.78	149	35.73	268	64.27	417	3.49	3567
21	Kabupaten Simalungun	724	17.23	3479	82.77	4203	8.09	568	34.07	1099	65.93	1667	7.63	280	39.83	423	60.17	703	5.89	6573

22	Kabupaten Tapanuli Selatan	286	20.92	1081	79.08	1367	2.63	150	28.85	370	71.15	520	2.38	69	36.7	119	63.3	188	1.57	2075
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	340	23.04	1136	76.96	1476	2.84	151	37.47	252	62.53	403	1.84	97	6.21	1465	93.79	1562	13.09	3441
24	Kabupaten Tapanuli Utara	370	24.42	1145	75.58	1515	2.91	248	36.1	439	63.9	687	3.14	156	40.41	230	59.59	386	3.23	2588
25	Kabupaten Toba Samosir	179	17.83	825	82.17	1004	1.93	177	32.07	375	67.93	552	2.52	105	37.5	175	62.5	280	2.34	1836
26	Kota Binjai	196	16.74	975	83.26	1171	2.25	220	30.51	501	69.49	721	3.30	185	36.93	316	63.07	501	4.19	2393
27	Kota Gunung Sitoli	196	29.21	475	70.79	671	1.29	108	36	192	64	300	1.37	49	35.51	89	64.49	138	1.15	1109

28	Kota Medan	854	13.94	5271	86.06	6125	11.79	1067	30.78	2400	69.22	3467	15.88	807	34.58	1527	65.42	2334	19.56	11926
29	Kota Padang Sidempuan	139	14.29	834	85.71	973	1.87	133	24.72	405	75.28	538	2.46	115	28.75	285	71.25	400	3.35	1911
30	Kota Pematang Siantar	173	15.54	940	84.46	1113	2.14	254	29.06	620	70.94	874	4.00	251	38.5	401	61.5	652	5.46	2639
31	Kota Sibolga	53	12.65	366	87.35	419	0.80	52	26.53	144	73.47	196	0.89	47	32.64	97	67.36	144	1.20	759
32	Kota Tanjung Balai	74	13.63	469	86.37	543	1.04	68	24.03	215	75.97	283	1.29	58	33.53	115	66.47	173	1.45	999
33	Kota Tebing Tinggi	108	64.67	59	35.33	167	0.32	122	29.9	286	70.1	408	1.86	100	36.9	171	63.1	271	2.27	846
PROVSU		10509	20.24	41410	79.76	51919	100	7272	33.32	14551	66.68	21823	100	4451	37.31	7478	62.69	11929	100	85671

Sumber data : Dinas Pendidikan

Jumlah guru SD yang paling banyak memiliki sertifikasi adalah di kota Medan 11.79 %. Adapun jumlah guru perempuan di kota Medan yang bersertifikasi 86.06 % dibandingkan guru laki-laki hanya 13.94%. Adapun untuk guru SMP yang bersertifikasi paling banyak di Sumatera Utara adalah di kota Tanjung Balai 75.97% untuk guru perempuan. Sedangkan guru SLTA bersertifikasi paling banyak adalah guru perempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 91%.



Gambar 4.20. Grafik Jumlah Guru SD Yang Bersertifikasi



Gambar 4.21. Grafik Jumlah Guru SLTP Yang Bersertifikasi



Gambar 4.22. Grafik Jumlah Guru SLTA Yang Bersertifikasi

4.9. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, dan C Serta Keaksaraan Fungsional (KF) Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Usaha untuk peningkatan mutu SDM melalui jalur pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah) dapat ditempuh lewat pendidikan kesetaraan yang meliputi Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C. Kejar Paket A, B dan C ini diperlukan sebagai solusi bagi anak putus sekolah yang tidak dapat menamatkan sekolahnya baik ditingkat SD, SMP dan SMA. Peserta kejar Paket A dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SD, peserta Kejar Paket B dapat mengikuti Ujian Kesetaraan tingkat SLTP dan peserta Kejar Paket C dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SMU/SMK/MA. Ujian kesetaraan diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober.

Beragam persoalan selalu mengikuti proses penyempurnaan pembangunan di bidang pendidikan Indonesia. Baik di bidang pendidikan formal, non formal maupun informal. Semua bidang memiliki kendala sendiri-sendiri. Pada jalur non formal (program pendidikan kesetaraan khususnya kejar paket A,B dan C) misalnya, hingga kini masih banyak hambatan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena orang yang seharusnya mengikuti program pendidikan ini mayoritas berusia di atas 44 tahun, sehingga rata-rata mereka beranggapan, tak ada gunanya melanjutkan ke kesetaraan. Penyebab lainnya karena adanya perasaan malu di kalangan warga belajar sendiri karena program paket A ini untuk kesetaraan sekolah dasar.

Meski menyadari adanya hambatan, namun pemerintah tetap menjalankan

program ini. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk mengakses pendidikan.

NO	KAB/KOTA	Paket A		Paket B		Paket C		KF	
		L	P L+P	L	L+P	L		L	L+P
	Nias		-		205		111		
	Mandailing Natal		-		176		445		
	Tapanuli Selatan		-		132		189		
	Tapanuli Tengah		-		147		334		
	Tapanuli Utara		-		191		167		
6	Toba Samosir		-		103		-		
7	Labuhan Batu		100		147		334		
8	Asahan		-		249		250		
9	Simalungun		100		425		201		
10	Dairi		-		191		133		
11	Karo		-		103		172		
12	Deli Serdang		100		147		1,335		
13	Langkat		100		249		667		
14	Nias Selatan		100		616		-		
15	Humbang		-		147		-		
16	Pakpak Barat		-		616		-		
17	Samosir		-		147		50		
18	Serdang Bedagai		60		205		417		
19	Batu Bara		100		278		111		
20	Padang Lawas Utara		100		59		67		
21	Padang Lawas		-		176		79		
22	Labuhan Batu		100		73		211		
23	Labuhan Batu Utara		-		117		-		
24	Nias Utara		-		117		44		
25	Nias Barat		-		29		111		
26	Sibolga		-		29		389		
27	Tanjung Balai		-		161		89		
28	Pematang Siantar		-		59		-		
29	Tebing Tinggi		-		103		167		
30	Medan		100		748		1,524		
31	Binjai		-		132		139		
32	Padang Sidempuan		-		147		389		
33	Gunung Sitoli		-		147		89		
	PROVSU		960		6,907		8,214		

Tabel 4.9 Jumlah Peserta Kejar Paket A,B,Dan C Serta Keaksaraan Fungsional (KF) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.9 peserta kejar paket A, B dan C yang paling tinggi adalah di Kota Medan 100 orang untuk paket A jenjang pendidikan di SD, dan 748 orang untuk paket B jenjang pendidikan SMP dan paket C 1.524 orang untuk jenjang pendidikan SMU dan sederajat lainnya.

4.10. Jumlah Kelulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.10. Jumlah Kelulusan Paket A,B, dan C menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Nias			-			323			43
2	Mandailing Natal			-			217			191
3	Tapanuli Selatan			-			80			74
4	Tapanuli Tengah			-			61			134
5	Tapanuli Utara			-			57			70
6	Toba Samosir			-			45			-
7	Labuhan Batu			34			69			-
8	Asahan			-			102			124
9	Simalungun			30			164			74
10	Dairi			-			83			57
11	Karo			-			67			71
12	Deli Serdang			30			323			501
13	Langkat			29			217			254
14	Nias Selatan			28			224			-
15	Humbang			-			61			-
16	Pakpak Barat			-			12			-
17	Samosir			-			43			20
18	Serdang Bedagai			18			81			157
19	Batu Bara			29			111			37
20	Padang Lawas Utara			32			26			28
21	Padang Lawas			-			84			36
22	Labuhan Batu Selatan			34			53			90
23	Labuhan Batu Utara			-			35			-
24	Nias Utara			-			50			44
25	Nias Barat			-			11			16
26	Sibolga			-			12			-
27	Tanjung Balai			-			27			37

28	Pematang Siantar			-			61			143
29	Tebing Tinggi			-			41			66

30	Medan			30			283			558
31	Binjai			-			48			50
32	Padang Sidempuan			-			66			161
33	Gunung Sitoli			-			60			35
	PROVSU			294			2.817			3.178

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.10 jumlah kelulusan peserta paket A di Sumatera Utara paling tinggi adalah di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebanyak 34 orang, sedangkan lulus paket B tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Nias dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 323 orang serta lulus paket C tertinggi adalah di Kota Medan sebanyak 558 orang.

BAB V

BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN LINGKUNGAN

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Kebijakan dan capaian bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.

5.1 Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara

Gerakan sosial mengemban secara bersama-sama memiliki visi sebagai segenap modal sosial bangsa, menjadikan Indonesia dan khususnya Sumatera Utara yang bersih, asri dan indah, dilengkapi dengan misinya mencakup menggerakkan segenap komponen bangsa menuju Indonesia dan Sumut yang Bersih, Asri serta Indah.

Tujuannya adalah memotivasi dan memberikan dorongan Kepada masyarakat agar semakin peduli dalam menyehatkan lingkungannya, melalui berbagai upaya bersama dan tindakan nyata dengan sasaran lokasinya mencakup seluruh fasilitas publik, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana instansi milik Pemerintah, sarana infrastruktur, sarana milik swasta dan masyarakat yang harus bersih, dengan lingkungan yang bersih tanpa sampah dan kotoran; harus asri dengan alam hijau yang teduh dan lestari; harus indah dengan ruang publik yang terpelihara, harus sehat di Indonesia dan khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 5.1. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli	Ardyan Dwi Pradipta, SH	Jl. Palang Merah Gg. Jembatan (Belakang Hotel Danau Toba)
2	Korps Mahasiswa Pecinta Alam dan Studi Lingkungan	Ir. Hamzah Lubis, SH. Ms.i	Jln. Alumni No. 2 Teladan Bar Medan
3	Yayasan Kelestarian Alam Dan Lingkungan Hidup	Ir. Hamzah Lubis, SH.Ms.i	Jln. Saudara No, 5 Simpang Limun Sudirejo
4	Walhi Sumut	Dana Tarigan	Jln. Air Bersih No. 79 Medan

5	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (Dekorda GMPLH)	Drs. J. Franciskus Sagala	Jln. Bunga Wijaya Kusuma No. 28 Medan
6	Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan Hidup	Poltak Simanjuntak	Jln. Muni No. 14 Medan Tj. Rejo
7	Ikatan Penulis Peddi Lingkungan Indonesia	Indra Buana Tanjung, ST	Jln. Nibung Baru No. 46 Medan
8	Yayasan Kelestarian Alam Dan Linkungan Hidup	Hotma Erita P.	Jln. Saudara No, 5 Simpang Limun
9	Yayasan Masyarakat Pemerhati Lingkungan	Ir. Andrew JMS	Jln. T. Amir Hamzah No. B,204 (Riatur Indah)
10	Lembaga Pemberdayaan Pemuda Lingkungan Siap Siaga	Endrianto	Jl. Setia Indah No. 14 Sunggal Kanan – Deli Serdang
11	Lembaga Pemuda Sadar Lingkungan	Irhamasyah Matondang	Jl. Setia Budi Gg. Melati No. 21 Pasar 1 Tanjung Sari Medan
12	Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan Sumatera Utara (LSPL)	Ir. Poltak Simanjuntak	Jl. Sembada VIII No. 13 Medan
13	Pemerhati Masyarakat Dan Lingkungan (PERMADANI)	Togi H.P Naibaho	Jl. William Iskandar No. 23 Lingkungan XVIII Medan
14	Pergerakan Anti Narkotika Tawuran HIV/Aids Dan Kerusakan Lingkungan Rakyat	Muhammad Alamsyah	Jl. Jendral Ahmad Yani Gg. Balai Kel. Kartini Kec. Binjai Kota
15	Forum Peduli Masalah Kesehatan Lingkungan (FPMKM)	Toga Nainggolan	Jl. Karya Kasih 1 No. 14 C Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Medan
16	Forum Komunikasi Peduli Lingkungan	Nuraiddi	Jl. Besar Tanjung Selamat No. 44 Tanjung Selamat, Sunggal
17	Forum Peduli Masalah Kesehatan Lingkungan	Toga Nainggolan	Jl. Karya Kasih 1 No. 14 C Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Medan
18	Lembaga Komunitas Sehat Lingkungan (Konsel Sumatera Utara)	Supriadi	Jl. Karya Bersama No. 13 Medan
19	Lembaga Penghijauan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaga P2LH)	Roni Situmorang, S.Pd	Jl. Ayahanda Ruko B – 1, Medan
20	Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup	Arifin Siregar, SH	Jl. A.R. Hakim Gg. Sukmawati No. 32 Medan
21	Lembaga Pemuda Pemerhati Lingkungan Hidup Sumatera Utara (LPPLH-SU)	Arman S. Siregar	Jl. Pimpinan No. 92 Kel. Sei Kera Hilir I Medan
22	Lembaga Pemerhati Peduli	Lies Ambarsari	Jl. Sei Besitang Terusan

	Kesehatan Dan Lingkungan Hidup (LSM LP2KLH) Sumatera Utara	Triwahyuni	No. 70 A Medan
23	Forum Pemuda Sadar Lingkungan	Rini Syahfrza	JL.Pancing 1 No. 41 Link 1 Kel. Indra kasih Kec. Medan Tembung
24	Kesatuan Pemuda Peduli Lingkungan (KEPPAL) Sumatera Utara	Suheri Nasution	JL.Pelita IV No. 136 A Medan
25	Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Nasional (FORMALIDIKNAS) Sumatera Utara	Zulkarnain Nasution, Amd	JL.Bridjen Katamso No. 438 Medan
26	Lembaga Penghijauan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaga P2LH)	Roni Situmorang ,S	JL.Ayahanda Ruko B-1 Medan
27	Lembaga Masyarakat Adat Peduli Lingkungan Sumatera Utara	T.Syarifuddin. SE, M.Si	Jln. Binjai km. 8,5 Link. Pajak Kel. Lalang Kec. Medan- Sunggal
28	Himpunan Masyarakat Peduli Air Dan Lingkungan Hidup (HIMPALHI)	H. Asry Sjam, SK, SE	Jln. T. Amir Hamzah No. 18 Link. IX Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat
29	Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH)	Ari Perdana Lubis	Jln. Tuasan No. 74 C Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan - Tembung
30	Generasi Muda Peduli Lingkungan (GMPL)	Ali Sanusi Rambe	Jln. Karya Darma Gg. Seroja No. 16 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan - Johor
31	Lembaga Pemerhati Lingkungan Pinggiran Sungai (LPLPS)	Mhd. Soleh Lubis, SH	Jln. Lintas Pinarik Desa Hatonggang Kec. Batang Lubus Sutam Kab. Padang Lawas
32	Jaringan Masyarakat Peduli Lingkungan Sumatera Utara (JMPL SUMUT)	Nasaruddin	Jln. Jermal VII No. 44 Link. V Kel. Denai Kec. Medan - Denai
33	Lembaga Peduli Lingkungan Masyarakat	Sukamto	Jln. Medan Batang Kuis Pasar IX Bandar Kelippa Kec. Percut Sei Tuan
34	LSM Anti Korupsi Pro Lingkungan Hidup Dan Hak Asasi Manusia Nusantara (LSM AKPROLIHAM)	Artinus Sihotang	Jln. Sei Bilah No. 100 Kel. Babura Kec. Medan - Sunggal
35	Lembaga Pemuda Penyelamat Lingkungan Sumatera Utara	Faisal Kurniawan	Jln. Pasar I Lorong I Baru Desa Sampali Kec. Percut - Sei Tuan Kab. Deli Serdang
36	Lembaga Konsorsium Masyarakat Peduli Lingkungan Dan Sanitasi Sumatera Utara	Sontang Nasution	Jln. Kol. Yos Sudarso Gg. Perwira No. 77 Link. VI Kel. Tanjung Mulia Medan

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup

5.2 Dampak Bencana Lingkungan Terhadap Gender Dan Anak di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 5.2 Dampak Bencana Lingkungan Terhadap Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Tahun 2016

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (Jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp)
	Kota			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Deli Serdang	NA	NA	NA
2	Kabupaten Langkat	NA	NA	NA
3	Kabupaten Karo	NA	NA	NA
4	Kabupaten Dairi	NA	NA	NA
5	Kabupaten Simalungun	NA	NA	NA
6	Kabupaten Asahan	NA	NA	NA
7	Kabupaten Tapanuli Selatan	Tanah Longsor	mengungsi : 300 orang	Rp 10,000,000,000
8	Kabupaten Tapanuli Utara	NA	NA	NA
9	Kabupaten Tapanuli Tengah	NA	NA	NA
10	Kabupaten Labuhan Batu	NA	NA	NA
11	Kabupaten Mandailing Natal	NA	NA	NA
12	Kabupaten Toba Samosir	NA	NA	NA
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	NA	NA	NA
14	Kabupaten Pakpak Bharat	NA	NA	NA
15	Kabupaten Samosir	Tanah Longsor	-	Rp 200,000,000
16	Kabupaten Serdang Bedagai	NA	NA	NA
17	Kabupaten Batubara	NA	NA	NA
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	NA	NA	NA
19	Kabupaten Padang Lawas	NA	NA	NA
20	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	NA	NA	NA
21	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Tanah Longsor	meninggal : 2 orang	Rp 40,000,000,000
22	Kabupaten Nias	NA	NA	NA
23	Kabupaten Nias Utara	NA	NA	NA
24	Kabupaten Nias Barat	NA	NA	NA
25	Kabupaten Nias Selatan	NA	NA	NA
26	Kota Sibolga	NA	NA	NA
27	Kota Tanjung Balai	NA	NA	NA
28	Kota Pematang Siantar	NA	NA	NA
29	Kota Tebing Tinggi	NA	NA	NA
30	Kota Medan	NA	NA	NA
31	Kota Binjai	NA	NA	NA
32	Kota Padang Sidempuan	Tanah Longsor	terluka : 2 orang	-
33	Kota Gunung Sitoli	NA	NA	NA

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup

BAB VI

KESEHATAN

Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga, menekankan pada pentingnya peran keluarga dalam pembangunan kesehatan. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi inti pembangunan kesehatan sebagaimana amanah Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009. Lingkungan keluarga memberikan dasar bagi seseorang untuk memiliki kebiasaan, perilaku dan gaya hidup yang sehat. Oleh karena itu perlu terus upaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat mulai dari lingkungan keluarga.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan pencapaian SDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta.

Tujuan Pembangunan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu:

1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.

2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
3. Peningkatan status gizi masyarakat.
4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).
5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera.

Kesehatan yang baik digambarkan saat tubuh manusia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pentingnya manusia menjaga pola hidup sehat dengan gizi dan berolahraga serta manajemen stress tentunya akan mempengaruhi angka harapan hidup dan problematika kesehatan ataupun berbagai macam penyakit khususnya problem kesehatan bagi para ibu yang hamil, nifas dan sebagainya perlu dideskripsikan melalui tabel berikut ini:

6.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

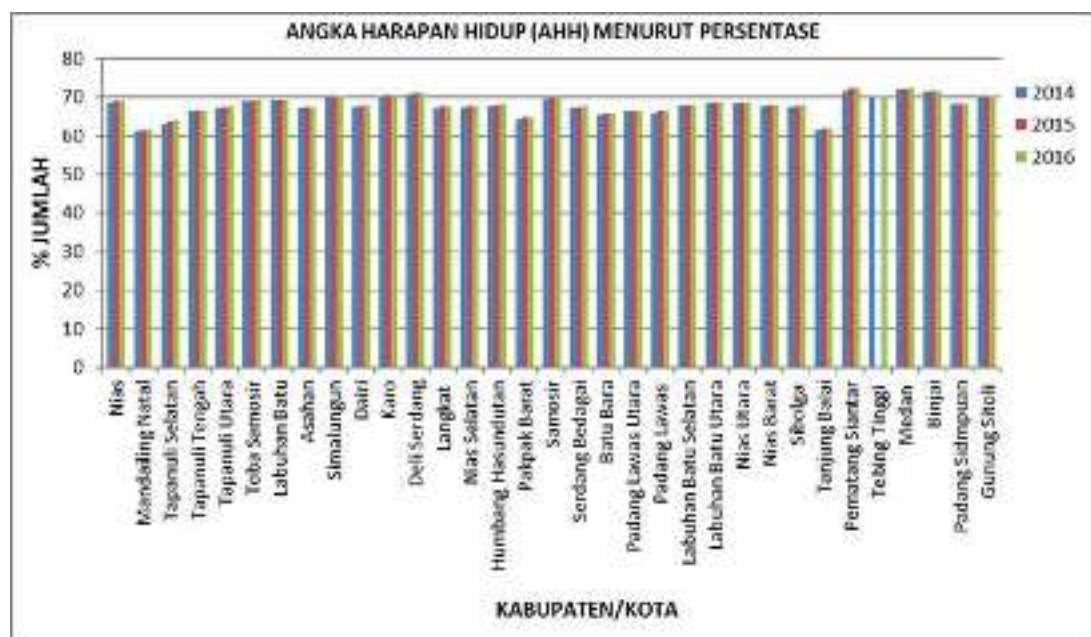
Tabel 6.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Persentase Tahun dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	% ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)		
		2014	2015	2016
1	Nias	68.87	68.97	69.07
2	Mandailing Natal	61.18	61.58	61.77
3	Tapanuli Selatan	63.14	63.74	64.01
4	Tapanuli Tengah	66.49	66.59	66.62
5	Tapanuli Utara	67.25	67.55	67.71
6	Toba Samosir	69.04	69.14	69.25
7	Labuhan Batu	69.26	69.36	69.4
8	Asahan	67.27	67.37	67.47
9	Simalungun	70.24	70.34	70.43
10	Dairi	67.48	67.78	67.95
11	Karo	70.42	70.62	70.69
12	Deli Serdang	70.8	71	71.06
13	Langkat	67.33	67.63	67.79
14	Nias Selatan	67.16	67.66	67.83
15	Humbang Hasundutan	67.8	68.1	68.26
16	Pakpak Barat	64.45	64.85	64.95
17	Samosir	69.66	70.26	70.47

18	Serdang Bedagai	67.27	67.47	67.63
19	Batu Bara	65.5	65.8	65.95
20	Padang Lawas Utara	66.4	66.5	66.54
21	Padang Lawas	66.01	66.31	66.4
22	Labuhan Batu Selatan	68.06	68.09	68.11
23	Labuhan Batu Utara	68.5	68.7	68.8
24	Nias Utara	68.49	68.59	68.68
25	Nias Barat	67.64	67.94	68.1
26	Sibolga	67.4	67.7	67.87
27	Tanjung Balai	61.4	61.9	62.09
28	Pematang Siantar	71.69	72.29	72.46
29	Tebing Tinggi	70.04	70,14	70.21
30	Medan	72.18	72.28	72.34
31	Binjai	71.39	71.59	71.67
32	Padang Sidmpuan	68.27	68.32	68.37
33	Gunung Sitoli	70.19	70.29	70.36
	PROVSU	68.04	68.29	68.33

Sumber Data : BPS

Berdasarkan tabel 6.1 Angka Harapan Hidup (AHH) menurut persentase tahun, angka tertinggi tercatat di tahun 2014 yaitu 72,18 % di Kota Medan, di Tahun 2015 tercatat 72,29 % di Kota Pematang Siantar dan di Tahun 2016 tercatat 72,46 % di Kota Pematang Siantar.



Gambar 6.1. Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Persentase

6.2 Persentase Penyebab Kematian Ibu Pada Masa Hamil, Melahirkan dan Nifas Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.2. Jumlah Dan Usia Kematian Ibu Hamil, Melahirkan, Dan Nifas Menurut Kelompok Usia Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi

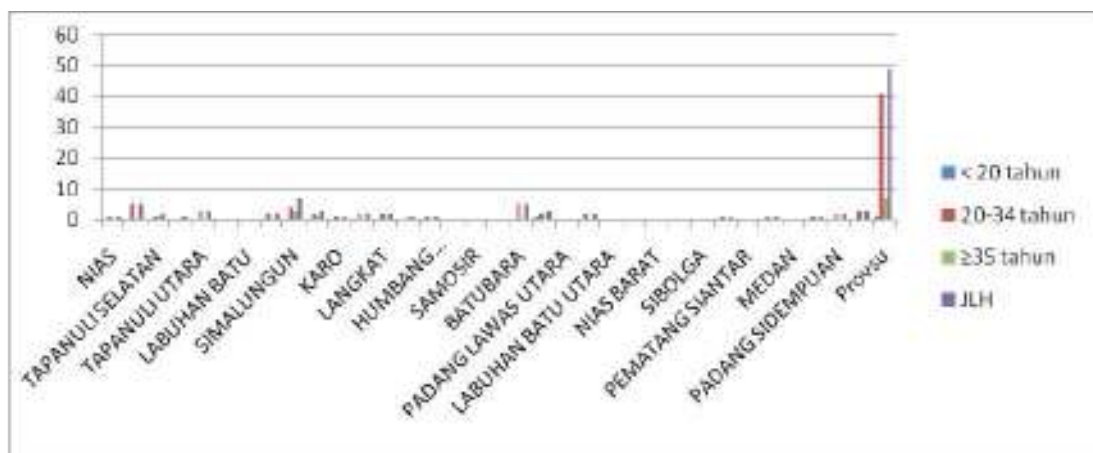
Sumatera Utara Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	KEMATIAN IBU															
		JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU			
		< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JLH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JLH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JLH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JLH
1	NIAS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	3
2	MANDAILING NATAL	0	5	0	5	0	1	0	1	0	7	8	15	0	13	8	21
3	TAPANULI SELATAN	0	1	1	2	0	3	0	3	0	2	1	3	0	6	2	8
4	TAPANULI TENGAH	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	5	5	0	0	10	10
5	TAPANULI UTARA	0	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5
6	TOBA SAMOSIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
7	LABUHAN BATU	0	0	0	0	0	5	5	10	0	1	0	1	0	6	5	11
8	ASAHAN	0	2	0	2	0	7	0	7	0	3	1	4	0	12	1	13
9	SIMALUNGUN	0	4	3	7	0	4	1	5	0	0	0	0	0	8	4	12
10	DAIRI	0	2	1	3	0	1	1	2	0	1	0	1	0	4	2	6
11	KARO	0	1	0	1	0	3	1	4	0	1	0	1	0	5	1	6
12	DELI SERDANG	0	2	0	2	0	8	2	10	0	5	2	7	0	15	4	19
13	LANGKAT	0	2	0	2	0	7	0	7	0	3	1	4	0	12	1	13

14	NIAS SELATAN	0	0	1	1	0	0	4	4	2	0	0	2	2	0	5	7
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	1	0	1	0	2	2	4	0	1	1	2	0	4	3	7
16	PAKPAK BHARAT	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2
17	SAMOSIR	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
18	SERDANG BEDAGEI	0	0	0	0	0	3	1	4	0	3	0	3	0	6	1	7
19	BATUBARA	0	5	0	5	0	5	0	5	0	2	0	2	0	12	0	12
20	PADANG LAWAS	1	2	0	3	1	1	1	3	0	0	0	0	2	3	1	6
21	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	2	0	3	1	4
22	LABUHAN BATU SELATAN	0	2	0	2	0	4	1	5	0	1	0	1	0	7	1	8
23	LABUHAN BATU UTARA	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0	5	2	7
24	NIAS UTARA	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	10	0	10	0	1	0	1	0	11	0	11
	KOTA				0				0				0				
26	SIBOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANJUNG BALAI	0	1	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	5	0	5
28	PEMATANG SIANTAR	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	2	0	3	1	4
29	TEBING TINGGI	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	2	0	2	2	4
30	MEDAN	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	2	1	3
31	BINJAI	0	1	0	1	0	4	0	4	0	1	0	1	0	6	0	6
32	PADANG SIDEMPUAN	0	2	0	2	1	1	2	4	0	4	0	4	1	7	2	10
33	GUNUNG SITOLI	0	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5
	Provsu	1	41	7	49	2	88	37	127	2	44	23	69	5	173	67	245

Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan data tabel 6.2 bahwa jumlah kematian ibu hamil tertinggi di Sumatera Utara adalah daerah Kabupaten Batubara dan Kabupaten Mandailing Natal yaitu 5 dikisaran umur 20-34 tahun. Jumlah kematian ibu bersalin tertinggi adalah di daerah Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 10 dikisaran umur 20-34 tahun. Sedangkan jumlah kematian saat ibu nifas tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yaitu di daerah Kabupaten Mandailing Natal yaitu 8 dikisaran umur 35 tahun ke atas. Adapun jumlah kematian ibu secara keseluruhan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara adalah di Kabupaten Deli Serdang yaitu 15 dengan kisaran umur 20-34 tahun



Gambar 6.2. Grafik Jumlah Kematian Ibu Hamil



Gambar 6.3. Grafik Jumlah Kematian Ibu Bersalin



Gambar 6.4. Grafik Jumlah Kematian Ibu Nifas



Gambar 6.5. Grafik Jumlah Kematian Ibu

6.3 Jumlah dan Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provsu Tahun 2016

Tabel 6.3 Jumlah Dan Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

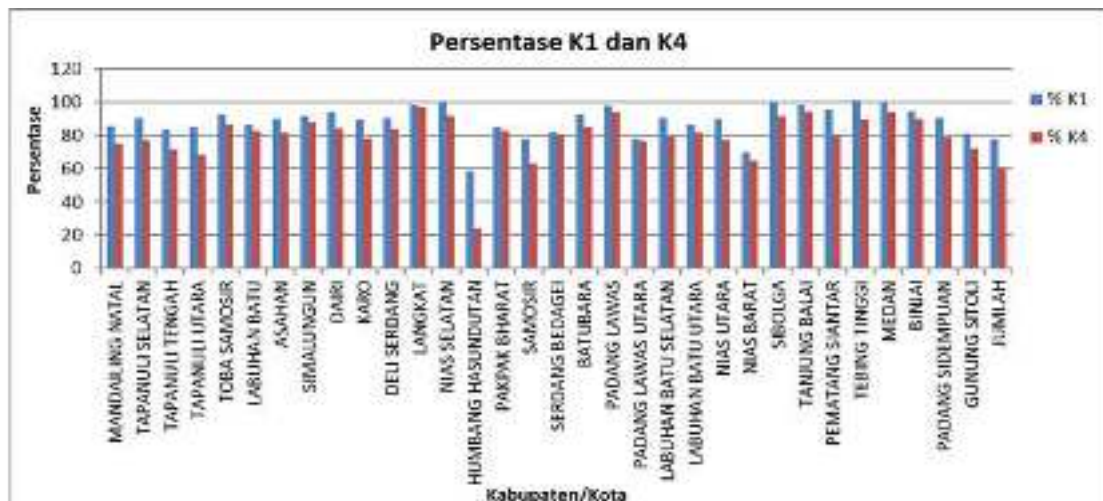
NO	KABUPATEN/KOTA	JLH BUMIL	K1		K4	
			JLH	%	JLH	%
1	NIAS	3,234	2,751	85.06	2,426	75.02
2	MANDAILING NATAL	10,228	9,245	90.39	7,894	77.18
3	TAPANULI SELATAN	6,506	5,391	82.86	4,636	71.26
4	TAPANULI TENGAH	8,206	6,979	85.05	5,584	68.05
5	TAPANULI UTARA	6,796	6,291	92.57	5,886	86.61
6	TOBA SAMOSIR	4,709	4,081	86.66	3,891	82.63
7	LABUHAN BATU	12,250	11,005	89.84	9,966	81.36
8	ASAHAN	16,385	15,001	91.55	14,315	87.37
9	SIMALUNGUN	19,645	18,376	93.54	16,569	84.34
10	DAIRI	6,583	5,876	89.26	5,153	78.28
11	KARO	9,675	8,074	90.4	7,455	83.75
12	DELI SERDANG	49,197	48,381	98.34	47,640	96.84
13	LANGKAT	23,298	23,222	99.67	21,317	91.5
14	NIAS SELATAN	7,087	4,153	58.6	1,700	23.99
15	HUMBANG HASUNDUTAN	5,419	4,589	84.68	4,468	82.45
16	PAKPAK BHARAT	1,334	1,034	77.51	843	63.19
17	SAMOSIR	2,862	2,349	82.08	2,303	80.47
18	SERDANG BEDAGEI	14,045	13,012	92.65	11,931	84.95
19	BATUBARA	10,693	10,437	97.61	9,995	93.47
20	PADANG LAWAS	8,234	6,435	78.15	6,288	76.37
21	PADANG LAWAS UTARA	5,927	5,354	90.33	4,703	79.35
22	LABUHAN BATU SELATAN	7,366	6,379	86.6	5,996	81.4
23	LABUHAN BATU UTARA	9,520	8,560	89.92	7,340	77.1
24	NIAS UTARA	3,073	2,139	69.61	1,985	64.59
25	NIAS BARAT	1,909	1,909	100	1,744	91.36
26	SIBOLGA	1,670	1,635	97.9	1,570	94.01
27	TANJUNG BALAI	4,294	4,094	95.34	3,436	80.02
28	PEMATANG SIANTAR	5,042	5,099	101.13	4,494	89.13
29	TEBING TINGGI	3,464	3,474	100.29	3,246	93.71
30	MEDAN	56,115	52,980	94.41	50,256	89.56
31	BINJAI	6,160	5,559	90.24	4,853	78.78
32	PADANG SIDEMPUAN	4,963	4,008	80.76	3,573	71.99
33	GUNUNG SITOLI	3,634	2,811	77.35	2,187	60.18
	JUMLAH	339,523	310,683	91.51	285,643	84.13

Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 6.3 bahwa jumlah kunjungan ibu hamil di K1 tertinggi terletak di kota medan sebanyak 56.115 kali dan K4 sebanyak 50.256 kali.



Gambar 6.6. Grafik Jumlah K1 dan K4



Gambar 6.7. Grafik Persentase K1 dan K4

6.4 Jumlah dan Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

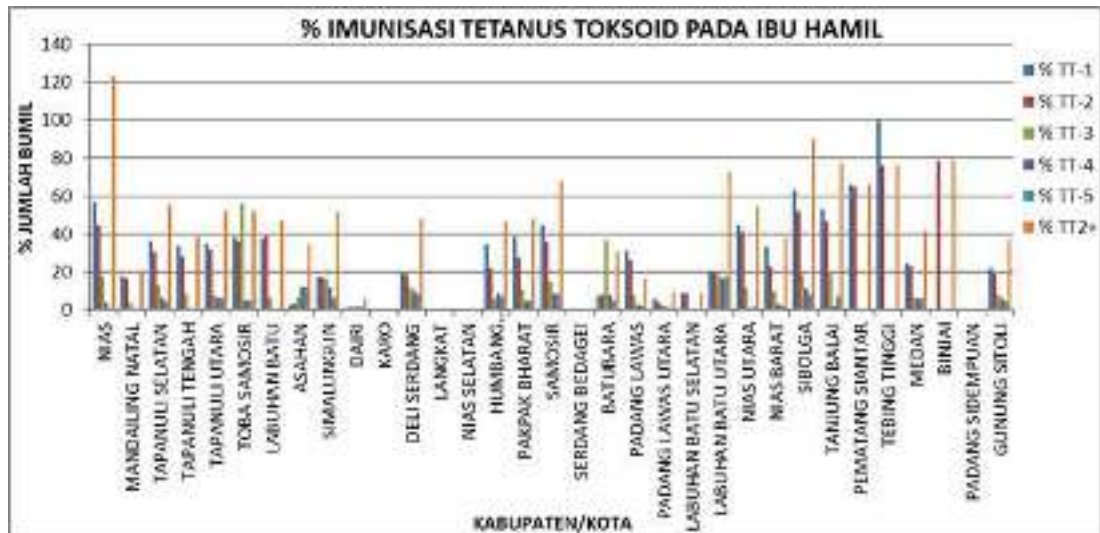
Tabel 6.4. Jumlah Dan Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JLH BUMIL	IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL											
			TT-1		TT-2		TT-3		TT-4		TT-5		TT2+	
			JUMLAH TT-1	% TT-1	JUMLAH TT-2	% TT-2	JUMLAH TT-3	% TT-3	JUMLAH TT-4	% TT-4	JUMLAH TT-5	% TT-5	JUMLAH TT2+	% TT2+
1	NIAS	3,234	1,843	57	1,438	44.5	573	17.7	120	3.7	11	0.3	3,974	122.9
2	MANDAILING NATAL	10,228	1,832	17.9	1,699	16.6	355	3.5	109	1.1	0	-	2,163	21.1
3	TAPANULI SELATAN	6,506	2,368	36.4	1,996	30.7	843	13	443	6.8	309	4.7	3,591	55.2
4	TAPANULI TENGAH	8,206	2,768	33.7	2,312	28.2	709	8.6	108	1.3	30	0.4	3,159	38.5
5	TAPANULI UTARA	6,796	2,370	34.9	2,163	31.8	518	7.6	443	6.5	432	6.4	3,556	52.3
6	TOBA SAMOSIR	4,709	1,813	38.5	1,719	36.5	2,662	56.5	236	5	243	5.2	2,460	52.2
7	LABUHAN BATU	12,250	4,557	37.2	4,743	38.7	863	7	75	0.6	75	0.6	5,756	47
8	ASAHAN	16,385	411	2.5	499	3	1,117	6.8	2,071	12.6	1,992	12.2	5,679	34.7
9	SIMALUNGUN	19,645	3,412	17.4	3,302	16.8	3,214	16.4	2,364	12	1,237	6.3	10,117	51.5
10	DAIRI	6,583	90	1.4	98	1.5	99	1.5	105	1.6	125	1.9	427	6.5
11	KARO	9,675	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
12	DELI SERDANG	49,197	9,576	19.5	8,987	18.3	5,768	11.7	4,862	9.9	4,022	8.2	23,639	48
13	LANGKAT	23,298	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
14	NIAS SELATAN	7,087	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15	HUMBANG HASUNDUTAN	5,419	1,894	35	1,198	22.1	304	5.6	487	9	384	7.1	2,535	46.8
16	PAKPAK BHARAT	1,334	514	38.5	369	27.7	144	10.8	64	4.8	63	4.7	640	48
17	SAMOSIR	2,862	1,274	44.5	1,034	36.1	421	14.7	259	9	234	8.2	1,948	68.1
18	SERDANG BEDAGEI	14,045	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
19	BATUBARA	10,693	755	7.1	914	8.5	1,037	37	822	7.7	533	5	3,306	30.9

20	PADANG LAWAS	8,234	2,594	31.5	2,160	26.2	628	7.6	236	2.9	161	2	1,375	16.7
21	PADANG LAWAS UTARA	5,927	349	5.9	256	4.3	164	2.8	97	1.6	63	1.1	580	9.8
22	LABUHAN BATU SELATAN	7,366	646	8.8	632	8.6	24	0.3	0	-	0	-	656	8.9
23	LABUHAN BATU UTARA	9,520	1,981	20.8	1,891	19.9	1,748	18.4	1,594	16.7	1,685	17.7	6,918	72.7
24	NIAS UTARA	3,073	1,365	44.4	1,253	40.8	345	11.2	43	1.4	45	1.5	1,686	54.9
25	NIAS BARAT	1,909	639	33.5	437	22.9	183	9.6	60	3.1	41	2.1	721	37.8
26	SIBOLGA	1,670	1,054	63.1	872	52.2	310	18.6	188	11.3	139	8.3	1,509	90.4
27	TANJUNG BALAI	4,294	2,292	53.4	2,000	46.6	812	18.9	96	2.2	321	7.5	3,329	77.5
28	PEMATANG SIANTAR	5,042	3,331	66.1	3,278	65	37	0.7	8	0.2	7	0.1	3,330	66
29	TEBING TINGGI	3,464	3,464	100	2,646	76.4	0	-	0	-	0	-	2,646	76.4
30	MEDAN	56,115	13,758	24.5	12,999	23.2	3,938	7	3,405	6.1	3,120	5.6	23,462	41.8
31	BINJAI	6,160	0	-	4,853	78.8	0	-	0	-	0	-	4,853	78.8
32	PADANG SIDEMPUAN	4,963	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
33	GUNUNG SITOLI	3,634	812	22.3	689	19	293	8.1	217	6	165	4.5	1,364	37.5
JUMLAH		339,523	67,762	20	66,437	19.6	27,109	7.98	18,512	5.45	15,437	4.55	125,379	36.93

Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 6.4 Imunisasi Tetanus Toksoid pada ibu hamil dengan nilai tertinggi terletak pada Kota Tebing Tinggi untuk TT-1 yaitu 100% dengan jumlah BUMIL di kota ini sebanyak 3.464 orang, Kota Binjai untuk TT-2 yaitu 78,8% dengan jumlah BUMIL 6.160 orang, Kabupaten Toba Samosir untuk TT-3 yaitu 56,5% dengan jumlah BUMIL 4.709, Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk TT-4 yaitu 16,7% dengan jumlah BUMIL 9.520 dan TT-5 yaitu 17,7% dan TT2+ tertinggi di Kabupaten Nias yaitu 122.9% dengan jumlah BUMIL 3.234.



Gambar 6.8. Grafik Persentase Imunisasi Tetanus Toksoid Pada Ibu Hamil

6.5 Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.5 Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JLH BUMIL	MENDAPAT Fe 1		MENDAPAT Fe 3	
			JLH	%	JLH	%
	KABUPATEN					
1	NIAS	3234	224	6.92	181	5.59
2	MANDAILING NATAL	10228	5195	50.79	6380	62.37
3	TAPANULI SELATAN	6506	976	15.00	503	7.73
4	TAPANULI TENGAH	8206	0	0	6176	75.26
5	TAPANULI UTARA	6796	6387	93.98	5815	85.56
6	TOBA SAMOSIR	4709	4307	91.46	3920	83.24
7	LABUHAN BATU	12250	10139	82.76	9966	81.35
8	ASAHAN	16385	7783	47.50	7353	44.87
9	SIMALUNGUN	19645	14636	74.50	7444	37.89
10	DAIRI	6583	5876	89.26	5153	78.27
11	KARO	9675	7908	81.73	7515	77.67
12	DELI SERDANG	49197	48381	98.34	47640	96.83
13	LANGKAT	23298	20091	86.23	19307	82.86
14	NIAS SELATAN	7087	0	0	2775	39.15
15	HUMBANG HASUNDUTAN	5419	415400	76.65	3932	72.55
16	PAKPAK BHARAT	1334	1095	82.08	1146	85.90
17	SAMOSIR	2862	2349	82.07	2243	78.37
18	SERDANG BEDAGEI	14045	12965	92.31	11821	84.16
19	BATUBARA	10693	10279	96.12	9718	90.88
20	PADANG LAWAS	8234	4360	52.95	3767	45.74
21	PADANG LAWAS UTARA	5927	0	0	3048	51.42
22	LABUHAN BATU SELATAN	7366	6208	84.27	5882	79.85
23	LABUHAN BATU UTARA	9520	5135	53.93	4323	45.40
24	NIAS UTARA	3073	1474	47.96	1756	57.14
25	NIAS BARAT	1909	1909	100	1744	91.35
26	SIBOLGA	1670	1637	98.02	1570	94.01
27	TANJUNG BALAI	4294	4102	95.52	2969	69.14
28	PEMATANG SIANTAR	5042	5099	101.13	4814	95.47
29	TEBING TINGGI	3464	3464	100	3246	93.70
30	MEDAN	56115	52980	94.41	47259	84.21
31	BINJAI	6160	1463	23.75	4903	79.59
32	PADANG SIDEMPUAN	4963	4008	80.75	3573	71.99

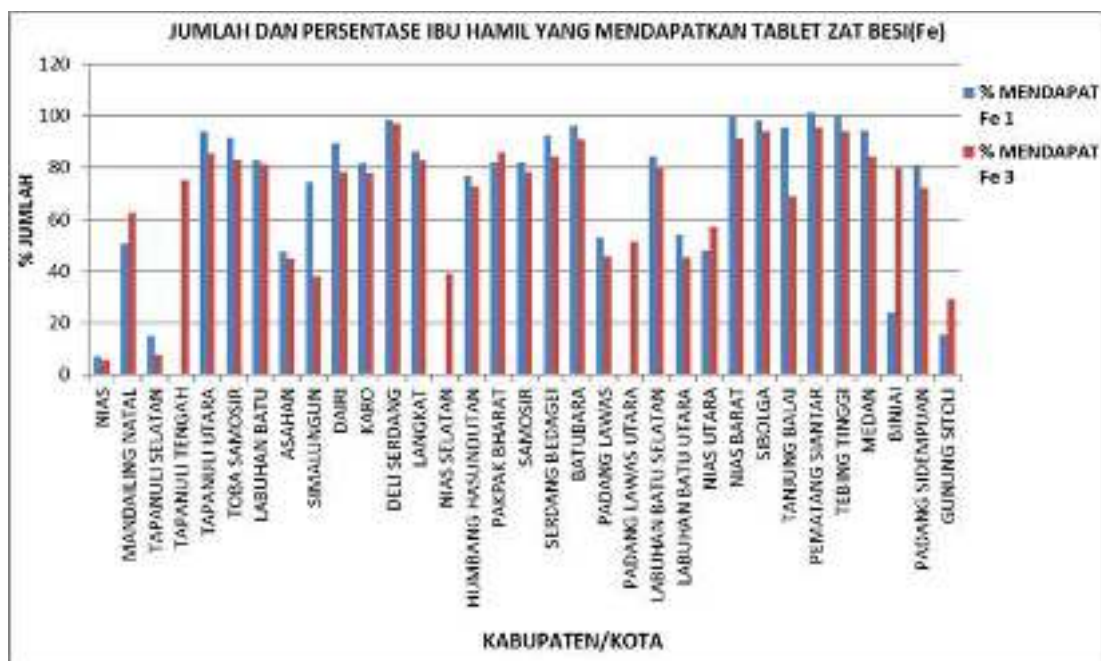
33	GUNUNG SITOLI	3634	565	15.54	1063	29.25
JUMLAH		339523	255149	7515	248905	7331

Sumber data: Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 6.5 jumlah ibu hamil yang mendapat tablet zat besi, kota yang mendapatkan tablet Fe1 tertinggi terletak di Kota Medan sebanyak 56.115 dan yang mendapatkan tablet Fe3 tertinggi terletak di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 47 640.



Gambar 6.9. Grafik Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi(Fe)



Gambar 6.10. Grafik Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)

6.6 Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.6. Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JLH BUMIL	BUMIL KEK	% BUMIL KEK	BUMIL KOMPLIKASI KEBIDANAN	% BUMIL KOMPLIKASI KEBIDANAN
	KABUPATEN					
1	NIAS	3243	342	10,58	18	0,56
2	MANDAILING NATAL	10.228	112	1,10	497	4,86
3	TAPANULI SELATAN	6506	0	0.00	463	7,12
4	TAPANULI TENGAH	8206	115	1,40	143	1,74
5	TAPANULI UTARA	6796	18	0,26	388	5,71
6	TOBA SAMOSIR	4709	90	1,91	608	12,91
7	LABUHAN BATU	12250	133	1,09	550	4,49
8	ASAHAN	16385	335	2,04	405	2,47
9	SIMALUNGUN	19645	745	3,79	1,508	7,68
10	DAIRI	6583	317	4,82	889	13,50
11	KARO	9675	75	0,78	422	4,36
12	DELI SERDANG	49197	942	1,91	9,827	19,97
13	LANGKAT	23298	138	0,59	1,891	8,12
14	NIAS SELATAN	7087	0	0,00	104	1,47
15	HUMBANG HASUNDUTAN	5419	291	5,37	119	2,20
16	PAKPAK BHARAT	1334	32	2,40	214	16,04
17	SAMOSIR	2862	96	3,35	554	19,36
18	SERDANG BEDAGEI	14045	123	0,88	1,628	11,59
19	BATUBARA	10693	0	0.00	651	6,09
20	PADANG LAWAS	8234	191	2,32	219	2,66
21	PADANG LAWAS UTARA	5927	42	0,71	405	6,83
22	LABUHAN BATU SELATAN	7366	52	0,71	253	3,43
23	LAB. BATU UTARA	9520	48	0,50	32	0,34
24	NIAS UTARA	3073	45	1,46	27	0,88
25	NIAS BARAT	1909	0	0.00	51	2,67
26	SIBOLGA	1670	124	7,43	324	19,40
27	TANJUNG BALAI	4294	4,255	99,09	670	15,60
28	PEMATANG SIANTAR	5042	55	1,09	855	16,96
29	TEBING TINGGI	3464	50	1,44	532	15,39
30	MEDAN	56115	261	0,47	4,649	8,28

31	BINJAI	6160	105	1,70	70	1,14
32	PADANG SIDEMPUAN	4963	53	1,07	345	6,95
33	GUNUNG SITOLI	3634	186	5,12	108	2,97
JUMLAH		339.523	9,371	2,76	29,419	8,66

Sumber data: Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 6.6 jumlah ibu hamil yang beresiko untuk kategori ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) tertinggi di Kota Tanjung Balai yaitu 99,09 % dengan jumlah BUMIL sebanyak 4.294 orang dan ibu hamil yang mengalami komplikasi tertinggi di Kabupaten Deli Serdang yaitu 91,97 % dengan jumlah BUMIL sebanyak 9.827 orang.



Gambar 6.11. Grafik Persentase Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/Kota



Gambar 6.12. Grafik Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko

6.7 Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

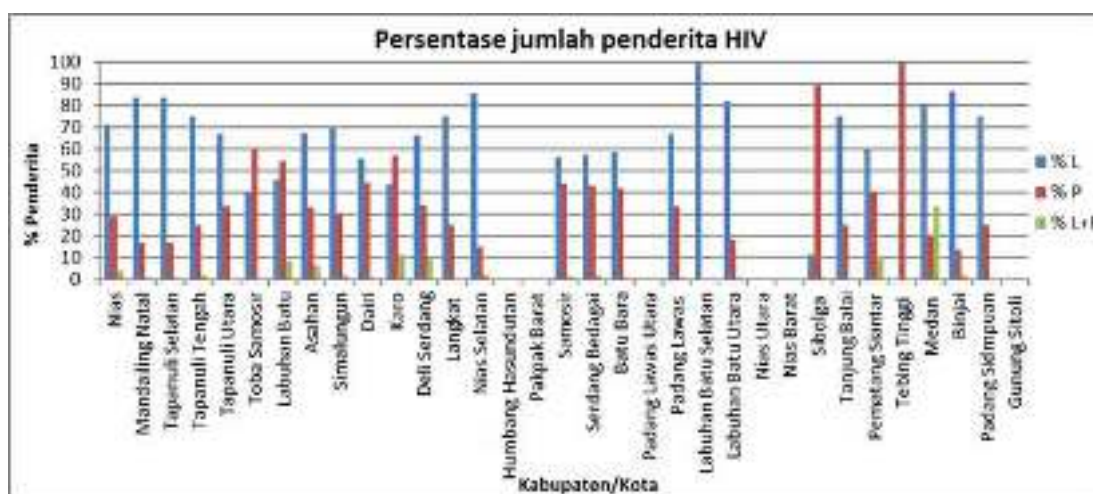
Tabel 6.7. Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	PENDERITA HIV						PENDERITA AIDS					
		L	% L	P	% P	L +P	% L+P	L	% L	P	% P	P +L	% L+P
1	Nias	37	71.15	15	28.85	52	3.84	0	0	1	100	1	0.25
2	Mandailing Natal	10	83.33	2	16.67	12	0.88	4	100	0	0	4	1.01
3	Tapanuli Selatan	10	83.33	2	16.67	12	0.88	1	100	0	0	1	0.25
4	Tapanuli Tengah	18	75	6	25	24	1.77	1	100	0	0	1	0.25
5	Tapanuli Utara	2	66.67	1	33.33	3	0.22	3	100	0	0	3	0.76
6	Toba Samosir	2	40	3	60	5	0.37	10	37.04	17	62.96	27	6.87
7	Labuhan Batu	52	45.61	62	54.39	114	8.43	2	50	2	50	4	1.02
8	Asahan	57	67.06	28	32.94	85	6.28	37	64.91	20	35.09	57	14.5
9	Simalungun	16	69.57	7	30.44	23	1.70	4	100	0	0	4	1.02
10	Dairi	5	55.56	4	44.44	9	0.66	4	66.67	2	33.33	6	1.52
11	Karo	65	43.33	85	56.67	150	11.09	14	50	14	50	28	7.12

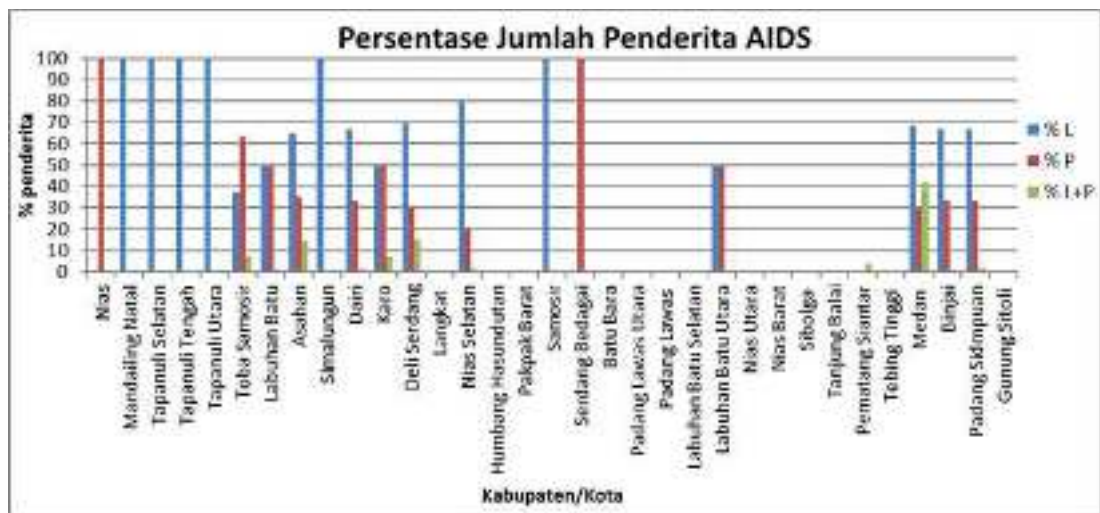
12	Deli Serdang	86	66.15	44	33.85	130	9.61	41	69.49	18	30.51	59	15.01
13	Langkat	3	75	1	25	4	0.29	0	0	0	0	0	0
14	Nias Selatan	23	85.19	4	14.82	27	1.99	4	80	1	20	5	1.27
15	Humbang Hasundutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pakpak Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Samosir	9	56.25	7	43.75	16	1.18	1	100	0	0	1	0.25
18	Serdang Bedagai	12	57.14	9	42.86	21	1.55	0	0	3	100	3	0.76
19	Batu Bara	7	58.33	5	41.67	12	0.88	0	0	0	0	0	0
20	Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Padang Lawas	8	66.67	4	33.33	12	0.88	0	0	0	0	0	0
22	Labuhan Batu Selatan	2	100	0	0	2	0.14	0	0	0	0	0	0
23	Labuhan Batu Utara	9	81.82	2	18.18	11	0.81	1	50	1	50	2	0.51
24	Nias Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sibolga	1	11.11	8	88.89	9	0.66	0	0	0	0	0	0
27	Tanjung Balai	3	75	1	25	4	0.29	0	0	0	0	0	0
28	Pematang Siantar	80	59.7	54	40.3	134	9.91	10	0	4	0	14	3.56
29	Tebing Tinggi	0	0	2	100	2	0.14	0	0	0	0	0	0
30	Medan	365	80.57	88	19.43	453	33.51	113	68.9	49	29.88	164	41.73
31	Binjai	19	86.36	3	13.64	22	1.62	2	66.67	1	33.33	3	0.76
32	Padang Sidmpuan	3	75	1	25	4	0.29	4	66.67	2	33.33	6	1.52
33	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVSU		890		448		1338		257		135		392	

Sumberdata: Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 6.7 penderita HIV berjenis kelamin laki-laki tertinggi terletak di Kota Medan sebanyak 365 orang dan berjenis kelamin perempuan tertinggi di Kota Medan sebanyak 88 orang sedangkan penderita penyakit AIDS berjenis kelamin laki-laki tertinggi di Kota Medan sebanyak 113 orang dan berjenis kelamin perempuan tertinggi di Kota Medan sebanyak 49 orang.



Gambar 6.13. Grafik Persentase Penderita HIV



Gambar 6.14. Grafik Persentase Penderita AIDS

**6.8 Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 6.8 Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin,
Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016**

KAB/KOTA	Usia Perkawinan						RATA-RATA UMUR PERKAWINAN PERTAMA
	10-16	17 - 18	19 - 24	25 - 34	35 +	Jumlah	
Nias	8.32	22.99	49.96	16.61	2.12	100	20.96
Mandailing Natal	11.79	21.08	50.42	15.74	0.97	100	20.67
Tapanuli Selatan	4.2	17.9	58.14	18.21	1.55	100	21.66
Tapanuli Tengah	2.81	14.75	59.86	21.43	1.15	100	22.03
Tapanuli Utara	1.32	9.21	60.91	27.19	1.38	100	22.69
Toba Samosir	1.71	10.77	54.15	30.89	2.48	100	23.23
Labuhan Batu	6.02	16.11	58.84	17.79	1.24	100	21.49
Asahan	7,38	17.08	59.42	15.62	0.5	100	20.95
Simalungun	2.41	13.78	61.34	20.86	1.62	100	22.02
Dairi	1.96	10.34	63.4	23.54	0.76	100	22.32
Karo	3.89	14.02	61.1	19.89	1.09	100	21.84
Deli Serdang	2.88	14.03	62.61	19.93	0.55	100	21.89
Langkat	6.1	19.2	59.3	13.91	1.48	100	21.09
Nias Selatan	9.74	18.88	56.47	14.67	0.23	100	20.65
Humbang Hasundutan	1.51	7.76	61.96	28.06	0.72	100	22.85
Pakpak Barat	0.94	8.94	61.3	28.58	0.25	100	22.56
Samosir	1.9	5.65	56.29	34.67	1.49	100	23.47
Serdang Bedagai	7.79	20.05	56.37	14.68	1.11	100	20.93
Batu Bara	7.8	17.27	58.74	15.56	0.63	100	20.97
Padang Lawas Utara	6.38	20.24	58.12	15.05	0.21	100	20.89
Padang Lawas	6.63	20.62	58.74	13.66	0.35	100	20.83
Labuhan Batu Selatan	7.13	17.81	61.13	13.57	0.37	100	20.85
Labuhan Batu Utara	7.6	18.47	59.96	13.32	0.65	100	20.9
Nias Utara	4.93	17.04	52.22	23.87	1.94	100	22.15
Nias Barat	4.98	15	51.32	26.95	1.75	100	22.39
Sibolga	2.73	13.1	59.09	23.42	1.65	100	22.26
Tanjung Balai	9.98	17.93	52.65	17.24	2.2	100	21.35
Pematang Siantar	3.11	4.6	61.15	30.01	1.14	100	23.06
Tebing Tinggi	3.09	9.91	57.73	27.39	1.88	100	22.79
Medan	3.35	10.72	54.89	29.05	1.99	100	22.91
Binjai	5.44	10.4	57.61	23.77	2.78	100	22.4
Padang Sidempuan	5.53	19.81	51.42	22.83	0.42	100	21.67
Gunung Sitoli Gunung Sitoli	3.65	11.73	55.3	26.23	3.09	100	22.87
PROVSU	4.82	14.85	58.49	20.63	1.21	100	21.82
PERKOTAAN	3.99	12.49	57.79	24.31	1.42	100	22.31

PERDESAAN	5.66	17.22	59.19	16.93	1	100	21.34
-----------	------	-------	-------	-------	---	-----	-------

Sumber data : BPS

Berdasarkan tabel 6.8 persentase jumlah pernikahan tertinggi menurut usia perkawinan untuk kisaran umur 10-16 tahun terletak di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 11,79%, untuk kisaran umur 17-18 tahun terletak di Kabupaten Nias yaitu 22,99%, untuk kisaran umur 19-24 tahun terletak di Kabupaten Dairi yaitu 63,4 %, untuk kisaran umur 25-34 tahun terletak di Kabupaten Samosir yaitu 34,67% dan untuk kisaran umur 35 tahun keatas terletak di Kota Gunung Sitoli yaitu 3,09%.



Gambar 6.15. Grafik Persentase Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan

6.9 Persentase Penduduk Perempuan Usai 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.9 Persentase Penduduk Perempuan Usai 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	KAB/KOTA	USIA PERKAWINAN					JUMLAH
		10-16	17 - 18	19 - 24	25 - 34	35 +	
1	Nias	8.32	22.99	49.96	16.61	2.12	100
2	Mandailing Natal	11.79	21.08	50.42	15.74	0.97	100
3	Tapanuli Selatan	4.2	17.9	58.14	18.21	1.55	100
4	Tapanuli Tengah	2.81	14.75	59.86	21.43	1.15	100
5	Tapanuli Utara	1.32	9.21	60.91	27.19	1.38	100
6	Toba Samosir	1.71	10.77	54.15	30.89	2.48	100
7	Labuhan Batu	6.02	16.11	58.84	17.79	1.24	100
8	Asahan	7.38	17.08	59.42	15.62	0.5	100
9	Simalungun	2.41	13.78	61.34	20.86	1.62	100
10	Dairi	1.96	10.34	63.4	23.54	0.76	100
11	Karo	3.89	14.02	61.1	19.89	1.09	100
12	Deli Serdang	2.88	14.03	62.61	19.93	0.55	100
13	Langkat	6.1	19.2	59.3	13.91	1.48	100
14	Nias Selatan	9.74	18.88	56.47	14.67	0.23	100
15	Humbang Hasundutan	1.51	7.76	61.96	28.06	0.72	100
16	Pakpak Barat	0.94	8.94	61.3	28.58	0.25	100
17	Samosir	1.9	5.65	56.29	34.67	1.49	100
18	Serdang Bedagai	7.79	20.05	56.37	14.68	1.11	100
19	Batu Bara	7.8	17.27	58.74	15.56	0.63	100
20	Padang Lawas Utara	6.38	20.24	58.12	15.05	0.21	100
21	Padang Lawas	6.63	20.62	58.74	13.66	0.35	100
22	Labuhan Batu Selatan	7.13	17.81	61.13	13.57	0.37	100
23	Labuhan Batu Utara	7.6	18.47	59.96	13.32	0.65	100
24	Nias Utara	4.93	17.04	52.22	23.87	1.94	100
25	Nias Barat	4.98	15	51.32	26.95	1.75	100
26	Sibolga	2.73	13.1	59.09	23.42	1.65	100
27	Tanjung	9.98	17.93	52.65	17.24	2.2	100

	Balai						
28	Pematang Siantar	3.11	4.6	61.15	30.01	1.14	100
29	Tebing Tinggi	3.09	9.91	57.73	27.39	1.88	100
30	Medan	3.35	10.72	54.89	29.05	1.99	100
31	Binjai	5.44	10.4	57.61	23.77	2.78	100
32	Padang Sidmpuan	5.53	19.81	51.42	22.83	0.42	100
33	Gunung Sitoli	3.65	11.73	55.3	26.23	3.09	100
SUMATERA UTARA		4.82	14.9	58.49	20.63	1.2	100

Sumber data: BPS

Berdasarkan tabel 6.9 persentase jumlah pernikahan tertinggi menurut usia perkawinan untuk kisaran umur 10-16 tahun terletak di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 11,79%, untuk kisaran umur 17-18 tahun terletak di Kabupaten Nias yaitu 22,99%, untuk kisaran umur 19-24 tahun terletak di Kabupaten Dairi yaitu 63,4 %, untuk kisaran umur 25-34 tahun terletak di Kabupaten Samosir yaitu 34,67% dan untuk kisaran umur 35 tahun keatas terletak di Kota Gunung Sitoli yaitu 3,09%.



Gambar 6.16. Grafik Persentase Penduduk Perempuan Menurut Usia 10 Tahun Keatas Menurut Perkawinan Pertama

6.10 Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

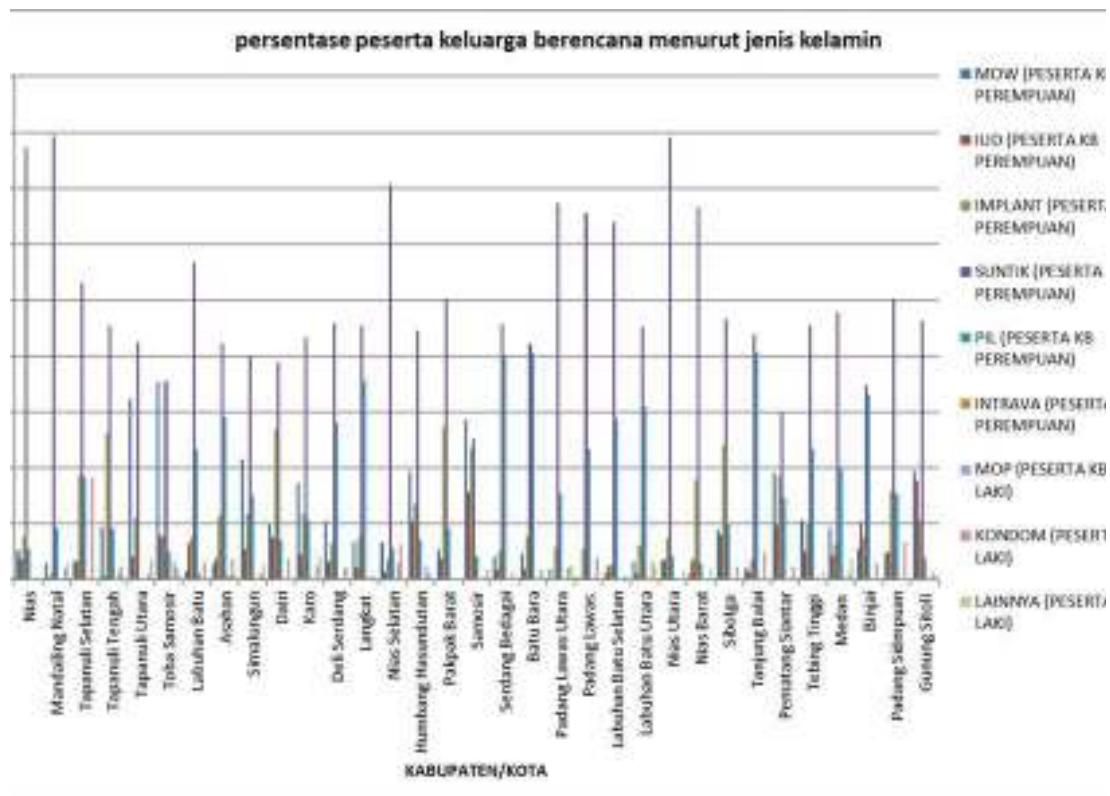
Tabel 6.10 Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	KAB/KOTA	PESERTA KB PEREMPUAN						PESERTA KB LAKI-LAKI		
		MOW (PESERTA KB PEREMPUAN)	IUD (PESERTA KB PEREMPUAN)	IMPLANT (PESERTA KB PEREMPUAN)	SUNTIK (PESERTA KB PEREMPUAN)	PIL (PESERTA KB PEREMPUAN)	INTRAV A (PESERTA KB PEREMPUAN)	MOP (PESERTA KB LAKI-LAKI)	KONDOM (PESERTA KB LAKI-LAKI)	LAINNYA (PESERTA KB LAKI-LAKI)
1	Nias	5.3	3.75	7.67	77.27	5.51	0	0	0.5	0
2	Mandailing Natal	2.94	0.36	1.11	79.26	9.32	0	0	2.03	2.9
3	Tapanuli Selatan	3.36	3.26	18.72	53.06	18.34	0	0	18.34	0
4	Tapanuli Tengah	9.34	0.61	26.24	45.29	9.1	0	1.24	2.29	0.64
5	Tapanuli Utara	32.29	4.23	11.15	42.51	0	0	0	1.11	3.62
6	Toba Samosir	35.3	7.79	7.72	35.46	4.95	0	3.42	2.13	0.96
7	Labuhan Batu	1.4	6.41	7.61	56.66	23.16	1.11	0	3.14	0.37
8	Asahan	2.79	3.9	11.44	42.26	29.09	0.57	0.85	3.7	0.97
9	Simalungun	21.52	5.37	11.84	40.03	14.87	0.3	0	1.16	2.78
10	Dairi	9.86	7.48	26.89	38.97	7.17	0	0.14	3.71	0
11	Karo	17.23	4.54	11.93	43.4	10.67	0	0	2.56	4.21
12	Deli Serdang	10.44	3.23	6.55	45.83	28.01	0	0	1.99	2.21
13	Langkat	6.72	2.24	7.56	45.3	35.52	0	0.3	0.8	0
14	Nias Selatan	6.67	1.46	3.69	70.76	5.51	0	3.01	6.38	0.19
15	Humbang Hasundutan	19.17	10.46	13.55	44.57	7.07	0	2.44	1.24	0
16	Pakpak Barat	5.46	3.66	27.31	50.28	9.07	0	0	0	0

17	Samosir	28.67	15.72	23.58	25.27	4.15	0	0	0.53	2.08
18	Serdang Bedagai	4.25	1.81	5.1	45.67	40.09	0	0.19	1.12	0
19	Batu Bara	4.65	1.81	7.77	42.07	40.66	0	0	1.69	0.64
20	Padang Lawas Utara	1.86	0	5.84	67.3	15.32	0	0	2.2	2.47
21	Padang Lawas	0.45	0	5.5	65.43	23.42	0	0	3.95	0
22	Labuhan Batu Selatan	1.3	2.54	2.71	63.92	28.83	0	0	0.6	0.09
23	Labuhan Batu Utara	3.3	1.15	6.1	45.24	30.9	0	0	3.43	2.39
24	Nias Utara	3.41	3.56	7.4	79.18	4.22	0.33	0	0	1.36
25	Nias Barat	1.13	3.63	17.8	66.56	2.97	0	0	0	2
26	Sibolga	9	8.05	23.93	46.64	9.87	0	0	2.4	0.11
27	Tanjung Balai	2.05	1.38	3.57	43.77	40.59	0	0	5.01	0
28	Pematang Siantar	19.09	9.73	18.66	29.83	14.68	0	0	2.32	0.52
29	Tebing Tinggi	10.69	5.04	10.06	45.51	23.42	0	0.46	0.25	1.49
30	Medan	9.26	4.35	6.33	47.83	20.17	0.36	0	1.1	3.87
31	Binjai	5.49	10.35	7.52	34.7	33.11	0	0	2.9	0
32	Padang Sidempuan	4.82	4.93	15.8	50.23	15.39	0	0	6.84	0
33	Gunung Sitoli	19.354	17.68	10.7	46.23	3.9	0	0	1.25	0.83
	SUMATERA UTARA	8.91	0.2	3.81	47.55	8.73	23.97	1.94	0.15	0.16
	Perkotaan	9.43	0.12	4.67	45.95	7.15	25	2.07	0.22	0.11
	Perdesaan	8.37	0.28	2.95	49.16	10.32	22.93	1.82	0.08	0.21

Sumberdata : Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB

Berdasarkan tabel 6.10 jumlah peserta/akseptor keluarga berencana menurut jenis kelamin, peserta KB perempuan yang menggunakan MOW tertinggi yaitu 35,3% yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, yang menggunakan IUD tertinggi yaitu 17,68% terletak di Kota Gunung Sitoli, yang menggunakan IMPLANT tertinggi yaitu 27,31% terletak di Kabupaten Phakpak Barat, yang menggunakan SUNTIK tertinggi yaitu 79,26% terletak di Kabupaten Mandailing Natal, yang menggunakan PIL tertinggi yaitu 40,66% terletak di Kabupaten Batubara dan menggunakan INTRAHA tertinggi yaitu 1,11% di Kabupaten Labuhan Batu sedangkan peserta KB laik-laki yang menggunakan MOP tertinggi yaitu 3,42% di Kabupaten Toba Samosir, yang menggunakan KONDOM tertinggi 18,34% di Kabupaten Tapanuli Selatan dan lainnya tertinggi yaitu 4,21% di Kabupaten Karo.



Gambar 6.17. Grafik Persentase Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin

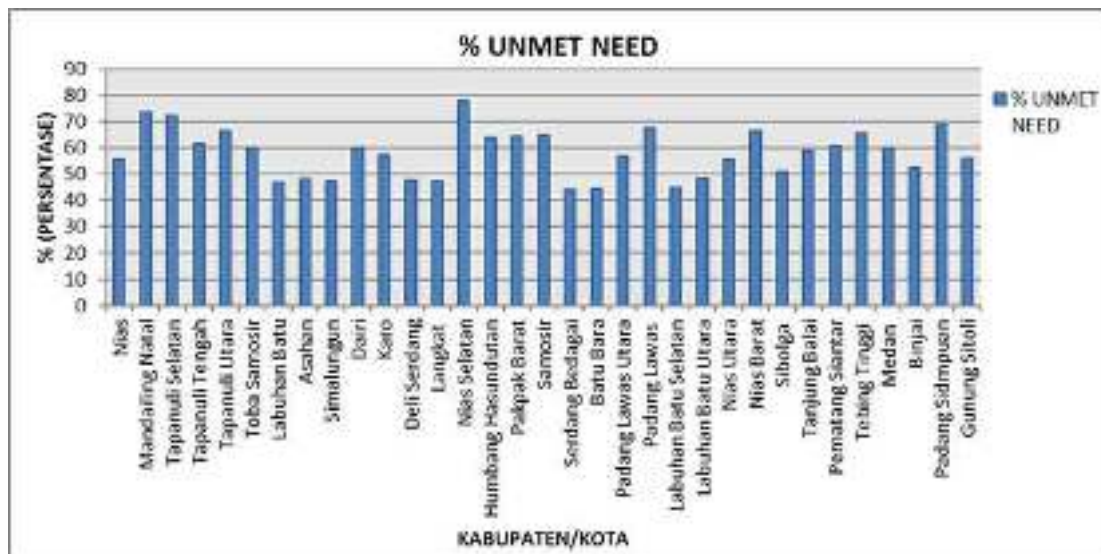
6.11 Unmet Need, Jumlah PUS dan Jumlah WUS Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.11 Unmet Need, Jumlah PUS Dan Jumlah WUS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	UNMET NEED
1	Nias	55.47
2	Mandailing Natal	73.44
3	Tapanuli Selatan	72.13
4	Tapanuli Tengah	61.71
5	Tapanuli Utara	66.26
6	Toba Samosir	59.81
7	Labuhan Batu	46.67
8	Asahan	48.05
9	Simalungun	47.25
10	Dairi	59.99
11	Karo	57.31
12	Deli Serdang	47.6
13	Langkat	47.13
14	Nias Selatan	77.76
15	Humbang Hasundutan	63.97
16	Pakpak Barat	64.26
17	Samosir	64.81
18	Serdang Bedagai	44.14
19	Batu Bara	44.59
20	Padang Lawas Utara	56.68
21	Padang Lawas	67.37
22	Labuhan Batu Selatan	44.93
23	Labuhan Batu Utara	48.48
24	Nias Utara	55.61
25	Nias Barat	66.3
26	Sibolga	50.75
27	Tanjung Balai	58.67
28	Pematang Siantar	60.76
29	Tebing Tinggi	65.48
30	Medan	60.04
31	Binjai	52.52
32	Padang Sidempuan	68.64
33	Gunung Sitoli Gunung Sitoli	56.15
	Sumatera Utara	54.41
	Indonesia	44.07

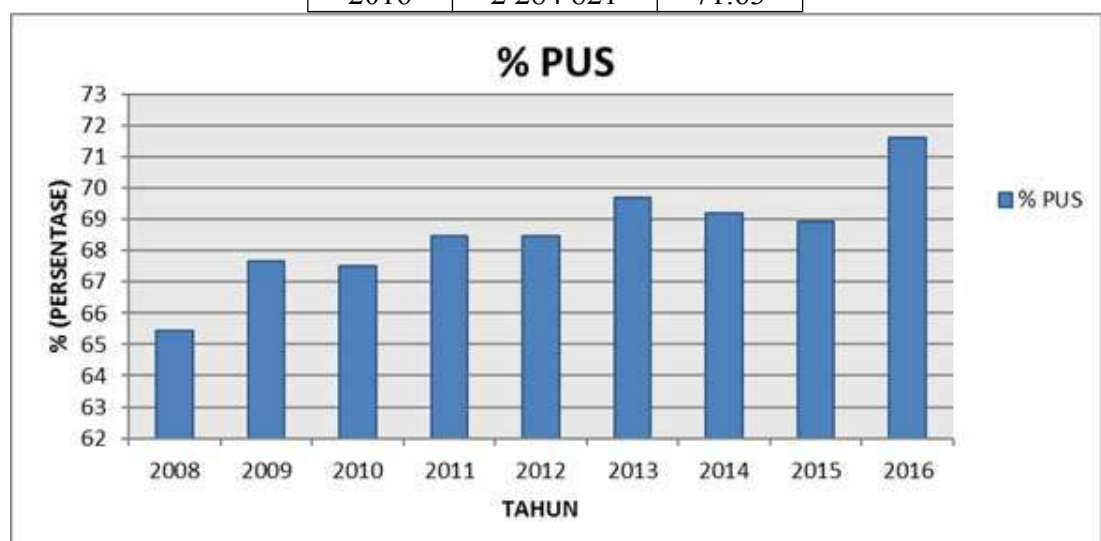
Sumber data : BPS

Berdasarkan tabel 6.11 persentase jumlah tertinggi UNMEET NEED tertinggi di Kabupaten Nias Selatan dengan nilai 77,76 %, persentase PUS tertinggi di tahun 2016 setinggi 71,63%.



Gambar 6.18. Grafik Persentase Unmet Need

TAHUN	JUMLAH PUS	% PUS
2008	2 021 211	65.44
2009	2 075 286	67.66
2010	2 117 695	67.5
2011	2 204 567	68.45
2012	2 157 093	68.47
2013	2 230 890	69.68
2014	2 354 389	69.21
2015	2 327 673	68.93
2016	2 284 821	71.63



Gambar 6.19. Grafik Persentase PUS

6.12 Pengguna Narkoti, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.12 Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO	SATKER	JENIS KELAMIN	
		Laki-laki	Perempuan
1	BNNK DELISERDANG	117	2
2	BNNK SERDANG BEDAGAI	50	2
3	BNNK P. SIANTAR	74	9
4	BNNK TANJUNG BALAI	206	15
5	BNNK ASAHAN	204	31

6	BNNK TAPANULI SELATAN	47	3
7	BNNK MANDAILING NATAL	62	0
8	BNNK BINJAI	73	10
9	BNNK LANGKAT	62	1
10	BNNK KARO	41	4
11	BNNK GUNUNG SITOLI	0	0
12	BNNP SUMUT	-71	71
TOTAL		865	148

Sumberdata :Badan Narkotika

Berdasarkan tabel 6.12 pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif berjenis kelamin laki-laki tertinggi di BNNK Tanjung Balai sebanyak 206 orang dan berjenis kelamin perempuan tertinggi di BNNP SUMUT sebanyak 71 orang.



Gambar 6.20. Grafik Pengguna NAPZA, Psikotropika dan Zat Adiktif

BAB VII

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pendekatan *women in Development* (WID) memperlihatkan asalnya dari kaum Liberia Utara pada 1970 dan 1980. Pendekatan ini diasaskan kepada paradigma modenisasi dan ditumpukan kepada inisiatif serta pengembangan teknologi yang lebih baik, tepat dan meringankan kerja wanita. Ternyata WID ini mengalami kegagalan dari segi pemanfaatan sumber modal manusia yang efektif, produktif dan reproduktif (Mosse, 1996: 205). Oleh itu pendekatan pembangunan beralih kepada konsep “Wanita dan Pembangunan” *Women and Development* (WAD). WAD merupakan satu pendekatan Neo-Marxis yang muncul di akhir tahun 1970-an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modenisasi. Bukannya menitik beratkan kepada strategi untuk mengintegrasikan wanita dalam pembangunan. WAD mengakui bahwa lelaki miskin juga menjadi korban daripada proses pembangunan yang mengabaikan mereka. Pendekatan WAD berasumsi bahwa wanita akan lebih baik selama dan ketika ideologi struktur patriaki secara universal di peringkat antarbangsa menjadi lebih adil. Pendekatan WAD menumpukan kepada aktiviti yang mendatangkan penghasilan dan kurang memperhatikan tenaga wanita dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

Satu-satunya pendekatan terhadap wanita dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan wanita dan semua pekerjaan yang dilakukannya, kerja produktif, reproduktif, privat dan publik serta pada masa yang sama mempertahankan keluarga dan rumah tangga dikenali dengan istilah “pemberdayaan” atau “Gender dan Pembangunan” (*Gender and Development/GAD*) terhadap wanita dalam pembangunan (Mosse, 1996: 205). Hardjito Notopuro (1979) dalam *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan Di Indonesia* membahaskan pengertian dan hakikat wanita dari sudut agama, antropologi, biologi dan latar belakang sejarah kedudukan wanita (Notopuro, 1979: 15). Wanita sebagai salah satu tonggak kekuatan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat lainnya. Begitu juga wanita bersama dengan lelaki mempunyai tanggungjawab dan peranan dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan nasional menuju masa depan yang lebih baik, adil dan

sejahtera.

Kunci untuk perbaikan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja bermutu. Tetapi, estimasi kami, bersama beberapa peneliti Indonesia, mengenai jumlah pekerjaan yang dibutuhkan sekurangnya 70 juta lapangan kerja yang bermutu (untuk memindahkan pekerja sektor informal, penganggur, dan kelompok miskin).

Dengan angkatan kerja pada 2013 yang berjumlah 118 juta, penciptaan 70 juta lapangan kerja baru yang bermutu adalah target yang ambisius. Pada 2013 sudah ada 45 juta lapangan pekerjaan formal di bidang manufaktur, konstruksi, dan sebagainya (M Purnagunawan, 2013). Lapangan pekerjaan di bidang-bidang tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai pekerjaan bermutu. Beberapa pekerjaan yang tergolong informal juga pada umumnya dapat dianggap bermutu, antara lain ahli komputer, pelukis ternama, dan konsultan mandiri. Mereka semua termasuk kegiatan ekonomi informal. Memindahkan 70 juta pekerja sisanya dari sektor tidak formal bukanlah target yang realistis dalam 5-10 tahun ke depan, sesuai target waktu yang kami tentukan dalam kertas kerja kami.

Kebutuhan yang mendesak dalam pandangan kami adalah 15 juta lapangan kerja bermutu dalam lima tahun ke depan bagi pekerja berlebih (*surplus worker*) yang produktivitas dan pendapatannya sangat rendah dan yang penghasilannya tidak pasti. Pekerja berlebih meliputi: Pertama, 6-8 juta pekerja di pertanian. Dari periode 1989/1991 hingga 1995/1997 jumlah pekerja di sektor pertanian turun sebesar 5 juta karena mereka menemukan pekerjaan yang lebih baik di bidang manufaktur dan sektor lainnya. Tetapi, karena krisis moneter 1997, alih-alih mengurangi, sektor pertanian justru menambah pekerja. Para pekerja ini menjadi pekerja berlebih bagi pertanian, turut serta dalam "pembagian kerja dan pendapatan" karena mereka tidak bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kedua, tambahan pengangguran sejak tahun 1997 sebesar 1-3 juta. Ketiga, tenaga kerja berlebih dalam pemerintahan, perdagangan, dan jasa secara kasar dapat diperkirakan berjumlah 2,5 juta. Ada banyak bukti kasus yang menunjukkan adanya kelebihan tenaga kerja dalam pemerintahan.

Dengan berakhirnya lonjakan harga-harga komoditas (*commodity boom*) jumlah pekerja jasa informal meningkat sebesar 2,6 juta. Sebagian besar peningkatan tersebut kemungkinan akibat dari penyerapan tenaga kerja berlebih pada kegiatan-kegiatan yang bisa diramalkan oleh pekerja tambahan. Keempat, para

pekerja migran diperkirakan telah meningkat sebesar 3-5 juta sejak tahun 1997. Banyak yang mungkin memilih pekerjaan manufaktur di Indonesia daripada menjadi pekerja rumah tangga atau pekerjaan buruh konstruksi di luar negeri. Memiliki pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja di beberapa industri itu dimungkinkan jika pertumbuhan adalah semata-mata untuk peningkatan harga-harga atau berupa pertumbuhan padat modal dan sumber daya.

Dari ketiga alasan tersebut, ternyata pertumbuhan selama boom komoditas hanya menciptakan sedikit lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja yang terbatas selama periode ini disebabkan oleh sumber pertumbuhan, bukan karena pertumbuhan itu buruk bagi lapangan kerja. Pertumbuhan di Tiongkok menghasilkan begitu banyak tambahan lapangan kerja hingga sejumlah pemberi kerja saat ini tidak dapat mengisi semua kekosongan pekerjaan. Tidak mungkin menciptakan 15 juta pekerjaan bermutu dengan pertumbuhan yang rendah. Perkiraan kami adalah bahwa peningkatan lapangan kerja di bidang manufaktur sebesar 11,2 juta secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 11 persen selama lima tahun. Jadi pertumbuhan dan lapangan kerja berjalan beriringan (dan tidak saling bertolak belakang). Lapangan kerja, investasi, dan disparitas pendapatan. Penekanan dalam penelitian kami adalah pada pertumbuhan padat karya. Tujuannya adalah untuk menciptakan permintaan tenaga kerja dan terutama permintaan untuk tenaga kerja tidak terampil dan semi-terampil, yaitu permintaan untuk tenaga kerja bagi 40 persen masyarakat termiskin.

Saat ini pemberi kerja di Indonesia membutuhkan 0,8 juta tenaga kerja per tahun, tetapi jumlah angkatan kerja mencapai 2 juta. Ketika permintaan meningkat kurang dari pasokan, harga tenaga kerja, yaitu upah, biasanya turun. Itulah mengapa upah riil pekerja pertanian turun. Upah untuk pekerja industri, didorong oleh upah minimum dan tekanan serikat pekerja, meningkat. Namun, dari 1997-2013 peningkatan rata-rata tersebut hanya 2,4 persen per tahun karena “pasokan cadangan pengangguran” yang siap untuk mengambil posisi para pekerja menekan upah turun. Jadi, tujuannya adalah mendorong permintaan kerja meningkat lebih cepat dari pasokan sehingga upah juga meningkat lebih cepat. Dengan demikian akan lebih banyak anggota keluarga memiliki pekerjaan bermutu dan daya tawar pekerja pun akan meningkat. Pertumbuhan yang mendorong penciptaan lapangan kerja adalah pertumbuhan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih adil.

7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	% L	% P	% L+P
1	Nias	47,34	52,65	1,02
2	Mandailing Natal	53,35	46,64	3,14
3	Tapanuli Selatan	52,00	47,99	2,11
4	Tapanuli Tengah	55,55	44,44	2,55
5	Tapanuli Utara	50,25	49,74	2,36
6	Toba Samosir	50,88	49,11	1,43
7	Labuhan Batu	67,22	32,77	3,00
8	Asahan	66,17	33,82	4,55
9	Simalungun	58,13	41,87	6,39
10	Dairi	51,03	48,96	2,27
11	Karo	51,10	48,89	3,41
12	Deli Serdang	67,37	32,62	13,48
13	Langkat	65,05	34,94	7,18
14	Nias Selatan	53,44	46,55	2,18
15	Humbang Hasundutan	50,55	49,44	1,45
16	Pakpak Barat	51,63	48,36	0,37
17	Samosir	50,15	49,84	1,04
18	Serdang Bedagai	64,38	35,61	4,15
19	Batu Bara	69,24	30,75	2,42
20	Padang Lawas Utara	56,12	43,87	1,85
21	Padang Lawas	59,20	40,79	1,78
22	Labuhan Batu Selatan	63,11	36,88	2,09
23	Labuhan Batu Utara	65,10	34,89	2,46
24	Nias Utara	52,09	47,90	0,97
25	Nias Barat	48,01	51,98	0,66
26	Sibolga	58,29	41,70	0,66
27	Tanjung Balai	65,14	34,85	1,15
28	Pematang Siantar	55,4	44,6	1,96
29	Tebing Tinggi	62,83	37,16	1,13

30	Medan	59,51	40,48	15,99
31	Binjai	62,46	37,53	2,01
32	Padang Sidmpuan	56,68	43,31	1,53
33	Gunung Sitoli	46,53	53,46	1,13

Sumber data : BPS

Berdasarkan tabel 7.1 persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi untuk jenis kelamin laki-laki yaitu 69,243% terletak di Kabupaten Batu Bara dan jenis kelamin perempuan yaitu 53,462% terletak di Kota Gunung Sitoli.



Gambar 7.1. Grafik Persentase Tingkat Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

7.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

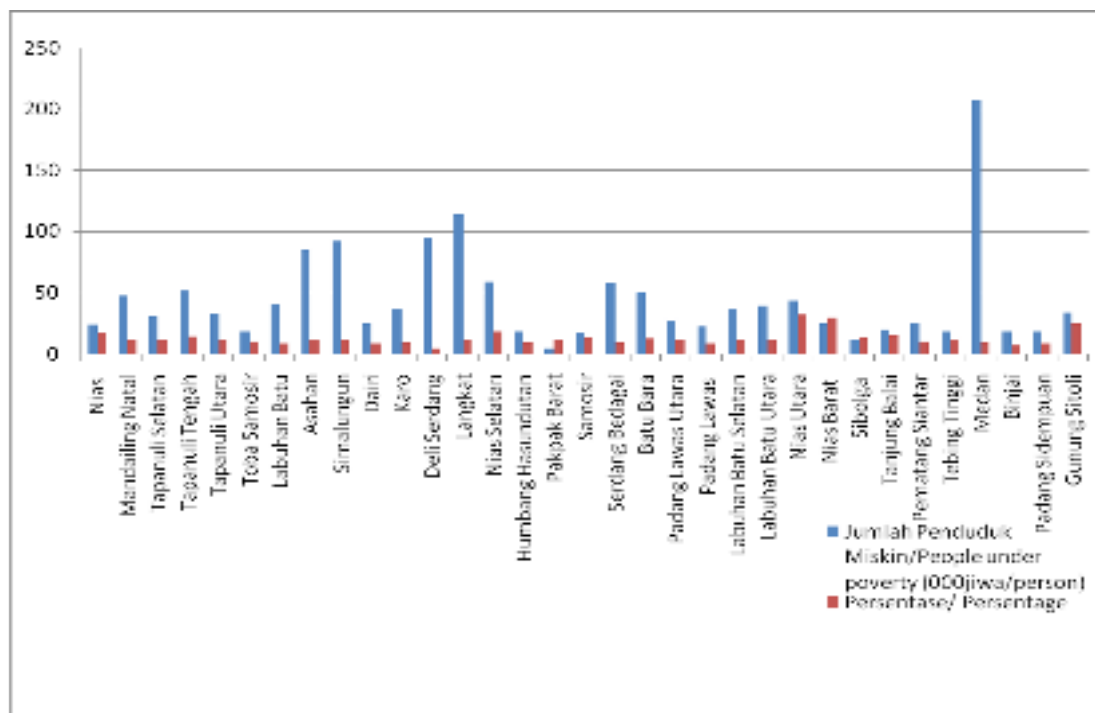
Tabel 7.2. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin/People under poverty (000jiwa/person)	Persentase/Percentage
Nias	24,53	18,05
Mandailing Natal	47,79	11,13
Tapanuli Selatan	31,20	11,37
Tapanuli Tengah	52,20	15,00
Tapanuli Utara	33,37	11,41
Toba Samosir	18,31	10,21
Labuhan Batu	41,63	8,99
Asahan	85,16	12,09
Simalungun	92,89	10,96
Dairi	25,33	9,09
Karo	37,52	9,68
Deli Serdang	95,65	4,74
Langkat	114,19	11,30
Nias Selatan	58,97	19,05
Humbang Hasundutan	19,04	9,85
Pakpak Barat	5,12	11,26
Samosir	17,64	14,11
Serdang Bedagai	58,30	9,59
Batu Bara	50,37	12,61
Padang Lawas Utara	27,67	10,97
Padang Lawas	22,38	8,73
Labuhan Batu Selatan	36,37	11,65
Labuhan Batu Utara	39,59	11,31
Nias Utara	43,74	32,62
Nias Barat	25,41	29,96
Sibolga	11,64	13,48
Tanjung Balai	20,09	15,08
Pematang Siantar	25,83	10,47
Tebing Tinggi	18,80	12,03
Medan	207,50	9,41
Binjai	18,60	7,03
Padang Sidempuan	18,36	8,77
Gunung Sitoli	34,47	25,42

Sumber data :BPS

Berdasarkan tabel 7.2 persentase jumlah penduduk miskin tertinggi terletak di

Kabupaten Nias Utara dengan nilai 32,62% untuk persentase jumlah penduduk miskin terendah terletak di Kabupaten Deli Serdang dengan nilai 4,74%.



Gambar 7.2. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Miskin

7.3 Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

di Provinsi Sumatera Utara

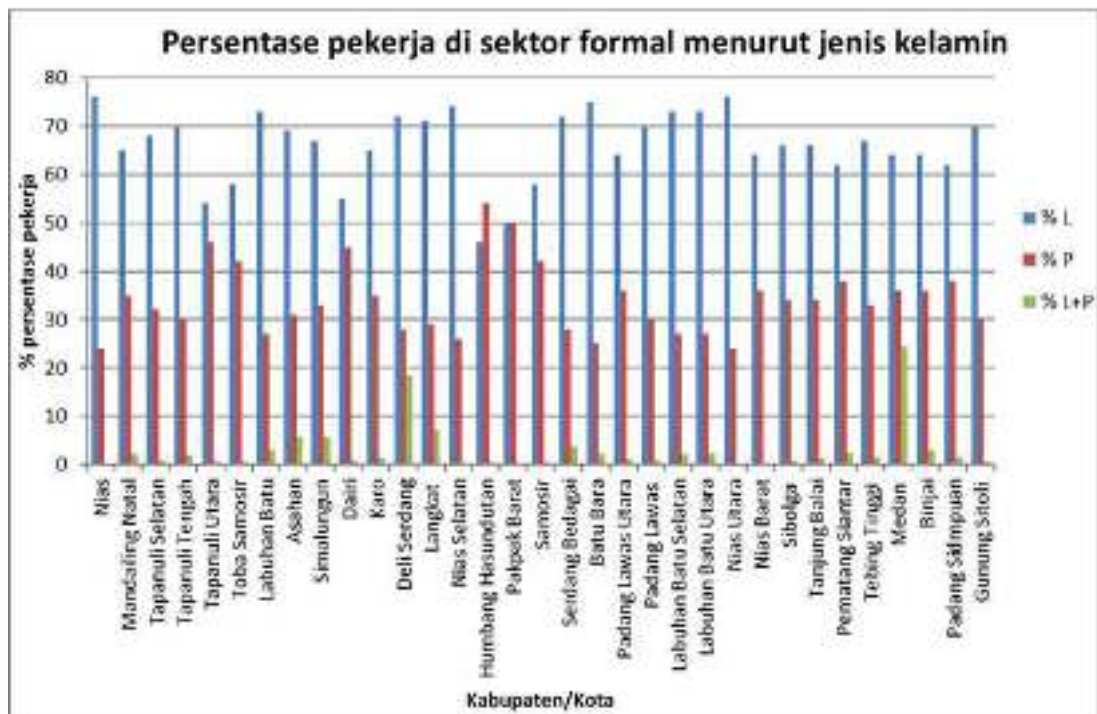
Tabel 7.3. Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No	KAB./KOTA	Pekerja di Sector formal					
		Laki-laki (L)	% L	Perempuan (P)	% P	L+P	% L+P
1	Nias	2.001	76	649	24	2.650	0.11
2	Mandailing Natal	34.265	65	18.793	35	53.058	2.23
3	Tapanuli Selatan	16.217	68	7.705	32	23.922	1.00
4	Tapanuli Tengah	34.313	70	14.460	30	48.773	2.05
5	Tapanuli Utara	8.924	54	7.721	46	16.645	0.7
6	Toba Samosir	9.619	58	6.927	42	16.546	0.69
7	Labuhan Batu	55.541	73	20.051	27	75.592	3.18
8	Asahan	93.697	69	43.018	31	136.715	5.75
9	Simalungun	91.091	67	44.842	33	135.933	5.72
10	Dairi	10.952	55	8.834	45	19.786	0.83
11	Karo	20.909	65	11.371	35	32.280	1.35
12	Deli Serdang	317.535	72	125.496	28	443.031	18.64
13	Langkat	124.130	71	49.678	29	173.808	7.31
14	Nias Selatan	6.763	74	2.420	26	9.183	0.38
15	Humbang Hasundutan	4.830	46	5.754	54	10.584	0.44
16	Pakpak Barat	1.829	50	1.798	50	3.627	0.15
17	Samosir	6.509	58	4.764	42	11.273	0.47
18	Serdang Bedagai	63.058	72	24.171	28	87.229	3.67
19	Batu Bara	40.953	75	13.473	25	54.426	2.29
20	Padang Lawas Utara	16.497	64	9.447	36	25.944	1.09
21	Padang Lawas	14.612	70	6.261	30	20.873	0.87
22	Labuhan Batu Selatan	39.917	73	14.742	27	54.659	2.3
23	Labuhan Batu Utara	44.180	73	15.965	27	60.145	2.53
24	Nias Utara	2.566	76	811	24	3.377	0.14
25	Nias Barat	2.125	64	1.211	36	3.336	0.14
26	Sibolga	14.545	66	7.422	34	21.967	0.92
27	Tanjung Balai	20.753	66	10.549	34	31.302	1.31
28	Pematang Siantar	37.343	62	22.741	38	60.084	2.52
29	Tebing Tinggi	25.462	67	12.791	33	38.253	1.61
30	Medan	374.155	64	208.369	36	582.524	24.51
31	Binjai	42.544	64	23.646	36	66.190	2.78
32	Padang Sidempuan	23.321	62	14.565	38	37.886	1.59
33	Gunung Sitoli	10.453	70	4.529	30	14.982	0.63
	Jumlah/Total	1.611.609	2.179	764.974	1.121	2.376.583	100

Sumber data: BPS

Berdasarkan tabel 7.3 persentase pekerja di sektor formal menurut jenis kelamin laki-laki tertinggi yaitu 76 % terletak di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara sedangkan jenis kelamin perempuan tertinggi yaitu 54% terletak di Kabupaten

Humbang Hasundutan.



Gambar 7.3. Grafik Persentase Pekerja di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin

7.4 Pekerja Di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.4. Pekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No	KAB./KOTA	Pekerja di Sector Informal					
		Laki-laki (L)	% L	Perempuan(P)	% P	L+P	% L+P
1	Nias	30.842	47	35.328	53	66.170	2
2	Mandailing Natal	67.843	49	70.715	51	138.558	4
3	Tapanuli Selatan	50.709	49	53.492	51	104.201	3
4	Tapanuli Tengah	52.341	48	57.159	52	109.500	3
5	Tapanuli Utara	67.397	49	69.259	51	136.656	4
6	Toba Samosir	36.048	48	38.675	52	74.723	2
7	Labuhan Batu	63.894	73	23.838	27	87.732	2
8	Asahan	91.175	65	49.108	35	140.283	4
9	Simalungun	137.816	54	115.664	46	253.480	7
10	Dairi	67.230	51	64.541	49	131.771	4
11	Karo	91.983	48	98.859	52	190.842	5

12	Deli Serdang	238.704	65	128.885	35	367.589	10
13	Langkat	153.501	63	90.597	37	244.098	7
14	Nias Selatan	72.053	52	66.627	48	138.680	4
15	Humbang Hasundutan	43.831	51	42.736	49	86.567	2
16	Pakpak Barat	10.395	51	9.857	49	20.252	1
17	Samosir	27.860	48	30.240	52	58.100	2
18	Serdang Bedagai	103.338	65	55.324	35	158.662	4
19	Batu Bara	61.740	68	29.513	32	91.253	3
20	Padang Lawas Utara	48.106	54	40.593	46	88.699	2
21	Padang Lawas	49.103	56	37.947	44	87.050	2
22	Labuhan Batu Selatan	46.039	60	31.048	40	77.087	2
23	Labuhan Batu Utara	52.082	64	28.949	36	81.031	2
24	Nias Utara	29.019	50	28.901	50	57.920	2
25	Nias Barat	17.944	46	21.335	54	39.279	1
26	Sibolga	6.547	44	8.331	56	14.878	0
27	Tanjung Balai	22.315	67	11.042	33	33.357	1
28	Pematang Siantar	24.885	49	25.816	51	50.701	1
29	Tebing Tinggi	15.344	62	9.404	38	24.748	1
30	Medan	159.167	54	134.103	46	293.270	8
31	Binjai	27.813	60	18.658	40	46.471	1
32	Padang Sidempuan	28.461	53	25.038	47	53.499	1
33	Gunung Sitoli	18.852	49	19.762	51	38.614	1
	PROVSU	2.014.377	1,812	1.571.344	1,488	3.585.721	98

Sumberdata : BPS

Berdasarkan tabel 7.4 persentase pekerja di sektor informal menurut jenis kelamin laki-laki tertinggi yaitu 73% terletak di Kabupaten Labuhan Batu dan jenis kelamin perempuan tertinggi yaitu 56% yang terletak di Kota Sibolga.



Gambar 7.4. Grafik Persentase Pekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin

7.5 Jumlah Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

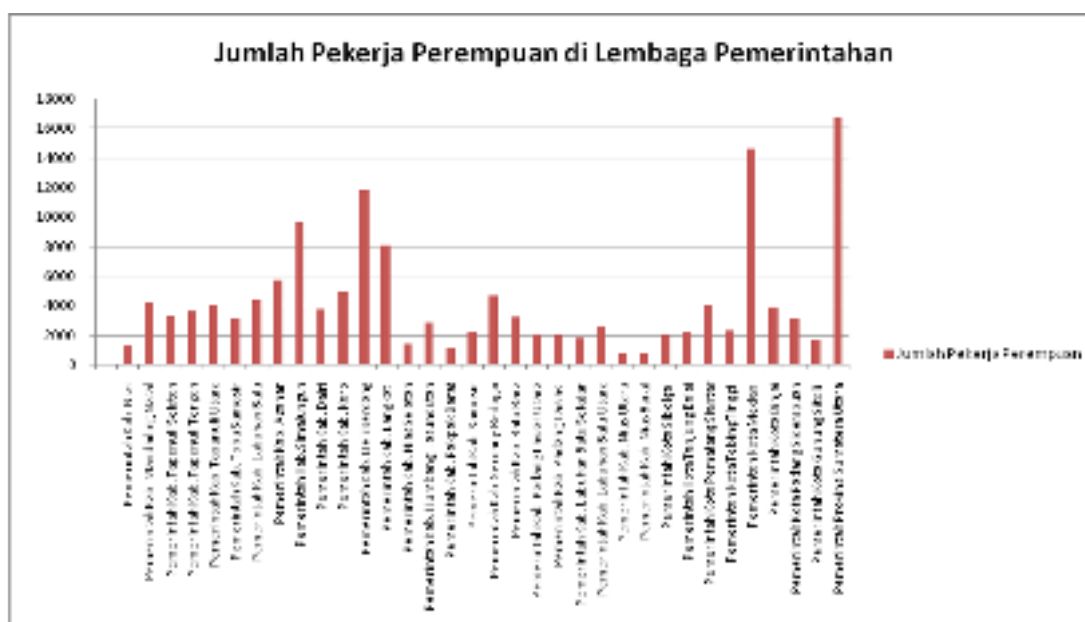
Tabel 7.5. Jumlah Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	KAB/KOTA	Jumlah Pekerja Perempuan
1	Pemerintah Kab. Nias	1.325
2	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	4.216
3	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	3.378
4	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	3.608
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	4.132
6	Pemerintah Kab. Toba Samosir	3.082
7	Pemerintah Kab. Labuhan Batu	4.385
8	Pemerintah Kab. Asahan	5.752
9	Pemerintah Kab.Simalungun	9.645
10	Pemerintah Kab. Dairi	3.809
11	Pemerintah Kab. Karo	4.957
12	Pemerintah Kab. Deli Serdang	11.817
13	Pemerintah Kab. Langkat	8.153
14	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1.439
15	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2.864
16	Pemerintah Kab. Pakpak Barat	1.215
17	Pemerintah Kab. Samosir	2.183
18	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	4.692
19	Pemerintah Kab. Batu Bara	3.268
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	2.151
21	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2.020
22	Pemerintah Kab. Labuhan Batu Selatan	1.842

23	Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara	2.680
24	Pemerintah Kab. Nias Utara	761
25	Pemerintah Kab. Nias Barat	736
26	Pemerintah Kota Sibolga	2.017
27	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.210
28	Pemerintah Kota Pematang Siantar	4.113
29	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2.363
30	Pemerintah Kota Medan	14.627
31	Pemerintah Kota Binjai	3.958
32	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	3.124
33	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	1.713
33	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	16.730
	Jumlah	144.965

Sumber data : BKN

Berdasarkan tabel 7.5 persentase jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan tertinggi yaitu 16.730 yang terletak di Lembaga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diurutan kedua sebanyak 14.627 di Lembaga Pemerintah Kota Medan dan diurutan ketiga sebanyak 11.817 di Lembaga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 7.5. Grafik Jumlah Pekerja Di Lembaga Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin

7.6 Jumlah Pekerja Di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.6. Jumlah Pekerja Di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	Jumlah Pekerja				L+P	% L+P
		L	%	P	%		
1	Nias	30.842	47	35.328	53	66.170	1,84
2	Mandailing Natal	67.843	49	70.715	51	138.558	3,86
3	Tapanuli Selatan	50.709	49	53.492	51	104.201	2,90
4	Tapanuli Tengah	52.341	48	57.159	52	109.500	3,05
5	Tapanuli Utara	67.397	49	69.259	51	136.656	3,81
6	Toba Samosir	36.048	48	38.675	52	74.723	2,08
7	Labuhan Batu	63.894	73	23.838	27	87.732	2,44
8	Asahan	91.175	65	49.108	35	140.283	3,91
9	Simalungun	137.816	54	115.664	46	253.480	7,06
10	Dairi	67.230	51	64.541	49	131.771	3,67
11	Karo	91.983	48	98.859	52	190.842	5,32
12	Deli Serdang	238.704	65	128.885	35	367.589	10,25
13	Langkat	153.501	63	90.597	37	244.098	6,80
14	Nias Selatan	72.053	52	66.627	48	138.680	3,86
15	Humbang	43.831	51	42.736	49	86.567	2,41
16	Pakpak Barat	10.395	51	9.857	49	20.252	0,56
17	Samosir	27.860	48	30.240	52	58.100	1,62
18	Serdang Bedagai	103.338	65	55.324	35	158.662	4,42
19	Batu Bara	61.740	68	29.513	32	91.253	2,54
20	Padang Lawas	48.106	54	40.593	46	88.699	2,47
21	Padang Lawas	49.103	56	37.947	44	87.050	2,42
22	Labuhan Batu	46.039	60	31.048	40	77.087	2,15
23	Labuhan Batu	52.082	64	28.949	36	81.031	2,26
24	Nias Utara	29.019	50	28.901	50	57.920	1,61
25	Nias Barat	17.944	46	21.335	54	39.279	1,09
26	Sibolga	6.547	44	8.331	56	14.878	0,41
27	Tanjung Balai	22.315	67	11.042	33	33.357	0,93
28	Pematang Siantar	24.885	49	25.816	51	50.701	1,41
29	Tebing Tinggi	15.344	62	9.404	38	24.748	0,69
30	Medan	159.167	54	134.103	46	293.270	8,17
31	Binjai	27.813	60	18.658	40	46.471	1,29
32	Padang	28.461	53	25.038	47	53.499	1,49
33	Gunung Sitoli	18.852	49	19.762	51	38.614	1,07
	Provsu	2.014.377	56	1.571.344	44	3.585.721	100

Sumber data : BPS

Berdasarkan tabel 7.6 persentase jumlah pekerja di lembaga non pemerintahan menurut jenis kelamin laki-laki yaitu 73 % yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu sedangkan untuk jenis perempuan yaitu 56 % yang terletak di Kota Sibolga.



Gambar 7.6. Grafik Jumlah Pekerja Di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin

7.7 Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.7. Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No	KAB./KOTA	Keanggotaan Koperasi				L+P	% L+P
		Laki-laki (L)	%	Perempuan (P)	%		
1	Nias	5.024	63	2.923	37	7.947	1,13
2	Mandailing Natal	7.688	62	4.650	38	12.338	1,75
3	Tapanuli Selatan	8.455	93	662	7	9.117	1,29
4	Tapanuli Tengah	9.454	62	5.846	38	15.300	2,18
5	Tapanuli Utara	21.221	100	0	0	21.221	3,02
6	Toba Samosir	6.425	52	5.836	48	12.261	1,74
7	Labuhan Batu	17.891	75	5.975	25	23.866	3,4
8	Asahan	29.986	74	10.464	26	40.450	5,76
9	Simalungun	12.740	67	6.271	33	19.011	2,70
10	Dairi	10.659	81	2.478	19	13.137	1,87
11	Karo	30.897	55	25.642	45	56.539	8,05
12	Deli Serdang	44.005	88	6.272	12	50.277	7,16
13	Langkat	20.941	75	6.927	25	27.868	3,97
14	Nias Selatan	6.202	47	6.861	53	13.063	1,86
15	Humbang Hasundutan	1.590	56	1.258	44	2.848	0,40
16	Pakpak Barat	8.824	62	5.431	38	14.255	2,03
17	Samosir	10.157	59	7.045	41	17.202	2,45
18	Serdang Bedagai	12.394	61	7.877	39	20.271	2,88
19	Batu Bara	14.683	78	4.044	22	18.727	2,66
20	Padang Lawas Utara	4.641	73	1.716	27	6.357	0,90
21	Padang Lawas	1.336	64	755	36	2.091	0,29
22	Labuhan Batu Selatan	5.136	97	153	3	5.289	0,75
23	Labuhan Batu Utara	3.831	69	1.754	31	5.585	0,79
24	Nias Utara	1.824	58	1.348	42	3.172	0,45
25	Nias Barat	609	45	734	55	1.343	0,19
26	Sibolga	5.747	45	7.166	55	12.913	1,84
27	Tanjung Balai	6.163	59	4.327	41	10.490	1,49

28	Pematang Siantar	7.960	64	4.497	36	12457	1,77
29	Tebing Tinggi	72.787	92	6.489	8	79.276	11,29
30	Medan	58.408	61	36.629	39	95.037	13,54
31	Binjai	7.623	52	7.138	48	14.761	2,10
32	Padang Sidmpuan	133	100	0	0	133	0,01
33	Gunung Sitoli	54.334	95	2.938	5	57.272	8,16
	PROVSU	509.768	73	192.106	27	701.874	100

Sumberdata : Dinas UKM dan Koperasi

Berdasarkan tabel 7.7 persentase keanggotaan koperasi menurut jenis kelamin laki-laki tertinggi yaitu 100 % di Kabupaten Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan jenis kelamin perempuan tertinggi yaitu 55 % di Kota Sibolga dan Kabupaten Nias Barat.



Gambar 7.7. Grafik Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin

7.8 Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.8. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	Pengangguran Terbuka				L+P	% L+P
		Laki-laki (L)	%	Perempuan (P)	%		
1	Nias	175	27.26	467	72,74	642	0,15
2	Mandailing Natal	6.338	53.94	5.412	46,06	11.750	2,74
3	Tapanuli Selatan	4.040	50.16	4.014	49,84	8.054	1,87
4	Tapanuli Tengah	5.240	63.22	3.048	36,78	8.288	1,93
5	Tapanuli Utara	2.382	59.12	1.647	40,88	4.029	0,94
6	Toba Samosir	2.055	62.71	1.222	37,29	3.277	0,76
7	Labuhan Batu	9.295	44.26	11.704	55,74	20.999	4,89
8	Asahan	10.538	61.55	6.582	38,45	17.120	3,99
9	Simalungun	12.529	52.77	11.212	47,23	23.741	5,53
10	Dairi	566	29.33	1.364	70,67	1.930	0,45
11	Karo	3.164	62.22	1.921	37,78	5.085	1,18
12	Deli Serdang	32.191	58.24	23.086	41,76	55.277	12,89
13	Langkat	20.817	57.12	15.627	42,88	3.444	8.49
14	Nias Selatan	423	70.97	173	29,03	596	0,13
15	Humbang Hasundutan	834	69.67	363	30,33	1.197	0,27
16	Pakpak Barat	419	59.1	290	40,9	709	0,16
17	Samosir	665	73.97	234	26,03	899	0,21
18	Serdang Bedagai	8.200	43.13	10.811	56,87	19.011	4,43
19	Batu Bara	5.900	59.99	3.935	40,01	9.835	2,29
20	Padang Lawas Utara	3.265	53.99	2.782	46,01	6.047	1,41
21	Padang Lawas	4.130	60.5	2.697	39,5	6.827	1,59
22	Labuhan Batu Selatan	2.195	38.52	3.503	61,48	5.698	1,32
23	Labuhan Batu Utara	6.634	49.02	6.899	50,98	13.533	3,15
24	Nias Utara	1.511	58.89	1.055	41,11	2.566	0,59
25	Nias Barat	821	63.11	480	36,89	1.301	0,30

26	Sibolga	2.647	62.87	1.563	37,13	4.210	0,98
27	Tanjung Balai	4.238	58.58	2.996	41,42	7.234	1,68
28	Pematang Siantar	5.996	51.72	5.597	48,28	11.593	2,70
29	Tebing Tinggi	4.016	54.56	3.345	45,44	7.361	1,71
30	Medan	58.398	53.95	49.845	46,05	108.243	25,24
31	Binjai	7.823	62.53	4.688	37,47	12.511	2,91
32	Padang Sidmpuan	3.885	56.84	2.950	43,16	6.835	1,59
33	Gunung Sitoli	3.308	55.58	2.644	44,42	5.952	1,38
	PROVSU	234.638	54.7	194.156	45,3	428.794	100

Sumberdata : BPS

Berdasarkan tabel 7.8 persentase jumlah pengangguran terbuka menurut jenis kelamin laki-laki tertinggi yaitu 73,97 % di Kabupaten Samosir sedangkan jenis kelamin perempuan tertinggi yaitu 72,74 % di Kabupaten Nias Nias.



Gambar 7.8. Grafik Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin

7.9 Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

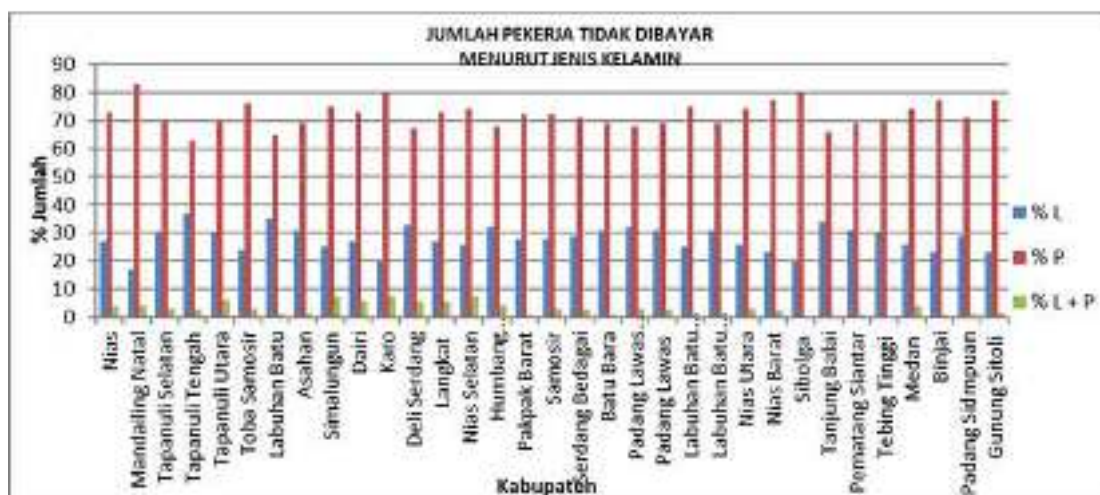
Tabel 7.9. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

No	KAB./KOTA	Pekerja Tidak di Bayar				L+P	% L+P
		Laki-laki(L)	%	Perempuan(P)	%		
1	Nias	10.500	27	27.909	73	38.409	3.73
2	Mandailing Natal	7.249	17	35.444	83	42.693	4.15
3	Tapanuli Selatan	9.825	30	23.136	70	32.961	3.2
4	Tapanuli Tengah	10.872	37	18.466	63	29.338	2.85
5	Tapanuli Utara	19.265	30	44.699	70	63.964	6.21
6	Toba Samosir	7.898	24	25.669	76	33.567	3.26
7	Labuhan Batu	4.382	35	8.183	65	12.565	1.22
8	Asahan	4.512	31	9.900	69	14.412	1.4
9	Simalungun	18.685	25	57.458	75	76.143	7.39
10	Dairi	16.641	27	44.159	73	60.800	5.9
11	Karo	15.481	20	60.562	80	76.043	7.38
12	Deli Serdang	18.048	33	37.142	67	55.190	5.36
13	Langkat	14.738	27	40.758	73	55.496	5.39
14	Nias Selatan	19.753	26	56.239	74	75.992	7.38
15	Humbang Hasundutan	13.836	32	29.164	68	43.000	4.17
16	Pakpak Barat	2.765	28	7.093	72	9.858	0.96
17	Samosir	8.554	28	22.281	72	30.835	2.99
18	Serdang Bedagai	8.283	29	20.031	71	28.314	2.75
19	Batu Bara	2.182	31	4.764	69	6.946	0.67
20	Padang Lawas Utara	10.266	32	21.525	68	31.791	3.09
21	Padang Lawas	8.207	31	18.631	69	26.838	2.61
22	Labuhan Batu Selatan	3.764	25	11.109	75	14.873	1.44
23	Labuhan Batu Utara	5.664	31	12.764	69	1.,428	1.79
24	Nias Utara	8.412	26	23.622	74	32.034	3.11
25	Nias Barat	5.313	23	17.418	77	22.731	2.21
26	Sibolga	762	20	3.114	80	3.876	0.38

27	Tanjung Balai	1.131	34	2.243	66	3.374	0.33
28	Pematang Siantar	3.027	31	6.595	69	9.622	0.93
29	Tebing Tinggi	995	30	2.313	70	3.308	0.32
30	Medan	10.860	26	30.676	74	41.536	4.03
31	Binjai	1.951	23	6.705	77	8.656	0.84
32	Padang Sidmpuan	3.258	29	7.884	71	11.142	1.08
33	Gunung Sitoli	3.431	23	11.787	77	15.218	1.48
	PROVSU	280.510	27	749.443	73	1.029.953	100

Sumberdata : BPS

Berdasarkan tabel 7.9 persentase jumlah pekerja tidak dibayar menurut jenis kelamin laki-laki tertinggi yaitu 35 % di Kabupaten Labuhan Batu sedangkan jenis kelamin perempuan tertinggi yaitu 83 % di Kabupaten Mandailing Natal.



Gambar 7.9. Grafik Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Menuru Jenis Kelamin

7.10 Jumlah Dan Persentase Perempuan Pekerja Profesional Dan Manajerial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.10. Jumlah Dan Persentase Perempuan Pekerja Profesional Dan Manajerial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	UMUR	PEREMPUAN PEKERJA PROFESIONAL DAN MANAJERIAL	
		JUMLAH	PERSENTASE
1	15 - 19	177.586	27,28
2	20 - 24	331.593	55,47
3	25 - 29	315.247	57,57
4	30 - 34	299.057	57,43
5	35 - 39	286.375	58,84
6	40 - 44	285.020	63,89
7	45 - 49	265.423	65,69
8	50 - 54	220.243	62,51
9	55 - 59	162.416	57,01
10	60 +	187.514	35,97
JUMLAH		2.530.474	52,58

Sumberdata : BPS

Berdasarkan tabel 7.10 jumlah dan persentase perempuan pekerja profesional dan manajerial menurut kelompok umur tercatat jumlah tertinggi berada di kelompok umur 20-24 tahun yaitu 331.593 orang dari 2.530.474 orang (55,47%).



Gambar 7.10. Grafik Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial

7.11 Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.11. Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin dan

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin	Lapangan Usaha		
			1	2	3
			Pertanian/ Agriculture	Manufaktur/ Manufacture	Jasa-jasa / Services
1	Nias	L	29.289	644	2.910
		P	33.605	242	2.130
		L+P	62.894	886	5.040
2	Mandailing Natal	L	57.902	15.905	28.301
		P	50.400	5.267	33.841
		L+P	108.302	21,172	62,142
3	Tapanuli Selatan	L	45.481	6.667	14.778
		P	42.146	2.449	16.602
		L+P	87.627	9.116	31.380
4	Tapanuli Tengah	L	47.285	8.139	31.230
		P	39.296	1.387	30.936
		L+P	86.581	9.526	62.166
5	Tapanuli Utara	L	57.160	3.789	15.372
		P	60.442	4.298	12.240
		L+P	117.602	8.087	27.612
6	Toba Samosir	L	27.177	4.796	13.694
		P	28.535	1.370	15.697
		L+P	55.712	6.166	29.391
7	Labuhan Batu	L	67.897	13.221	38.317
		P	28.535	1.370	15.697
		L+P	80.930	15.756	66.638
8	Asahan	L	86.349	45.452	53.071
		P	21.088	13.971	57.067
		L+P	107.437	59.423	110.138
9	Simalungun	L	130.075	34.393	64.439
		P	78.406	8.541	73.559
		L+P	208.481	42.934	137.998
10	Dairi	L	55.433	4.265	18.484
		P	55.035	1.249	17.091
		L+P	110.468	5.514	35.575
11	Karo	L	77.415	8.396	27.081
		P	81.517	665	28.048
		L+P	158.932	9.061	55.129
12	Deli Serdang	L	84.333	199.526	272.380
		P	36.837	37.381	180.163
		L+P	121.170	236.907	452.543
13	Langkat	L	119.430	54.094	104.107
		P	46.677	8.597	85.001

		L+P	166.107	62.691	189.108
14	Nias Selatan	L	68.015	2.396	8.405
		P	65.632	0	3.415
		L+P	133.647	2.396	11.820
15	Humbang Hasundutan	L	36.559	3.040	9.062
		P	39.091	0	9.399
		L+P	75.650	3.040	18.461
16	Pakpak Barat	L	9.051	466	2.707
		P	9.725	0	1.930
		L+P	18.776	466	4.637
17	Samosir	L	23.938	980	9.451
		P	25.421	835	8.748
		L+P	49.359	1,815	18.199
18	Serdang Bedagai	L	83.212	37,687	45.497
		P	23.603	8,856	47.036
		L+P	106.815	46,543	92.533
19	Batu Bara	L	54.241	19,123	29.329
		P	12.983	3,213	26.790
		L+P	67.224	22,336	56.119
20	Padang Lawas Utara	L	48.100	3,111	13.392
		P	33.905	181	15.954
		L+P	82.005	3,292	29.346
21	Padang Lawas	L	47.621	3,449	12.645
		P	27.341	1.782	15.085
		L+P	74.962	5.231	27.730
22	Labuhan Batu Selatan	L	60.599	2.328	23.029
		P	25.125	114	20.551
		L+P	85.724	2.442	43.580
23	Labuhan Batu Utara	L	64.299	8.124	23.839
		P	20,161	1.431	23.322
		L+P	84.460	9.555	47.161
24	Nias Utara	L	27.705	860	3.020
		P	28.431	82	1.199
		L+P	56.136	942	4.219
25	Nias Barat	L	17.785	725	1.559
		P	21.089	0	1.457
		L+P	38.874	725	3.016
26	Sibolga	L	3.712	2,174	15,206
		P	243	1.388	14.122
		L+P	3.955	3.562	29.328
27	Tanjung Balai	L	12.152	5.391	25.525
		P	559	1.165	19.867
		L+P	12.711	6.556	45.392
28	Pematang Siantar	L	3.508	12.590	46.130

		P	3.164	5.250	40.143
		L+P	6.672	17.840	86.273
29	Tebing Tinggi	L	5.157	8.289	27.360
		P	692	860	20.643
		L+P	5.849	9.149	48.003
30	Medan	L	32.053	135.630	365.639
		P	2.088	44.757	295.627
		L+P	34.141	180.387	661.266
31	Binjai	L	6.067	21.902	42.388
		P	1,073	5.916	35.315
		L+P	7.140	27.818	77.703
32	Padang Sidmpuan	L	8.858	10.912	3.,012
		P	9.988	852	28.763
		L+P	18.846	11.764	60.775
33	Gunung Sitoli	L	11.989	4.153	13.163
		P	14.960	546	8.785
		L+P	26.949	4.699	21.948
Jumlah		L	1.509.847	682.617	1.433.522
		P	952.291	165.180	1.218.847
		L+P	2.462.138	847.797	2.652.369

Sumberdata : BPS

Berdasarkan tabel 7.11 jumlah pekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin pada sektor pertanian untuk laki-laki tertinggi di Kabupaten Simalungun dengan jumlah 130.075, di sektor manufaktur tertinggi di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah 199.526 orang dan di sektor jasa-jasa tertinggi di Kota Medan dengan jumlah 365.639 sedangkan untuk perempuan di sektor pertanian tertinggi di Kabupaten Karo dengan jumlah 81.517, di sektor manufaktur tertinggi terletak di Kota Medan dengan jumlah 44.757 dan di sektor jasa-jasa tertinggi terletak di Kota Medan dengan jumlah 295.627.



Gambar 7.11. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki



Gambar 7.12. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Perempuan



Gambar 7.13. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki+Perempuan

7.12 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 7.12. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016**

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin	StatusPekerjaan							
			1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
1	NIAS	L	1.286	19.056	0	2.001	0	0	10.500	32.843
		P	2.053	5.366	0	649	0	0	27.909	35.977
		L+P	3.339	24.422	0	2.650	0	0	38.409	68.820
2	MANDAILING NATAL	L	23.931	31.337	2.957	31.308	1.080	4.246	7.249	102.108
		P	17.713	13.978	684	18.109	1.323	2.257	35.444	89.508
		L+P	41.644	45.315	3.641	49.417	2.403	6.503	42.693	191.616
3	Tapanuli Selatan	L	21.601	15.900	1.032	15.185	526	2.857	9.825	66.926
		P	12.507	16.797	483	7.222	1.005	47	23.136	61.197
		L+P	34.108	32.697	1.515	22.407	1.531	2.904	32.961	128.123
4	Tapanuli Tengah	L	21.348	15.154	1.085	33.228	2.024	2.943	10.872	86.654
		P	17.892	19.421	305	14.155	1.138	242	18.466	71.619
		L+P	39.240	34.575	1.390	47.383	3.162	3.185	29.338	158.273
5	Tapanuli Utara	L	10.226	35.340	522	8.402	494	2.072	19.265	76.321
		P	13.007	10.841	746	6.975	195	517	44.699	76.980
		L+P	23.233	46.181	1.268	15.377	689	2.589	63.964	153.301
6	Toba Samosir	L	4.259	21.785	666	8.953	109	1.997	7.898	45.667
		P	5.111	7.450	428	6.499	445	0	25.669	45.602
		L+P	9.370	29.235	1.094	15.452	554	1.997	33.567	91.269
7	Labuhan Batu	L	23.472	16.925	7.603	47.938	15.827	3.288	4.382	119.435
		P	11.810	1.477	1.257	18.794	787	1.581	8.183	43.889
		L+P	35.282	18.402	8.860	66.732	16.614	4.869	12.565	163.324
8	Asahan	L	30.829	26.526	12.257	81.440	7.097	22.211	4.512	184.872

		P	21.055	7.249	3.204	39.814	2.961	7.943	9.900	92.126
		L+P	51.884	33.775	15.461	121.254	10.058	30.154	14.412	276.998
9	Simalungun	L	52.889	37.674	5.918	85.173	11.755	16.813	18.685	228.907
		P	33.671	12.486	580	44.262	9.271	2.778	57.458	160.506
		L+P	86.560	50.160	6.498	129.435	21.026	19.591	76.143	389.413
10	Dairi	L	8.206	36.026	1.521	9.431	2.555	3.802	16.641	78.182
		P	6.920	11.281	1.051	7.783	2.181	0	44.159	73.375
		L+P	15.126	47.307	2.572	17.214	4.736	3.802	60.800	151.557
11	Karo	L	7.544	60.166	4.382	16.527	4.444	4.348	15.481	112.892
		P	14.879	14.756	1.163	10.208	7.705	957	60.562	110.230
		L+P	22.423	74.922	5.545	26.735	12.149	5.305	76.043	223.122
12	Deli Serdang	L	109.960	38.715	16.053	301.482	15.308	56.673	18.048	556.239
		P	60.157	11.466	3.879	121.617	6.950	13.170	37.142	254.381
		L+P	170.117	50.181	19.932	423.099	22.258	69.843	55.190	810.620
13	Langkat	L	67.023	35.537	13.419	110.711	16.439	19.764	14.738	277.631
		P	29.401	7.980	5.949	43.729	6.011	6.447	40.758	140.275
		L+P	96.424	43.517	19.368	154.440	22.450	26.211	55.496	417.906
14	Nias Selatan	L	7.519	44.182	584	6.179	147	452	19.753	78.816
		P	2.464	7.273	206	2.214	651	0	56.239	69.047
		L+P	9.983	51.455	790	8.393	798	452	75.992	147.863
15	Humbang Hasundutan	L	6.009	21.456	564	4.266	493	2.037	13.836	48.661
		P	4.261	9.064	651	5.103	247	0	29.164	48.490
		L+P	10.270	30.520	1.215	9.369	740	2.037	43.000	97.151
16	Pakpak Barat	L	1.466	5.493	8	1.821	77	594	2.765	12.224
		P	527	2.237	0	1.798	0	0	7.093	11.655
		L+P	1.993	7.730	8	3.619	77	594	9.858	23.879
17	Samosir	L	3.396	15.700	1.061	5.448	210	0	8.554	34.369
		P	3.599	4.029	561	4.203	331	0	22.281	35.004

		L+P	6.995	19.729	1.622	9.651	541	0	30.835	69.373
18	Serdang Bedagai	L	31.298	29.436	8.483	54.575	13.160	21.161	8.283	166.396
		P	16.847	11.300	2.152	22.019	4.264	2.882	20.031	79.495
		L+P	48.145	40.736	10.635	76.594	17.424	24.043	28.314	245.891
19	Batu Bara	L	16.877	20.644	2.770	38.183	12.050	9.987	2.182	102.693
		P	13.100	9.031	629	12.844	1.080	1.538	4.764	42.986
		L+P	29.977	29.675	3.399	51.027	13.130	11.525	6.946	145.679
20	Padang Lawas Utara	L	10.170	21.692	2.470	14.027	4.345	1.633	10.266	64.603
		P	9.602	8.513	356	9.091	758	195	21.525	50.040
		L+P	19.772	30.205	2.826	23.118	5.103	1.828	31.791	114.643
21	Padang Lawas	L	13.139	22.882	3.444	11.168	4.297	578	8.207	63.715
		P	8.984	9.157	1.378	4.883	951	224	18.631	44.208
		L+P	22.123	32.039	4.822	16.051	5.248	802	26.838	107.923
22	Labuhan Batu Selatan	L	18.228	15.687	5.152	34.765	5.126	3.234	3.764	85.956
		P	8.911	9.463	1.404	13.338	919	646	11.109	45.790
		L+P	27.139	25.150	6.556	48.103	6.045	3.880	14.873	131.746
23	Labuhan Batu Utara	L	20.931	8.499	7.464	36.716	12.707	4.281	5.664	96.262
		P	7.964	4.590	3.292	12.673	1.170	2.461	12.764	44.914
		L+P	28.895	13.089	10.756	49.389	13.877	6.742	18.428	141.176
24	Nias Utara	L	2.281	17.227	526	2.040	237	862	8.412	31.585
		P	1.851	3.321	0	811	65	42	23.622	29.712
		L+P	4.132	20.548	526	2.851	302	904	32.034	61.297
25	Nias Barat	L	392	11.903	0	2.125	0	336	5.313	20.069
		P	552	3.300	0	1.211	65	0	17.418	22.546
		L+P	944	15.203	0	3.336	65	336	22.731	42.615
26	Sibolga	L	3.535	1.425	1.108	13.437	104	721	762	21.092
		P	3.913	1.024	218	7.204	0	280	3.114	15.753
		L+P	7.448	2.449	1.326	20.641	104	1.001	3.876	36.845

27	Tanjung Balai	L	8.393	4.334	2.671	18.082	4.468	3.989	1.131	43.068
		P	5.055	1.753	202	10.347	0	1.991	2.243	21.591
		L+P	13.448	6.087	2.873	28.429	4.468	5.980	3.374	64.659
28	Pematang Siantar	L	7.930	6.568	2.911	34.432	345	7.015	3.027	62.228
		P	13.268	2.614	797	21.944	542	2.797	6.595	48.557
		L+P	21.198	9.182	3.708	56.376	887	9.812	9.622	110.785
29	Tebing Tinggi	L	11.604	1.337	2.278	23.184	554	854	995	40.806
		P	5.050	1.425	775	12.016	0	616	2.313	22.195
		L+P	16.654	2.762	3.053	35.200	554	1.470	3.308	63.001
30	Medan	L	85.081	27.844	27.428	346.727	2.608	32.774	10.860	533.322
		P	66.557	16.412	7.831	200.538	0	20.458	30.676	342.472
		L+P	151.638	44.256	35.259	547.265	2.608	53.232	41.536	875.794
31	Binjai	L	17.699	5.235	654	41.890	491	2.437	1.951	70.357
		P	8.528	1.885	886	22.760	15	1.525	6.705	42.304
		L+P	26.227	7.120	1.540	64.650	506	3.962	8.656	112.661
32	Padang Sidmpuan	L	14.208	6.463	1.997	21.324	458	4.074	3.258	51.782
		P	10.315	4.813	788	13.777	826	1.200	7.884	39.603
		L+P	24.523	11.276	2.785	35.101	1.284	5.274	11.142	91.385
33	Gunung Sitoli	L	7.563	5.793	782	9.671	595	1.470	3.431	29.305
		P	4.126	3.122	523	4.006	406	321	11.787	24.291
		L+P	11.689	8.915	1.305	13.677	1.001	1.791	15.218	53.596
PROVSU		L	670.293	683.941	139.770	1.471.839	140.130	239.503	280.510	3.625.986
		P	441.650	254.874	42.378	722.596	52.262	73.115	749.443	2.336.318
		L+P	1.111.943	938.815	182.148	2.194.435	192.392	312.618	1.029.953	5.962.304

Keterangan Kolom Tabel 7.12

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| 1. Berusaha Sendiri | 4. Buruh/Karyawan | 7. Pekerja tak |
| 2. Berusaha Dibantu (buruh tidak tetap) | 5. Pekerja Bebas di Pertanian | dibayar |
| 3. Berusaha Dibantu (buruh tidak tetap) | 6. Pekerja Bebas Non Pertanian | |

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH					
		L	% L	P	% P	L+P	% L+P
1	Nias	32.843	47,72	35.977	52,28	68.820	1,15
2	Mandailing Natal	102.108	53,29	89.508	46,71	191.616	3,21
3	Tapanuli Selatan	66.926	52,24	61.197	47,76	128.123	2,14
4	Tapanuli Tengah	86.654	54,75	71.619	45,25	158.273	2,65
5	Tapanuli Utara	76.321	49,79	76.980	50,21	153.301	2,57
6	Toba Samosir	45.667	50,04	45.602	49,96	91.269	1,53
7	Labuhan Batu	119.435	73,13	43.889	26,87	163.324	2,73
8	Asahan	184.872	66,74	92.126	33,26	276.998	4,64
9	Simalungun	228.907	58,78	160.506	41,22	389.413	6,53
10	Dairi	78.182	51,59	73.375	48,41	151.557	2,54
11	Karo	112.892	50,6	110.230	49,4	223.122	3,74
12	Deli Serdang	556.239	68,62	254.381	31,38	810.620	13,59
13	Langkat	277.631	66,43	140.275	33,57	417.906	7,00
14	Nias Selatan	78.816	53,3	69.047	46,7	147.863	2,47
15	Humbang Hasundutan	48.661	50,09	48.490	49,91	97.151	1,62
16	Pakpak Barat	12.224	51,19	11.655	48,81	23.879	0,40
17	Samosir	34.369	49,54	35.004	50,46	69.373	1,16
18	Serdang Bedagai	166.396	67,67	79.495	32,33	245.891	4,12
19	Batu Bara	102.693	70,49	42.986	29,51	145.679	2,44
20	Padang Lawas Utara	64.603	56,35	50.040	43,65	114.643	1,92
21	Padang Lawas	63.715	59,04	44.208	40,96	107.923	1,81
22	Labuhan Batu Selatan	85.956	65,24	45.790	34,76	131.746	2,20
23	Labuhan Batu Utara	96.262	68,19	44.914	31,81	141.176	2,36
24	Nias Utara	31.585	51,53	29.712	48,47	61.297	1,02
25	Nias Barat	20.069	47,09	22.546	52,91	42.615	0,71
26	Sibolga	21.092	57,25	15.753	42,75	36.845	0,61
27	Tanjung Balai	43.068	66,61	21.591	33,39	64.659	1,08
28	Pematang Siantar	62.228	56,17	48.557	43,83	110.785	1,85

29	Tebing Tinggi	40.806	64,77	22.195	35,23	63.001	1,05
30	Medan	533.322	60,9	342.472	39,1	875.794	14,68
31	Binjai	70.357	62,45	42.304	37,55	112.661	1,88
32	Padang Sidempuan	51.782	56,66	39.603	43,34	91.385	1,53
33	Gunung Sitoli	29.305	54,68	24.291	45,32	53.596	0,89
	TOTAL	3.625.986	60,82	2.336.318	39,18	5.962.304	100

Sumberdata : BPS

Berdasarkan tabel 7.12 jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan jenis kelamin tercatat untuk laki-laki persen jumlahnya tertinggi di Kabupaten Labuhan Batu dengan nilai 73,3 % dengan jumlah 19.435 jiwa dari 163.324 jiwa sedangkan untuk perempuan persen jumlahnya tertinggi menurut status pekerjaan di Kabupaten Nias Barat dengan nilai 52,91 % dengan jumlah 22.546 jiwa dari 42615 jiwa..



Gambar 7.14. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Menurut Status Perkerjaan

7.13 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 7.13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin	Status Pekerjaan					TOTAL
			1	2	3	4	5	
1	NIAS	L	1.286	19.056	0	2.001	0	22.343
		P	2.053	5.366	0	649	0	8.068
		L+P	3.339	24.422	0	2.650	0	30.411
2	MANDAILING NATAL	L	23.931	31.337	2.957	31.308	1.080	90.613
		P	17.713	13.978	684	18.109	1.323	51.807
		L+P	41.644	45.315	3.641	49.417	2.403	142.420
3	Tapanuli Selatan	L	21.601	15.900	1.032	15.185	526	54.244
		P	12.507	16.797	483	7.222	1.005	38.014
		L+P	34.108	32.697	1.515	22.407	1.531	92.258
4	Tapanuli Tengah	L	21.348	15.154	1.085	33.228	2.024	72.839
		P	17.892	19.421	305	14.155	1.138	52.911
		L+P	39.240	34.575	1.390	47.383	3.162	125.750
5	Tapanuli Utara	L	10.226	35.340	522	8.402	494	54.984
		P	13.007	10.841	746	6.975	195	31.764
		L+P	23.233	46.181	1.268	15.377	689	86.748
6	Toba Samosir	L	4.259	21.785	666	8.953	109	35.772
		P	5.111	7.450	428	6.499	445	19.933
		L+P	9.370	29.235	1.094	15.452	554	55.705
7	Labuhan Batu	L	23.472	16.925	7.603	47.938	15.827	111.765
		P	11.810	1.477	1.257	18.794	787	34.125
		L+P	35.282	18.402	8.860	66.732	16.614	145.890
8	Asahan	L	30.829	26.526	12.257	81.440	7.097	158.149
		P	21.055	7.249	3.204	39.814	2.961	74.283
		L+P	51.884	33.775	15.461	121.254	10.058	232.432
9	Simalungun	L	52.889	37.674	5.918	85.173	11.755	193.409
		P	33.671	12.486	580	44.262	9.271	100.270
		L+P	86.560	50.160	6.498	129.435	21.026	293.679
10	Dairi	L	8.206	36.026	1.521	9.431	2.555	57.739
		P	6.920	11.281	1.051	7.783	2.181	29.216
		L+P	15.126	47.307	2.572	17.214	4.736	86.955
11	Karo	L	7.544	60.166	4.382	16.527	4.444	93.063
		P	14.879	14.756	1.163	10.208	7.705	48.711
		L+P	22.423	74.922	5.545	26.735	12.149	141.774

12	Deli Serdang	L	109.960	38.715	16.053	301.482	15.308	481.518
		P	60.157	11.466	3.879	121.617	6.950	204.069
		L+P	170.117	50.181	19.932	423.099	22.258	685.587
13	Langkat	L	67.023	35.537	13.419	110.711	16.439	243.129
		P	29.401	7.980	5.949	43.729	6.011	93.070
		L+P	96.424	43.517	19.368	154.440	22.450	336.199
14	Nias Selatan	L	7.519	44.182	584	6.179	147	58.611
		P	2.464	7.273	206	2.214	651	12.808
		L+P	9.983	51.455	790	8.393	798	71.419
15	Humbang Hasundutan	L	6.009	21.456	564	4.266	493	32.788
		P	4.261	9.064	651	5.103	247	19.326
		L+P	10.270	30.520	1.215	9.369	740	52.114
16	Pakpak Barat	L	1.466	5.493	8	1.821	77	8.865
		P	527	2.237	0	1.798	0	4.562
		L+P	1.993	7.730	8	3.619	77	13.427
17	Samosir	L	3.396	15.700	1.061	5.448	210	25.815
		P	3.599	4.029	561	4.203	331	12.723
		L+P	6.995	19.729	1.622	9.651	541	38.538
18	Serdang Bedagai	L	31.298	29.436	8.483	54.575	13.160	136.952
		P	16.847	11.300	2.152	22.019	4.264	56.582
		L+P	48.145	40.736	10.635	76.594	17.424	193.534

19	Batu Bara	L	16.877	20.644	2.770	38.183	12.050	90.524
		P	13.100	9.031	629	12.844	1.80	36.684
		L+P	29.977	29.675	3.399	51.027	13.130	127.208
20	Padang Lawas Utara	L	10.170	21.692	2.470	14.027	4.345	52.704
		P	9.602	8.513	356	9.091	758	28.320
		L+P	19.772	30.205	2.826	23.118	5.103	81.024
21	Padang Lawas	L	13.139	22.882	3.444	11.168	4.297	54.930
		P	8.984	9.157	1.378	4.883	951	25.353
		L+P	22.123	32.039	4.822	16.051	5.248	80.283
22	Labuhan Batu Selatan	L	18.228	15.687	5.152	34.765	5.126	78.958
		P	8.911	9.463	1.404	13.338	919	34.035
		L+P	27.139	25.150	6.556	48.103	6.045	112.993
23	Labuhan Batu Utara	L	20.931	8.499	7.464	36.716	12.707	86.317
		P	7.964	4.590	3.292	12.673	1.170	29.689
		L+P	28.895	13.089	10.756	49.389	13.877	116.006
24	Nias Utara	L	2.281	17.227	526	2.040	237	22.311
		P	1.851	3.321	0	811	65	6.048
		L+P	4.132	20.548	526	2.851	302	28.359
25	Nias Barat	L	392	11.903	0	2.125	0	14.420
		P	552	3.300	0	1.211	65	5.128
		L+P	944	15.203	0	3.336	65	19,548

26	Sibolga	L	3.535	1.425	1.108	13.437	104	19.609
		P	3.913	1.024	218	7.204	0	12.359
		L+P	7.448	2.449	1.326	20.641	104	31.968
27	Tanjung Balai	L	8.393	4.334	2.671	18.082	4.468	37.948
		P	5.055	1.753	202	10.347	0	17.357
		L+P	13.448	6.087	2.873	28.429	4.468	55.305
28	Pematang Siantar	L	7.930	6.568	2.911	34.432	345	52.186
		P	13.268	2.614	797	21.944	542	39.165
		L+P	21.198	9.182	3.708	56.376	887	91.351

29	Tebing Tinggi	L	11.604	1.337	2.278	23.184	554	38.957
		P	5.050	1.425	775	12.016	0	19.266
		L+P	16.654	2.762	3.053	35.200	554	58.223
30	Medan	L	85.081	27.844	27.428	346.727	2.608	489.688
		P	66.557	16.412	7.831	200.538	0	291.338
		L+P	151.638	44.256	35.259	547.265	2.608	781.026
31	Binjai	L	17.699	5.235	654	41.890	491	65.969
		P	8.528	1.885	886	22.760	15	34.074
		L+P	26.227	7.120	1.540	64.650	506	100.043
32	Padang Sidmpuan	L	14.208	6.463	1.997	21.324	458	44.450
		P	10.315	4.813	788	13.777	826	30.519
		L+P	24.523	11.276	2.785	35.101	1.284	74.969
33	Gunung Sitoli	L	7.563	5.793	782	9.671	595	24.404
		P	4.126	3.122	523	4.006	406	12.183
		L+P	11.689	8.915	1.305	13.677	1.001	36.587
PROVSU		L	670.293	683.941	139.770	1.471.839	140.130	3.105.973
		P	441.650	254.874	42.378	722.596	52.262	1.513.760
		L+P	1.111.943	938.815	182.148	2.194.435	192.392	4.619.733

Sumberdata : BPS

Keterangan Kolom Tabel 7.13

1. Tenaga Profesional teknisi, dan tenaga kerja lain yang bersangkutan dengan itu.
2. Tenaga kepemimpinan dan ke tata laksanaan dan penjabat pelaksana, tenaga tata usaha dan tenaga yang bersangkutan dengan itu.
3. Tenaga usaha pejualan
4. Tenaga usaha jasa dab Tu tani, kebun, ternak ikan dan hutan.
5. Tenaga, produksi operasional angkutan dan pekerja kasar lainnya

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH					
		L	% L	P	% P	L+P	% L+P
1	Nias	22.343	73,47	8.068	26,53	30.411	0,65
2	Mandailing Natal	90.613	63,62	51.807	36,38	142.420	3,08
3	Tapanuli Selatan	54.244	58,79	38.014	41,2	92.258	1,99
4	Tapanuli Tengah	72.839	57,92	52.911	42,08	125.750	2,72

5	Tapanuli Utara	54.984	63,38	31.764	36,62	86.748	1,87
6	Toba Samosir	35.772	64,21	19.933	35,78	55.705	1,20
7	Labuhan Batu	111.765	76,60	34.125	23,39	145.890	3,15
8	Asahan	158.149	68,04	74.283	31,96	232.432	5,03
9	Simalungun	193.409	65,85	100.270	34,14	293.679	6,35
10	Dairi	57.739	66,40	29.216	33,6	86.955	1,88
11	Karo	93.063	65,64	48.711	34,36	141.774	3,06
12	Deli Serdang	481.518	70,23	204.069	29,77	685.587	14,84
13	Langkat	243.129	72,31	93.070	27,68	336.199	7,27
14	Nias Selatan	58.611	82,06	12.808	17,93	71.419	1,54
15	Humbang Hasundutan	32.788	62,91	19.326	37,08	52.114	1,12
16	Pakpak Barat	8.865	66,02	4.562	33,98	13.427	0,29
17	Samosir	25.815	66,98	12.723	33,01	38.538	0,83
18	Serdang Bedagai	136.952	70,76	56.582	29,24	193.534	4,18
19	Batu Bara	90.524	71,16	36.684	28,84	127.208	2,75
20	Padang Lawas Utara	52.704	65,04	28.320	34,95	81.024	1,75
21	Padang Lawas	54.930	68,42	25.353	31,58	80.283	1,73
22	Labuhan Batu Selatan	78.958	69,87	34.035	30,12	112.993	2,44
23	Labuhan Batu Utara	86.317	74,40	29.689	25,59	116.006	2,51
24	Nias Utara	22.311	78,67	6.048	21,33	28.359	0,61
25	Nias Barat	14.420	73,76	5.128	26,23	19.548	0,42
26	Sibolga	19.609	61,33	12.359	38,66	31.968	0,69
27	Tanjung Balai	37.948	68,61	17.357	31,38	55.305	1,19
28	Pematang Siantar	52.186	57,12	39.165	42,87	91.351	1,97
29	Tebing Tinggi	38.957	66,91	19.266	33,09	58.223	1,26
30	Medan	489.688	62,69	291.338	37,3	781.026	16,90
31	Binjai	65.969	65,94	34.074	34,06	100.043	2,16
32	Padang Sidempuan	44.450	59,29	30.519	40,71	74.969	1,62
33	Gunung Sitoli	24.404	66,70	12.183	33,3	36.587	0,79
	TOTAL	3.105.973		1.513.760		4.619.733	

Berdasarkan tabel 7.13 jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin untuk laki-laki tercatat nilai yang tertinggi terletak di Kabupaten Nias Selatan yaitu 82,0664 % dengan jumlah 58.611 jiwa dari 71.419 jiwa sedangkan untuk perempuan tercatat nilai yang tertinggi yaitu 42,87 % dengan jumlah 39.165 jiwa dari 91.351 jiwa.



Gambar 7.15. Grafik Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

BAB VIII

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

8.1. Jumlah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Kepala Daerah di Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kota. Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar Bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai *regent*, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah Bupati dipakai untuk menggantikan *regent* seluruh wilayah Indonesia. Istilah "bupati" berasal dari bahasa Jawa, yang sendirinya berasal dari bahasa Sanskerta.

Dalam prasasti Telaga Batu, yang ditemukan di kampung tersebut dekat Palembang dan berisi pemujaan terhadap raja Sriwijaya, terdapat kata *bhupati*. Prasasti tersebut diperkirakan dari akhir abad ke-7 Masehi. Pakar prasasti Indonesia J. G. de Casparis menterjemahkan *bhupati* dengan istilah "kepala" (*hoofd* dalam bahasa Belanda)^[2]. Kata *bhupati* juga ditemukan dalam prasasti Ligor, yang ditemukan di provinsi Nakhon Si Thammarat di Muangthai. Pada abad ke-17, orang Eropa menyebut daerah tersebut dengan nama "Ligor". Prasasti ini mengandung tanggal 775 Masehi. Istilah *bhupati* digunakan untuk menyebut raja Sriwijaya. Dalam bukunya *Océanie ou cinquième partie du monde : revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées* ("Oceania atau bagian dunia yang kelima : majalah geografi dan etnografi tentang Malaisia, Mikronesia, Polynesia dan Melanesia, dan klasifikasi dan divisi baru untuk kawasan tersebut"), penjelajah asal Prancis Gérard Louis Domeny de Rienzi (1834) mencatat istilah "bupati". Jabatan bupati dalam arti modern berasal dari masa awal kerajaan Mataram, pada masa Sultan Agung (bertahta 1613-45) menitip pengurusan daerah

yang ditaklukkannya kepada orang yang dipercayainya. Saat itu nama pejabat tersebut adalah "adipati". Pada masa Hindia Belanda, para *adipati* disebut *regent*. Biasanya mereka dipilih dari kalangan saudagar atau priyayi.

Selanjutnya disebutkan bahwa tugas dan fungsi Bupati/ Walikota adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;
6. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Walikota menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.1 Jumlah Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	KAB./KOTA	Bupati/Walkot		Wakil Bupati/Walkot		L+P
		L	P	L	P	
1	Nias	L	-	L	-	2
2	Mandailing Natal	L	-	L	-	2
3	Tapanuli Selatan	L	-	L	-	2
4	Tapanuli Tengah	L	-	L	-	2
5	Tapanuli Utara	L	-	L	-	2
6	Toba Samosir	L	-	L	-	2
7	Labuhan Batu	L	-	L	-	2
8	Asahan	L	-	L	-	2
9	Simalungun	L	-	L	-	2
10	Dairi	L	-	L	-	2
11	Karo	L	-	-	P	2
12	Deli Serdang	L	-	L	-	2
13	Langkat	L	-	L	-	2
14	Nias Selatan	L	-	L	-	2

15	Humbang Hasundutan	L	-	L	-	2
16	Pakpak Barat	L	-	L	-	2
17	Samosir	L	-	L	-	2
18	Serdang Bedagai	L	-	L	-	2
19	Batu Bara	L	-	L	-	2
20	Padang Lawas Utara	L	-	L	-	2
21	Padang Lawas	L	-	L	-	2
22	Labuhan Batu Selatan	L	-	L	-	2
23	Labuhan Batu Utara	L	-	L	-	2
24	Nias Utara	L	-	L	-	2
25	Nias Barat	L	-	L	-	2
26	Sibolga	L	-	L	-	2
27	Tanjung Balai	L	-	L	-	2
28	Pematang Siantar	L	-	-	-	2
29	Tebing Tinggi	L	-	L	-	2
30	Medan	L	-	L	-	2
31	Binjai	L	-	L	-	2
32	Padang Sidempuan	L	-	L	-	2
33	Gunung Sitoli	L	-	L	-	2
	PROVSU	33	-	32	1	66

Sumber data :Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Dilihat dari tugas yang harus diemban oleh seorang Bupati/Walikota, sebenarnya tugas tersebut sah-sah saja dilaksanakan oleh perempuan maupun laki-laki. Namun kenyataannya jika dilihat data pada tabel 8.1 mengenai jumlah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang ada di Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari 33 Bupati/Walikota pada tahun 2017 belum ada satupun perempuan, semua Kepala Daerah Kabupaten/Walikota adalah laki-laki (100%). Dalam menduduki jabatan Wakil Bupati/ Walikota terdapat 1 perempuan (3.03%) selebihnya laki-laki (96.97%). Dengan adanya pemilihan langsung terhadap Kepala Daerah, maka perlu adanya dorongan dari masyarakat untuk mencalonkan perempuan yang berkualitas menduduki jabatan Bupati/ Walikota serta Wakil Bupati/ Walikota. Perlu menjadi pertimbangan bahwa jika dilihat dari beberapa daerah yang dipimpin oleh perempuan ternyata tidak kalah bagusnya komitmen, dalam Pembangunan Daerah.



Gambar 8.1. Grafik Jumlah Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) Menurut Jenis Kelamin



Gambar 8.2. Grafik Jumlah Kepala Daerah (Wakil Bupati/Wali Kota) Menurut Jenis Kelamin

8.2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 8.2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin				L+P	% L+P
		Laki-laki (L)	%	Perempuan (P)	%		
1	Tapanuli Tengah	19	95	1	5	20	4,51
2	Tapanuli Utara	14	93,33	1	6,67	15	3,39
3	Tapanuli Selatan	14	100	-	0	14	3,16
4	Nias	10	100	-	0	10	2,26
5	Langkat	21	91,3	2	8,7	23	5,19
6	Karo	15	88,24	2	11,8	17	3,84
7	Deli Serdang	22	100	-	0	22	4,97
8	Simalungun	23	74,19	8	25,8	31	7
9	Asahan	25	100	-	0	25	5,64
10	Labuhan Batu	9	100	-	0	9	2,03
11	Dairi	12	80	3	20	15	3,39
12	Toba Samosir	14	87,5	2	12,5	16	3,61
13	Mandailing Natal	23	100	-	0	23	5,19
14	Nias Selatan	34	97,14	1	2,86	35	7,9
15	Pak-pak Bharat	7	87,5	1	12,5	8	1,81
16	Humbang Hasundutan	9	90	1	10	10	2,26

17	Samosir	9	100	-	0	9	2,03
18	Serdang Bedagai	15	88,24	2	11,8	17	3,84
19	Batubara	6	85,71	1	14,3	7	1,58
20	Padang Lawas Utara	12	100	-	0	12	2,71
21	Padang Lawas	11	91,67	1	8,33	12	2,71
22	Labuhan Batu Selatan	5	100	-	0	5	1,13
23	Labuhan Batu Utara	8	100	-	0	8	1,81
24	Nias Utara	11	100	-	0	11	2,48
25	Nias Barat	7	87,5	1	12,5	8	1,81
26	Medan	21	100	-	0	21	4,74
27	Pematang Siantar	8	100	-	0	8	1,81
28	Sibolga	2	50	2	50	4	0,9
29	Tanjung Balai	6	100	-	0	6	1,35
30	Binjai	3	60	2	40	5	1,13
31	Tebing Tinggi	5	100	-	0	5	1,13
32	Padan Sidempuan	6	100	-	0	6	1,35
33	Gunungsitoli	6	100	-	0	6	1,35
PROVSU		412	93	31	7	443	100

Sumberdata : Biro Pemerintahan SetdaprovSU

Keterwakilan perempuan di pemerintahan menjadi hal yang sering di perdebatkan diberbagai pertemuan, baik pertemuan yang bersifat formal maupun non formal. Beberapa daerah telah melibatkan perempuan dalam pengambilam keputusan.

Pada table 8.2 mengenai data jumlah camat menurut jenis kelamin yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017. Dari 443 Camat yang ada terdiri dari 412 Camat adalah laki-laki (93%) laki-laki dan 31 (7%) adalah perempuan. Dilihat dari persentasi jumlah penduduk Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa berbandingan jumlah laki-laki dan perempuan tidak begitu banyak perbedaan, sehingga diharapkan keterwakilan perempuan untuk posisi camat juga harus mempertimbangkan jumlah perempuan.



Gambar 8.3. Grafik Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin

8.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan dan Jenis Kelamin yang Bekerja di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Setelah adanya [Reformasi 1998](#), terjadi perubahan paradigma pemerintahan. Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari [partai politik](#) (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak [diskriminatif](#) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Aparatur Sipil Negara memiliki hak memilih dalam [Pemilu](#), sedangkan anggota [TNI](#) maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas :

- a. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional
- b. PPPK, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang

ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN dituntut memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. ASN merupakan bagian dari reformasi birokrasi perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban pengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN dengan fungsi, tugas dan peran sebagai berikut :

1. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan publik
 - b. Pelayan Publik; dan
 - c. perekat dan pemersatu bangsa
2. Pegawai ASN bertugas:
- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
 - c. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
3. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

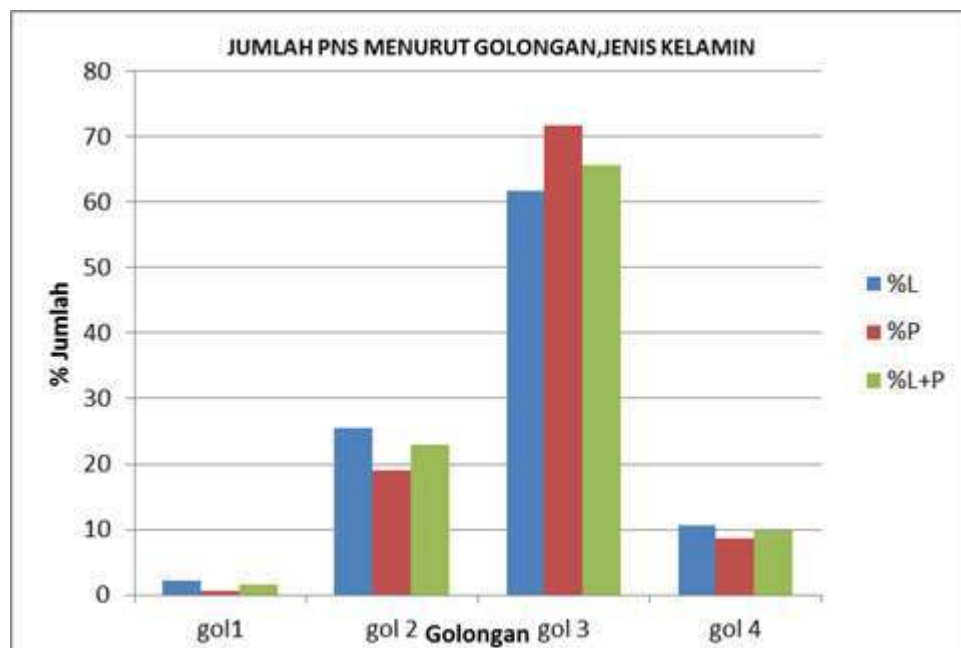
Tabel 8.3. Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin yang Bekerja di Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH PNS				
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN (P)	%	L+P
1	I/a	20	76,92	6	23,08	26
2	I/b	25	80,65	6	19,35	31
3	I/c	53	85,48	9	14,52	62
4	I/d	54	91,53	5	8,47	59
	GOLONGAN I	152	85,39	26	14,61	178
1	II/a	216	84,71	39	15,29	255
2	II/b	483	74,77	163	25,23	646
3	II/c	907	68,92	409	31,08	1.316
4	II/d	229	47,41	254	52,59	483
	GOLONGAN II	1.835	67,96	865	32,04	2.700
1	III/a	574	60,36	377	39,64	951
2	III/b	1.791	56,73	1.366	43,27	3.157
3	III/c	912	58,73	641	41,27	1.553
4	III/d	1.155	56,7	882	43,3	2.037
	GOLONGAN III	4.432	57,57	3.266	42,43	7.698
1	IV/a	387	60,19	256	39,81	643
2	IV/b	290	72,86	108	27,14	398
3	IV/c	54	67,5	26	32,5	80
4	IV/d	25	86,21	4	13,79	29

5	IV/e	1	33,33	2	66,67	3
	GOLONGAN IV	757	65,65	396	34,35	1.153
	TOTAL	7.176	61,18	4.553	38,82	11.729

SumberData:BKN, BKD

Jumlah ASN menurut golongan, jenis kelamin yang bekerja di Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 8.3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah ASN Sumatera Utara 11.729 orang yang terdiri dari laki-laki 7.176 orang (61.16%) laki-laki dan 4.553 (38.82%) perempuan. Dilihat dari golongan ruang kepangkatan ASN yang ada di Sumatera Utara, ternyata laki-laki dan perempuan tersebar disemua golongan ruang dan kepangkatan. Pada golongan dan ruang terendah yaitu golongan I didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 152 orang (85.39%). Dilihat pada golongan III masih juga didominasi oleh laki-laki yaitu 1.155 orang (56.7%). Lebih jauh lagi pada golongan tertinggi yaitu IV juga didominasi oleh laki-laki, yaitu 757 orang (65%). Sementara itu perempuan hanya mendominasi pada golongan II yaitu sebanyak 254 orang (52.59%).



Gambar 8.4. Grafik Jumlah ASN Menurut Golongan, Jenis Kelamin yang Bekerja di Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

8.4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (disingkat DPRD Kabupaten/Kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD

Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur.

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang [Ketua DPRD Kabupaten/Kota](#) dan 2 [dua](#) orang wakil [Ketua DPRD Kabupaten/Kota](#) untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil [Ketua DPRD Kabupaten/Kota](#) untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang [Ketua DPRD Kabupaten/Kota](#) ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil [Ketua DPRD Kabupaten/Kota](#) ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Hak DPRD Kabupaten/Kota adalah:

1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Hak angket yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

**Tabel 8.4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016**

NO	KAB/KOTA	% L	% P	% L+P
1	Nias	100	0	2.27
2	Mandailing Natal	92,31	7,69	3.54
3	Tapanuli Selatan	90	10	2.72
4	Tapanuli Tengah	94,29	5,71	3.18
5	Tapanuli Utara	91,42	8,50	3.18
6	Toba Samosir	93,33	6.60	2.99
7	Labuhan Batu	68,08	31	4.08
8	Asahan	84,44	15,6	4.08
9	Simalungun	88	12	4.54
10	Dairi	94,29	5,71	3.18
11	Karo	80	20	3.18
12	Deli Serdang	88	12	4.54
13	Langkat	92	8	4.54
14	Nias Selatan	85,71	14,3	3.18
15	Humbang Hasundutan	96	4	2.27
16	Pakpak Barat	100	0	1.81
17	Samosir	84	16	2.27
18	Serdang Bedagai	82,22	18	4.08
19	Batu Bara	85,71	14,3	3.18
20	Padang Lawas Utara	93,33	6,67	2.72
21	Padang Lawas	96,67	3,33	2.72
22	Labuhan Batu Selatan	91,43	8,57	3.18
23	Labuhan Batu Utara	97,14	2,86	3.18
24	Nias Utara	92	8	2.27
25	Nias Barat	85	15	1.81
26	Sibolga	80	20	1.81
27	Tanjung Balai	84	16	2.27
28	Pematang Siantar	76,66	23	2.72
29	Tebing Tinggi	92	8	2.27
30	Medan	90	10	4.54
31	Binjai	86,67	13,3	2.72
32	Padang Sidempuan	86,67	13,3	2.72
33	Gunung Sitoli	88	12	2.27

Sumberdata : Sekretariat DPRD

Data pada table 8.4 adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari penyebaran anggota DPRD tersebut ternyata anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Utara masih didominasi oleh laki-laki (88%) sementara itu perempuan hanya 12%. Lebih lanjut lagi dilihat bahwa tidak semua Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara memiliki perwakilan perempuan di legislatifnya. Kabupaten Nias dan Pakpak Bharat

tidak memiliki perwakilan perempuan. Dilihat dari tabel 8.4 Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki keterwakilan legislatif perempuan 30%. Perlu perhatian yang besar terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Utara, khususnya partai-partai yang ada harus mempertimbangkan keterwakilan kader perempuan dalam kepengurusan dan kualitas kader perempuan. Dalam pemilihan legislatif ke depan perempuan Sumatera Utara harus menjadi pertimbangan untuk duduk di legislatif. Pendidikan politik untuk perempuan harus dipertajam sehingga kedepan perempuan tidak hanya duduk di 30% sebagai calon legislatif. Dukungan dari Pemerintah Daerah sangat diharapkan terutama untuk organisasi-organisasi perempuan untuk menghasilkan perempuan yang berkualitas untuk duduk sebagai perwakilan di legislatif yang mampu menyuarakan hak-hak perempuan dalam pembangunan.



Gambar 8.5. Grafik Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin

8.5. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa, Jenis Kelamin di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Tabel 8.5. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa, Jenis Kelamin Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

NO	WILAYAH	JENIS JABATAN JAKSA											
		STRUKTURAL				FUNGSIONAL				JUMLAH			
		L	% L	P	% P	L	% L	P	% P	L	% L	P	% P
1	Kejati Sumut	83	53,21	73	46,79	92	55,42	74	44,57	175	54,34	147	45,65
2	Kejari Sibolga	17	80,95	4	19,05	3	75	1	25	20	80	5	20
3	Kejari Deli Serdang	33	80,49	8	19,51	15	57,69	11	42,30	48	71,64	19	28,35
4	Kejari Binjai	20	64,52	11	35,48	5	41,67	7	58,33	25	58,14	18	41,86
5	Kejari Pematang Siantar	15	71,43	6	28,6	8	57,14	6	42,86	23	65,71	12	34,29
6	Kejari Medan	45	66,18	23	33,8	23	60,53	15	39,47	68	64,15	38	35,85
7	Kejari Belawan	24	77,42	7	22,6	8	66,67	4	33,33	32	74,42	11	25,58
8	KN. P. Sidempuan	16	72,73	6	27,3	8	66,67	4	33,33	24	70,59	10	29,41
9	Kejari Simalungun	14	70	6	30	10	62,5	6	37,5	24	66,67	12	33,33
10	Kejari Tebing Tinggi	14	66,67	7	33,3	22	88	3	12	36	78,26	10	21,74
11	Kejari Serdang Bedagai	9	60	6	40	12	75	4	25	21	67,74	10	32,26
12	Kejari Batu Bara	15	93,75	1	6,25	7	70	3	30	22	84,62	4	15,38
13	Kejari Toba Samosir	16	84,21	3	15,8	1	33,33	2	66,67	17	77,27	5	22,73
14	Kejari tapanuli Utara	12	85,71	2	14,3	1	100	0	0	13	86,67	2	13,33
15	KN. Tanjung Balai Asahan	13	65	7	35	11	68,75	5	31,25	24	66,67	12	33,33
16	Kejari langkat	17	85	3	15	15	68,18	7	31,82	32	76,19	10	23,81
17	Kejari Nias Selatan	12	100	0	0	3	60	2	40	15	88,24	2	11,76
18	Kejari Gn. Sitoli	17	77,27	5	22,7	5	83,33	1	16,67	22	78,57	6	21,43
19	Kejari Padang Lawas	14	87,5	2	12,5	4	80	1	20	18	85,71	3	14,29

	Utara												
20	KN. Karo	14	60,87	9	39,1	7	77,78	2	22,22	21	65,63	11	34,38
21	KN. Labuhan Batu	25	75,76	8	24,2	10	58,82	7	41,18	35	70	15	30
22	Kejari Mandailing natal	17	94,44	1	5,56	3	60	2	40	20	86,96	3	13,04
23	Kejari Asahan	12	66,67	6	33,3	5	55,56	4	44,44	17	62,96	10	37,04
24	KN. Dairi	18	90	2	10	2	50	2	50	20	83,33	4	16,67
25	Kejari labusel	8	88,89	1	11,1	2	66,67	1	33,33	10	83,33	2	16,67
26	Kejari tapanuli Selatan	8	100	0	0	4	100	0	0	8	66,67	4	33,33
27	Kejari Padang Lawas	9	75	3	25	2	100	0	0	11	78,57	3	21,43
28	Cab. KN. Deli Serdang di Pancur Batu	9	60	6	40	1	10	9	90	10	40	15	60
29	Cabjari Labuhan Deli	15	68,18	7	31,8	7	46,67	8	53,33	22	59,46	15	40,54
30	Cabjari porsea	3	50	3	50	1	100	0	0	4	57,14	3	42,86
31	Cabjari Pulau Tello	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	5	100
32	Cabjari Langkat di Pkl. Brandan	3	37,5	5	62,5	5	50	5	50	8	44,44	10	55,56
33	Cabjari Kotanopan	3	75	1	25	0	0	0	0	3	75	1	25
34	Cabjari Siborong- borong	7	87,5	1	12,5	0	0	0	0	7	87,5	1	12,5
35	Cabjari Natal	5	83,33	1	16,7	1	100	0	0	6	85,71	1	14,29
36	Cabjari Tigabinanga	4	80	1	20	1	100	0	0	5	83,33	1	16,67
	PROVSU	566	70,22	240	29,8	304	60,8	196	39,2	866	66,31	440	33,69

Sumber data : Kejaksaaan



Gambar 8.6. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa-Struktural



Gambar 8.7. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa-Fungsional



Gambar 8.8. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa

8.6. Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- *perkawinan,*
- *waris,*
- *wasiat,*
- *hibah,*
- *wakaf,*
- *zakat,*
- *Infaq,*
- *shadaqah; dan*
- *ekonomi syari'ah.*

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum

masing-masing; (Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

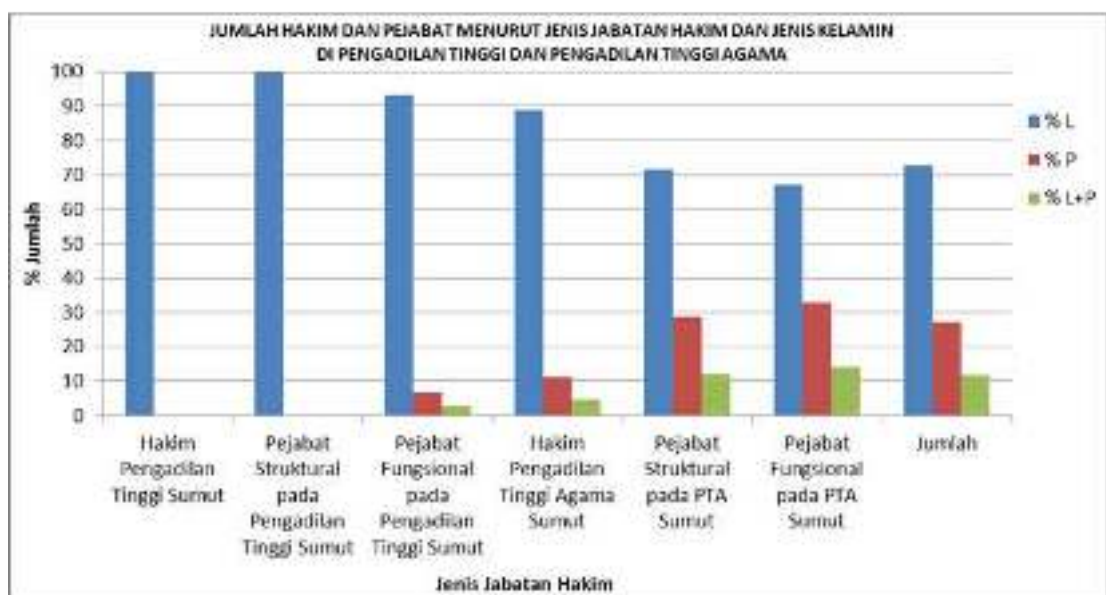
Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991;

Tabel 8.6. Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah				
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Total
		(L)		(P)		L+P
1	Hakim Pengadilan Tinggi Sumut	1	100	-	0	1
2	Pejabat Struktural pada Pengadilan Tinggi Sumut	1	100	-	0	1
3	Pejabat Fungsional pada Pengadilan Tinggi Sumut	28	93,33	2	6,66	30
4	Hakim Pengadilan Tinggi	16	88,88	2	11,11	18
5	Pejabat Struktural pada PTA Sumut	10	71,42	4	28,57	14
6	Pejabat Fungsional pada PTA	114	67,05	56	32,94	170
Jumlah		170	72,64	64	27,35	234

Sumber data:PTN/PTA

Pada tabel 8.6 yaitu Jumlah Hakim dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim dan Jenis Kelamin di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa masih didominasi oleh laki-laki yaitu 170 hakim (72.65%), sedangkan perempuan 64 hakim (27.35%). Selanjutnya dilihat bahwa pada posisi-posisi strategis semua diduduki oleh laki-laki, perempuan didominasi pada jabatan fungsional.



Gambar 8.9. Grafik Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama

8.7. Jumlah Hakim Menurut Jenis Jabatan Hakim, Jenis Kelamin Di Pengadilan Negeri Di Provinsi Sumatera Utara

Lembaga Peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, Hakim saat ini juga mendapat sorotan relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis Hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan, maka jargon-jargon good goverment dan good governance yang selama ini digembargemborkan oleh banyak pihak tidak dapat terealisasi, hanya sebatas “mimpi” semata.

Secara normatif menurut pasal 1 ayat 5 UU komisi yudisial nomor 22 tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara RI.

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang tidak bersalah dan membenarkan orang yang benar dan didalam menjalankan tugasnya ia tidak hanya bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja, dan menjadi tumpuan harapan mencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan yang Maha Esa.

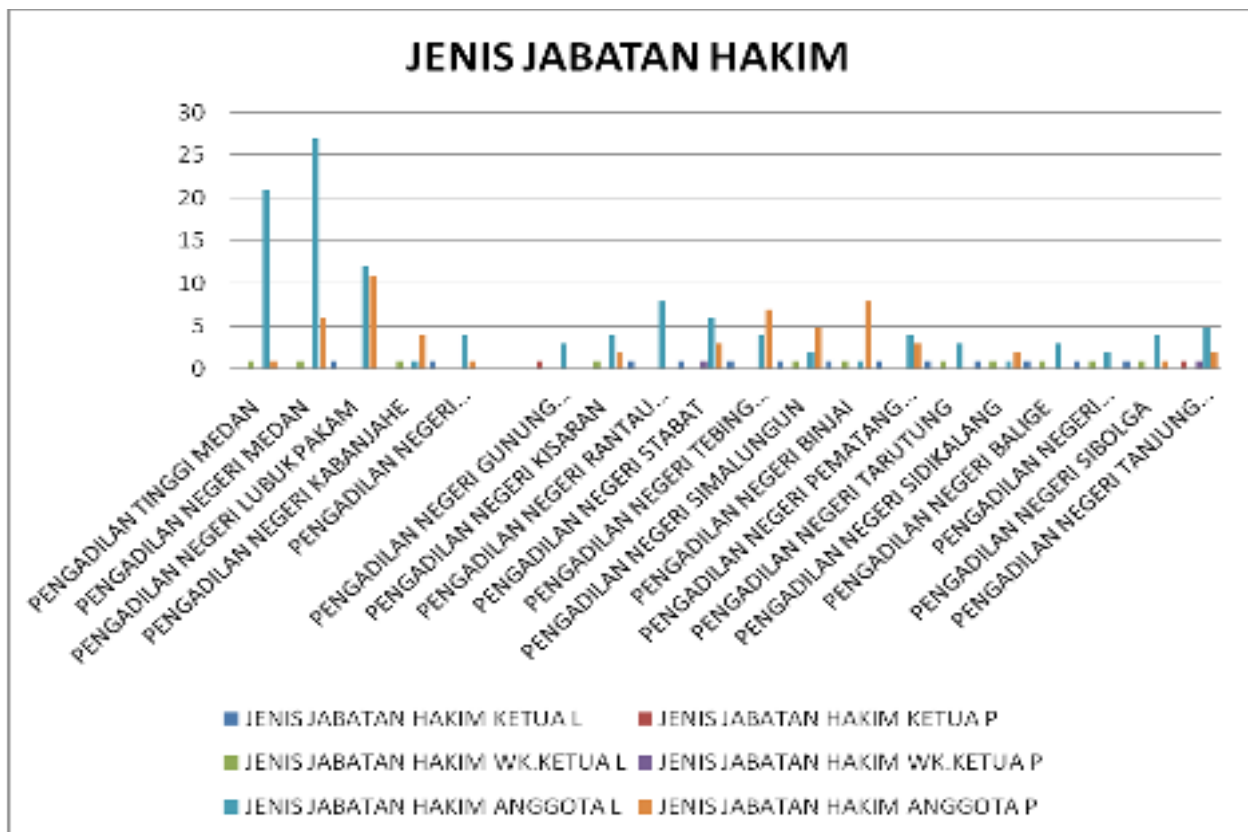
Tabel 8.7 Jumlah Hakim Menurut Jenis Jabatan Hakim, Jenis Kelamin Di Pengadilan Negeri Di Provinsi Sumatera Utara

NO	PENGADILAN TINGGI/PENGADILAN NEGERI	JENIS JABATAN HAKIM					
		KETUA		WK.KETUA		ANGGOTA	
		L	P	L	P	L	P
1	PENGADILAN TINGGI MEDAN	1		1		21	1
2	PENGADILAN NEGERI MEDAN	1		1		27	6
3	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	1		0		12	11
4	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	0		1		1	4
5	PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN	1		0		4	1
6	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI		1	0		3	

7	PENGADILAN NEGERI KISARAN	0		1		4	2
8	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	1	0			8	
9	PENGADILAN NEGERI STABAT	1			1	6	3
10	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	1		0		4	7
11	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	1		1		2	5
12	PENGADILAN NEGERI BINJAI	1		1		1	8
13	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	1		0		4	3
14	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	1		1		3	
15	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	1		1		1	2
16	PENGADILAN NEGERI BALIGE	1		1		3	
17	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	1		1		2	
18	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	1		1		4	1
19	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI		1		1	5	2

Sumber data : PTN

Pada tabel 8.7 tertera Jumlah Hakim (ketua dan wakil ketua) berdasarkan jenis kelamin di Pengadilan Negeri Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 19 Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara. Dilihat dari sebaran jumlah hakim berdasarkan jenis kelamin, maka hakim yang ada di Pengadilan Negeri Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh hakim laki-laki (baik pada posisi ketua dan wakil ketua). Keberadaan ketua hakim yang tersebar di 19 Pengadilan Negeri hanya 1 (satu) hakim ketua perempuan yang bertugas di Kota Tanjung Balai. Hal ini mestinya menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya pada bidang yudikatif untuk mempertimbangkan hakim-hakim perempuan menempati posisi strategis dalam peradilan.



Gambar 8.10. Grafik Hakim Menurut Jenis Jabatan Hakim, Jenis Kelamin Di Pengadilan Negeri Di Provinsi Sumatera Utara

8.8. Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Utara

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Selanjutnya bahwa susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang, dalam organisasi Negara dan

Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI

Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara

pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.

**Tabel 8.8 Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016**

NO	PANGKAT	NYATA					
		Laki-laki	%	Perempuan	%	JUMLAH	%
1	2	4	5	6	8	9	10
1	IRJEN	1	100	0	0	1	0
2	BRIGJEN	1	100	0	0	1	0
3	KOMBES	24	96	1	4	25	0,005
4	AKBP	182	90,55	19	9,45	201	0,094
5	KOMPOL	436	89,53	51	10,5	487	0,251
6	AKP	714	92,25	60	7,75	774	0,295
7	IPTU	716	94,96	38	5,04	754	0,187
8	IPDA	715	95,08	37	4,92	752	0,182
9	AIPTU	4405	97,33	121	2,67	4526	0,596
10	AIPDA	924	97,16	27	2,84	951	0,133
11	BRIPKA	4149	97,03	127	2,97	4276	0,625
12	BRIGADIR	3776	97,55	95	2,45	3871	0,468
13	BRIPTU	818	95,12	42	4,88	860	0,207
14	BRIPDA	2218	83,89	426	16,1	2644	2,097
15	ABRIP	0	0	0	0	0	0
16	ABRIPTU	0	0	0	0	0	0
17	ABRIPDA	0	0	0	0	0	0
18	BHARAKA	0	0	0	0	0	0
19	BHARATU	125	100	0	0	125	0
20	BHARADA	68	100	0	0	68	0
	JUMLAH	19272	94,86	1044	5,14	20316	5,14

Sumber : Data POLDA

Tabel 8.8 Jumlah Polisi Menurut jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa polisi masih didominasi oleh laki-laki yaitu 94,86 %. Keberadaan perempuan di bidang kepolisian masih masih sangat rendah. Seolah-olah dunia polisi adalah dunia laki-laki. Kondisi ini juga terimplementasi pada jumlah pejabat kepolisian yang ada di Sumatera Utara.



Gambar 8.11. Grafik Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin

8.9. Jumlah Pejabat Kepolisian Menurut Jenis Kelamin Dan Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 8.9 Jumlah Pejabat Kepolisian Menurut Jenis Kelamin Dan Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	WILAYAH	PEJABAT DIKEPOLISIAN									
		KAPOLDA									
		KAPOLDA/KAPOLRES					KAPOLSEK				
		L	% L	P	% P	L+P	L	% L	P	% P	L+P
1	POLDA	1	100	0	0	1	0	0	0	0	0
2	POLRESTABES MEDAN	1	100	0	0	1	11	91,67	1	8,33	12
3	POLRES T.TINGGI	0	0	1	100	1	7	100	0	0	7
4	POLRES BINJAI	1	100	0	0	1	7	87,5	1	12,5	8
5	POLRES DELI SERDANG	1	100	0	0	1	12	100	0	0	12
6	POLRES LANGKAT	1	100	0	0	1	12	100	0	0	12
7	POLRES MANDAILING NATAL	1	100	0	0	1	10	100	0	0	10
8	POLRES TANAH KARO	1	100	0	0	1	10	100	0	0	10
9	POLRES SIMALUNGUN	1	100	0	0	1	17	100	0	0	17
10	POLRES ASAHAN	1	100	0	0	1	8	88,89	1	11,11	9
11	POLRES LABUHAN BATU	1	100	0	0	1	14	100	0	0	14
12	POLRES TAPANULI UTARA	1	100	0	0	1	10	100	0	0	10
13	POLRES DAIRI	1	100	0	0	1	6	100	0	0	6
14	POLRES TAPANULI SELATAN	1	100	0	0	1	10	100	0	0	10

15	POLRES TAPANULI TENGAH	1	100	0	0	1	7	100	0	0	7
16	POLRES NIAS	1	100	0	0	1	11	100	0	0	11
17	POLRES PEL. BELAWAN	1	100	0	0	1	3	100	0	0	3
18	POLRES SERDANG BEDAGAI	1	100	0	0	1	7	100	0	0	7
19	POLRES P. SIANTAR	1	100	0	0	1	6	100	0	0	6
20	POLRES TJ. BALAI	1	100	0	0	1	5	100	0	0	5
21	POLRES TOBA SAMOSIR	1	100	0	0	1	6	100	0	0	6
22	POLRES H. HASUNDUTAN	1	100	0	0	1	6	100	0	0	6
23	POLRES SAMOSIR	1	100	0	0	1	5	100	0	0	5
24	POLRES PAKPAK BARAT	1	100	0	0	1	2	100	0	0	2
25	POLRES P. SIDEMPUAN	1	100	0	0	1	2	100	0	0	2
26	POLRES SIBOLGA	1	100	0	0	1	2	100	0	0	2
27	POLRES NIAS SELATAN	1	100	0	0	1	5	100	0	0	5
28	POLRES BATU BARA	1	100	0	0	1	4	100	0	0	4

Sumber : Data POLDA



Gambar 8.12. Grafik Jumlah Pejabat Kepolisian Kapolda Menurut Jenis Kelamin



Gambar 8.13. Grafik Jumlah Pejabat Kepolisian Kapolsek Menurut Jenis Kelamin

BAB IX
HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

**9.1 Jumlah Penghuni Menurut Jenis Lapas Dan Kelompok Umur Di
Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 9.1 Jumlah Penghuni Menurut Jenis Lapas Dan Kelompok Umur Di
Provinsi Sumatera Utara**

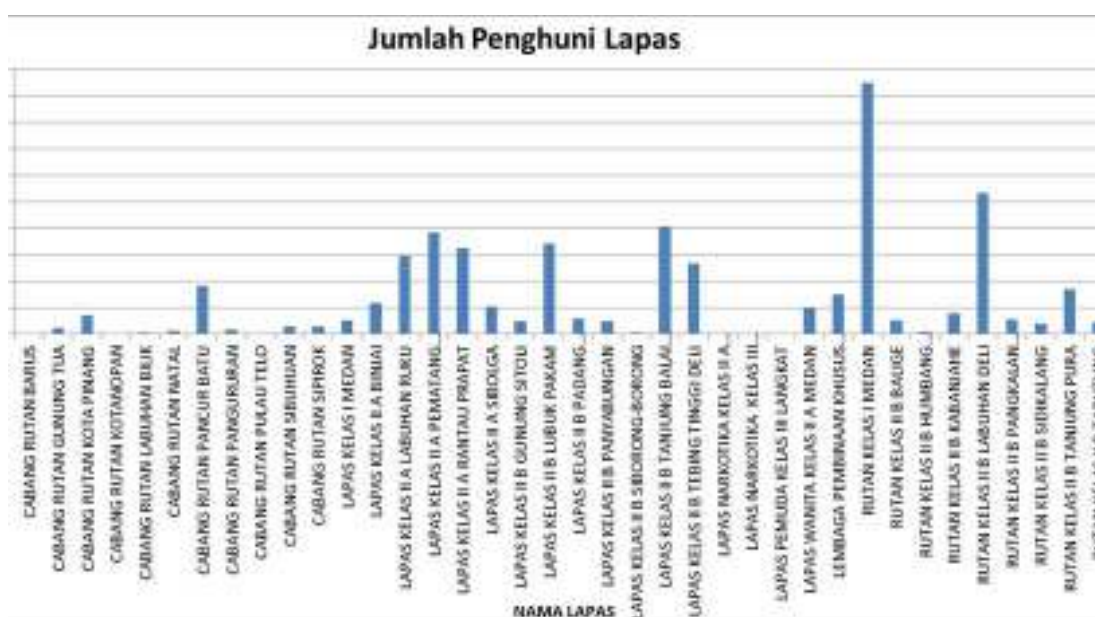
No	Lapas	Tahanan Anak-anak		Tahanan Dewasa		Tahanan	%
		L	P	L	P	L+P	
1	CABANG RUTAN BARUS	0	0	4	0	4	0.04
2	CABANG RUTAN GUNUNG TUA	0	0	38	2	40	0.44
3	CABANG RUTAN KOTA PINANG	0		124	6	130	1.42
4	CABANG RUTAN KOTANOPAN	0	0	0	0	0	0
5	CABANG RUTAN LABUHAN BILIK	0	0	11	0	11	0.12
6	CABANG RUTAN NATAL	0	0	25	0	25	0.27
7	CABANG RUTAN PANCUR BATU	5	0	312	15	332	3.64
8	CABANG RUTAN PANGURURAN	0	0	28	1	29	0.32
9	CABANG RUTAN PULAU TELO	0	0	0	0	0	0
10	CABANG RUTAN SIBUHUAN	0	0	52	2	54	0.59
11	CABANG RUTAN SIPIROK	0	0	52	2	54	0.59
12	LAPAS KELAS I MEDAN	0	0	92	0	92	1.01
13	LAPAS KELAS II A BINJAI	2	0	199	15	216	2.37
14	LAPAS KELAS II A LABUHAN RUKU	4	0	517	17	538	5.89
15	LAPAS KELAS II A PEMATANG SIANTAR	1	0	661	35	697	7.64
16	LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT	3	1	569	22	595	6.52
17	LAPAS KELAS II A SIBOLGA	6	0	170	11	187	2.05
18	LAPAS KELAS II B GUNUNG SITOLI	2	0	82	2	86	0.94
19	LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM	17	0	587	17	621	6.80
20	LAPAS KELAS II B PADANG SIDEMPUAN	3	0	100	4	107	1.17
21	LAPAS KELAS II B PANYABUNGAN	0	0	80	6	86	0.94
22	LAPAS KELAS II B SIBORONG-BORONG	0	0	12	0	12	0.13
23	LAPAS KELAS II B TANJUNG BALAI ASAHAN	1	0	719	22	742	8.13
24	LAPAS KELAS II B TEBING TINGGI DELI	4	0	455	25	484	5.31
25	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A PEMATANG SIANTAR	0	0	0	0	0	0
26	LAPAS NARKOTIKA KELAS III	0	0	1	0	1	0.01

	LANGKAT						
27	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT	0	0	0	0	0	0
28	LAPAS WANITA KELAS II A MEDAN	0	0	0	184	184	2.02
29	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN	25	0	250	0	275	3.01
30	RUTAN KELAS I MEDAN	0	0	1731	0	1731	18.98
31	RUTAN KELAS II B BALIGE	0	0	89	7	96	1.05
32	RUTAN KELAS II B HUMBANG HASUNDUTAN	0	0	19	0	19	0.21
33	RUTAN KELAS II B KABANJAHE	1	0	132	8	141	1.54
34	RUTAN KELAS II B LABUHAN DELI	0	0	972	0	972	10.66
35	RUTAN KELAS II B PANGKALAN BRANDAN	0	0	97	3	100	1.09
36	RUTAN KELAS II B SIDIKALANG	1	0	66	6	73	0.80
37	RUTAN KELAS II B TANJUNG PURA	3	0	288	16	307	3.36
38	RUTAN KELAS II B TARUTUNG	0	0	75	5	80	0.87
		78	1	8609	433	9121	100

Sumber data: Kanwil Hukum dan HAM 2017 s/d bulan Juli 2017

Pada tabel 9.1 yaitu jumlah penghuni lapas menurut jenis lapas di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017. Dari data yang tersebut di atas menunjukkan bahwa lapas menurut jenisnya di Sumatera Utara terdapat 38 lapas yang tersebar di Kabupaten/ Kota yang ada Dalam 38 lapas yang ada ternyata ada yang dihuni oleh penghuni usia anak-anak. Dalam UU No. 35 tahun 2014 yaitu perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yaitu pada pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan fungsi dan kedudukannya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi anak merupakan bahagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tiap tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Pada kondisi-kondisi tertentu, anak ada yang mengalami permasalahan dalam tumbuh kembangnya sehingga anak tersebut berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tentu harus diproses sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa mengurangi hak-haknya sebagai anak. Dari 38 lapas yang ada ternyata terdapat 15 (39%) lapas yang memiliki penghuni usia anak-anak. Pada kenyataannya terdapat 79 anak (0,8%) yang terdiri dari 78 anak laki-laki dan 1 anak perempuan sebagai penghuni lapas di Provinsi Sumatera Utara. Data Bulan Januari sampai Juli 2017. Dilihat dari penyebaran anak penghuni lapas tersebut, ternyata anak yang berada di Lapas Kota Medan terdapat sebanyak 25 anak (32%) dari penghuni lapas anak yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Urutan kedua lapas yang memiliki penghuni anak terbesar ke dua setelah Lapas Kota Medan adalah Lapas Lubuk Pakam, yaitu dihuni oleh 17 anak (21.5%) dari Lapas yang memiliki penghuni anak-anak.



Gambar 9.1. Grafik Jumlah Penghuni Lapas

BAB X

DATA KEKERASAN

10.1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsesus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh lapisan masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib). Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, pada Pasal 1 menegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "kekerasan terhadap perempuan" yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan di secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 butir 1.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Mencermati pendapat dari para ahli mengenai istilah-istilah yang dipakai untuk menyatakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan nampaknya belum ada kesamaan istilah, ada yang memakai bentuk-bentuk, ada yang memakai jenis-jenis. Dalam kaitan itu jika kita merujuk pada U U No. 23 Tahun 2004. Kristi E Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya
2. Kekerasan psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
4. Kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.
5. Kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sukerti dalam laporan penelitiannya di Kota Denpasar mengatakan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik. Contoh: dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala dibenturkan ke tembok.
2. Kekerasan psikologis. Contoh: diancam, disumpah, pendapat korban tidak pernah dihargai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timbang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan.
3. Kekerasan ekonomi. Contoh: membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada istri (istri yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada istri. Jadi menelantarkan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri

sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu:

1. Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.
2. Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan.
3. Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
4. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
6. Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Sukerti mengemukakan sebagai berikut:

1. Karena suami cemburu
2. Suami merasa berkuasa.
3. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
4. Ikut campurnya pihak ketiga (mertua).
5. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan).
6. Karena suami suka berjudi.

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan si anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial. Di samping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri. Dampak pribadi seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan berpeluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi trauma termasuk di dalam perilaku anti sosial dan depresi

Paham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur posisi perempuan dengan mencantumkan pasal poligami dalam U U No. 1 Tahun 1974.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan. Berdasarkan Teori

Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki – laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadang kala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Dalam kaitan itu sesuai dengan pendapat Susan L. Miler, yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial. Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi.

Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. Lebih lanjut jumlah kekerasan terhadap perempuan menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut;

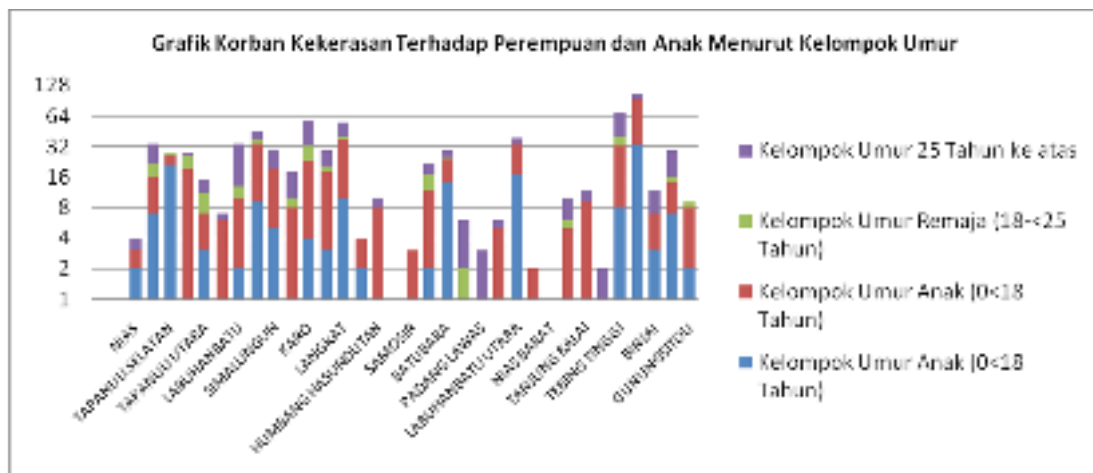
Tabel 10.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

NO	KAB./KOTA	Kelompok Umur				Total	%
		Anak (0-18 Tahun)		Remaja (18- <25 Tahun)	25 Tahun ke atas		
		L	P				
1	NIAS	2	1	0	1	4	0,53
2	MANDAILING NATAL	7	9	6	12	34	4,47
3	TAPANULI SELATAN	21	5	1	1	28	3,68
4	TAPANULI TENGAH	1	18	7	2	28	3,68
5	TAPANULI UTARA	3	4	4	4	15	1,97
6	TOBA SAMOSIR	0	6	0	1	7	0,92
7	LABUHANBATU	2	8	3	21	34	4,47
8	ASAHAN	9	25	3	8	45	5,92
9	SIMALUNGUN	5	14	0	11	30	3,96
10	DAIRI	1	7	2	8	18	2,37
11	KARO	4	19	9	26	58	7,63
12	DELI SERDANG	3	15	2	9	29	3,82
13	LANGKAT	10	28	2	15	55	7,24
14	NIAS SELATAN	2	2	0	0	4	0,53
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	8	0	2	10	1,32
16	PAKPAKBHARAT	0	1	0	0	1	0,13
17	SAMOSIR	0	3	0	0	3	0,39
18	SERDANG BEDAGAI	2	10	5	5	22	2,89
19	BATUBARA	14	10	1	4	29	3,82
20	PADANG LAWAS UTARA	0	0	2	4	6	0,79
21	PADANG LAWAS	1	0	0	2	3	0,39
22	LABUHANBATU SELATAN	0	5	0	1	6	0,79
23	LABUHANBATU UTARA	17	17	0	5	39	5,13
24	NIAS UTARA	1	1	0	0	2	0,26
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	1	4	1	4	10	1,32
27	TANJUNGPALAI	1	8	0	3	12	1,58
28	PEMAJANG SIANTAR	1	0	0	1	2	0,26
29	TEBINGTINGGI	8	21	8	30	70	9,21
30	MEDAN	33	58	4	11	106	13,9
31	BINJAI	3	4	0	5	12	1,58
32	PADANGSIDEMPUAN	7	7	2	13	29	3,82
33	GUNUNGSITOLU	2	6	1	0	9	1,18
	PROMSU	161	327	63	209	760	100

Sumber Data : Dinas PPPA melalui Simfoni PPA s/d bulan Oktober 2017

Data- data kekerasan yang ada pada Profil Gender Provinsi Sumatera Utara 2017 adalah data-data yang terjadi pada Januari sampai Oktober 2017. Dilihat pada tabel 10.1 yaitu tentang Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga terjadi pada semua

kelompok umur, mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa. Kekerasan terhadap perempuan telah mengalami lintas umur. Data kekerasan terhadap perempuan yang terjadi kurun waktu Januari sampai dengan Oktober sudah terjadi 760 kekerasan. Dimana anak-anak 488 (64,2%) kasus, remaja 63 (8,2%) kasus dan dewasa 209 (27,5%) kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok umur anak-anak lebih dominana mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak tidak mendapat perlindungan dari orang dewasa dalam lingkungannya.



Gambar 10.1. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur



Gambar 10.2. Grafik Persentase Total Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur

10.2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 10.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

NO	KAB/KOTA	Status Perkawinan					TOTAL	%
		BELUM KAWIN		Kawin	Ceraai	N/A		
		L	P					
1	IAS	2	1	1	0	0	4	0,53
2	MANDALING NATAL	7	14	11	0	2	34	4,47
3	TAPANULI SELATAN	21	6	0	0	1	28	3,66
4	TAPANULI TENGAH	1	25	2	0	0	28	3,08
5	TAPANULI UTARA	3	8	4	0	0	15	1,97
6	TOBA SAMOSIR	0	6	1	0	0	7	0,92
7	LABUHANBATU	2	10	22	0	0	34	4,47
8	ASAHAN	9	25	10	1	0	45	5,92
9	SIMALUNGUN	5	14	7	0	4	30	3,96
10	DAIRI	1	9	8	0	0	18	2,37
11	KARO	4	26	27	0	1	58	7,63
12	DELI SERDANG	3	18	8	0	0	29	3,82
13	LANGKAT	10	30	15	0	0	55	7,24
14	IAS SELATAN	2	2	0	0	0	4	0,53
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	8	2	0	0	10	1,32
16	PAKPAK BHARAT	0	1	0	0	0	1	0,13
17	SAMOSIR	0	3	0	0	0	3	0,39
18	SERDANG BELAGAI	2	12	7	0	1	22	2,89
19	BATUBARA	14	11	4	0	0	29	3,82
20	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	6	0	6	0,79
21	PADANG LAWAS	1	0	2	0	0	3	0,39
22	LABUHANBATU SELATAN	0	5	1	0	0	6	0,79
23	LABUHANBATU UTARA	17	18	2	2	0	39	5,13
24	IAS UTARA	1	1	0	0	0	2	0,26
25	IAS BARAT	0	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	1	5	2	1	1	10	1,32
27	TANJUNG BALAI	1	8	3	0	0	12	1,58
28	PEMATANGSIANTAR	1	0	1	0	0	2	0,26
29	TEBINGTINGGI	8	29	30	0	3	70	9,21
30	MEDAN	33	62	10	1	0	106	13,9
31	BINJAI	3	4	5	0	0	12	1,58
32	PADANGSIDEMPURAN	7	7	15	0	0	29	3,82
33	GUNUNGSILOI	2	6	1	0	0	9	1,18
	PROVSI	161	374	201	11	13	760	100

Sumber Data: Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017

Tabel 10.2 Jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan menunjukkan bahwa status perkawinan perempuan dengan kategori belum kawin (termaksud anak), kawin dan cerai menunjukkan sama-sama mengalami kekerasan. Dari data pada tabel di atas bahwa perempuan yang belum kawin (termaksud anak laki-laki dan perempuan) memiliki kecenderungan

[illegible]

Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan

Kabupaten	Total %
BEK	0.5
MANGALAMUDAN	4.5
TAYUGAL SELATAN	3.5
TAYUGAL UTARA	3.5
TUGAJUNG	2.0
LATIPAH	0.8
AMAH	4.5
SALALUNGAN	6.0
DAK	4.0
DAK	2.5
INDRANG	7.5
LANGAT	3.5
RAYA LUTAN	7.0
KUMADANG	0.5
INDRANG	1.5
MAJAL	0.5
SIRANG	3.0
PAKANG LAMPUNG	3.5
PAKANG LAMPUNG	0.8
LAMPUNG	0.5
LAMPUNG	0.5
MAJAL	5.0
MAJAL	0.5
SIRANG	1.5
PAKANG LAMPUNG	1.5
PAKANG LAMPUNG	0.5
PAKANG LAMPUNG	9.0
PAKANG LAMPUNG	14.0
PAKANG LAMPUNG	1.5
PAKANG LAMPUNG	3.5
PAKANG LAMPUNG	1.0

183

10.3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

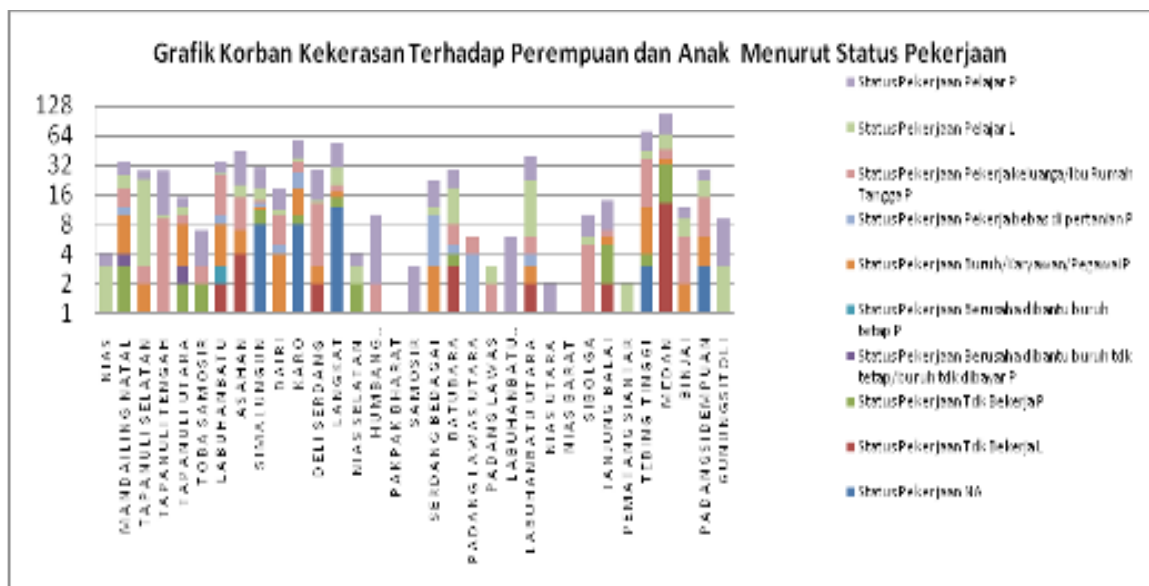
Tabel 10.3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

N O	KAB./KOTA	Status Pekerjaan									
		N A	Tdk Bekerja		Berusaha dibantu buruh tdk tetap/buruh tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan/Pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja keluarga/Ibu Rumah Tangga	Pelajar	
			L	P						L	P
1	NIAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
2	MANDAILING NATAL	0	0	3	1	0	6	2	6	7	9
3	TAPANULI SELATAN	0	1	0	0	0	1	0	1	20	5
4	TAPANULI TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	9	1	18
5	TAPANULI UTARA	0	1	1	1	0	5	0	2	2	3
6	TOBA SAMOSIR	0	0	2	0	0	0	0	1	0	4
7	LABUHANBATU	1	1	0	0	1	5	2	15	1	8
8	ASAHAN	0	4	0	0	0	3	0	8	5	25
9	SIMALUNGUN	8	0	3	0	0	1	1	1	5	11
10	DAIRI	0	0	1	0	0	3	1	5	1	7
11	KARO	8	0	2	0	0	8	9	7	4	20
12	DELI SERDANG	0	2	0	0	0	1	0	10	1	15
13	LANGKAT	12	0	3	0	0	2	0	3	10	25

14	NIAS SELATAN	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8
16	PAKPAK BHARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	SAMOSIR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
18	SERDANG BEDAGAI	0	0	0	0	0	3	7	0	2	10
19	BATUBARA	0	3	1	0	0	0	1	3	11	10
20	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0
21	PADANG LAWAS	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
22	LABUHANBATU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
23	LABUHANBATU UTARA	1	1	0	0	0	1	1	2	16	17
24	NIAS UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	0	0	0	0	0	1	0	4	1	4
27	TANJUNG BALAI	1	1	3	0	0	1	0	1	0	7
28	PEMATANG SIANTAR	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	TEBING TINGGI	3	0	1	0	0	8	0	24	8	26
30	MEDAN	1	12	19	0	0	4	0	10	21	39
31	BINJAI	0	0	1	0	0	1	0	4	3	3
32	PADANGSIDEMPUAN	3	0	0	0	0	3	0	9	7	7
33	GUNUNGSITOLI	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
	PROVSU	3 8	27	42	2	1	58	29	133	13 4	29 8

Sumber Data:Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut status pekerjaan yang terjadi di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada table 10.3. Pada tabel tersebut jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pekerja, pelajar, pekerja keluarga/ibu rumah tangga, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dipertanian/ nelayan atau tidak bekerja (bagi anak dan perempuan). Perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan tersebut ternyata mengalami kekerasan. Perempuan dengan status pekerjaan pelajar mendapatkan kekerasan yang lebih banyak dengan 432 kasus, diikuti dengan jenis pekerjaan ibu rumah tangga 133 kasus dan tidak bekerja 69 kasus.



Gambar 10.5. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan

10.4. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 10.4. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2017

N O	KAB./KOTA	Jenis Kekerasan											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		PENELANTARAN		LAINNYA		EKSPLOITASI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	NIAS	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2	MANDAILING NATAL	1	12	0	0	2	12	0	2	0	1	0	0
3	TAPANULI SELATAN	3	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
4	TAPANULI TENGAH	1	4	0	16	0	23	0	2	0	0	0	0
5	TAPANULI UTARA	3	4	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0
6	TOBA SAMOSIR	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0
7	LABUHANBATU	2	16	0	6	0	5	0	5	0	1	0	0
8	ASAHAN	4	14	1	0	0	19	4	4	0	0	0	0
9	SIMALUNGUN	2	10	1	12	1	17	0	0	0	0	0	0
10	DAIRI	1	4	0	3	0	8	0	2	0	1	0	0
11	KARO	2	18	2	3	0	21	1	1	0	10	0	0
12	DELI SERDANG	0	7	0	3	0	13	0	2	0	2	0	0
13	LANGKAT	7	14	3	12	1	24	0	1	0	1	0	0
14	NIAS SELATAN	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	4	0	1	0	8	0	1	0	0	0	0

16	PAKPAK BHARAT	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17	SAMOSIR	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
18	SERDANG BEDAGAI	2	9	0	3	0	11	0	0	0	0	0	0
19	BATUBARA	6	6	1	4	0	7	5	4	0	0	0	0
20	PADANG LAWAS UTARA	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PADANG LAWAS	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	LABUHANBATU SELATAN	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0
23	LABUHANBATU UTARA	5	3	4	6	2	16	9	1	0	0	0	0
24	NIAS UTARA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	1	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	2
27	TANJUNG BALAI	0	3	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0
28	PEMATANG SIANTAR	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	TEBING TINGGI	8	34	2	15	0	25	0	0	0	2	0	0
30	MEDAN	8	19	21	32	1	22	5	12	0	1	0	0
31	BINJAI	2	4	0	2	0	3	1	1	0	1	0	0
32	PADANGSIDEMPUAN	6	16	2	16	0	8	0	1	0	0	0	0
33	GUNUNGSITOLI	2	3	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0
	PROVSU	72	219	40	151	8	274	26	47	0	23	0	2

Sumber Data: Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017

[illegible]

Kecamatan	Total %
RIAU	0.5
KABUPATEN BANGKALAN	3.5
KABUPATEN BANGKALAN	1.0
KABUPATEN BANGKALAN	5.5
KABUPATEN BANGKALAN	1.5
KABUPATEN BANGKALAN	0.5
KABUPATEN BANGKALAN	4.0
KABUPATEN BANGKALAN	5.5
KABUPATEN BANGKALAN	5.0
KABUPATEN BANGKALAN	2.0
KABUPATEN BANGKALAN	6.5
KABUPATEN BANGKALAN	3.0
KABUPATEN BANGKALAN	7.5
KABUPATEN BANGKALAN	0.5
KABUPATEN BANGKALAN	1.5
KABUPATEN BANGKALAN	0.2
KABUPATEN BANGKALAN	0.5
KABUPATEN BANGKALAN	2.5
KABUPATEN BANGKALAN	3.5
KABUPATEN BANGKALAN	1.0
KABUPATEN BANGKALAN	0.5
KABUPATEN BANGKALAN	5.5
KABUPATEN BANGKALAN	0.5
KABUPATEN BANGKALAN	1.0
KABUPATEN BANGKALAN	1.0
KABUPATEN BANGKALAN	0.2
KABUPATEN BANGKALAN	10.0
KABUPATEN BANGKALAN	14.0
KABUPATEN BANGKALAN	1.5
KABUPATEN BANGKALAN	5.5
KABUPATEN BANGKALAN	1.5

189

10.5. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Tabel 10.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

NO	KAB./KOTA	Tempat								Total	%
		Rumah Tangga		Tempat Kerja		Fasilitas Umum		Lainnya			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	NIAS	2	1	0	0	0	0	0	1	4	0,57
2	MANDAILINGNATAL	1	22	0	0	0	2	2	3	30	4,29
3	TAPANULI SELATAN	1	1	0	0	0	1	2	2	7	1
4	TAPANULI TENGAH	0	13	0	0	0	3	1	11	28	4
5	TAPANULI UTARA	1	3	0	3	1	0	1	6	15	2,14
6	TOBA SAMOSIR	0	6	0	0	0	0	0	2	8	1,14
7	LABUHANBATU	0	23	0	0	0	0	2	5	30	4,29
8	ASAHAN	5	20	0	1	0	0	4	15	45	6,43
9	SIMALUNGUN	4	8	0	0	0	0	1	18	31	4,43
10	DAIRI	1	10	0	0	0	1	0	6	18	2,57
11	KARO	0	15	0	1	0	2	3	36	56	8
12	DELSERDANG	1	9	0	0	0	1	0	13	24	3,43
13	LANGKAT	2	23	0	1	4	3	3	14	50	7,14
14	NIAS SELATAN	1	2	0	0	0	0	1	0	4	0,57
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	5	0	0	0	2	0	3	10	1,43
16	PAKPAK DARAT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,14
17	SAMOSIR	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0,43
18	SERANG BEKRAJ	0	8	0	0	1	1	1	11	22	3,14
19	BATUBARA	5	9	0	0	0	1	6	5	26	3,71
20	PADANG LAWAS UTARA	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0,86
21	PADANG LAWAS	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0,43
22	LABUHANBATU SELATAN	0	2	0	0	0	0	0	5	7	1
23	LABUHANBATU UTARA	4	18	0	0	2	0	3	3	30	4,29
24	NIAS UTARA	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,29
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	0	7	0	1	1	0	0	1	10	1,43
27	TANJUNG BALAI	0	7	0	0	0	0	1	2	10	1,43
28	PENAIANG SANJAH	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0,29
29	TESINGTINGGI	2	36	0	2	1	7	5	17	70	10
30	MEDAN	23	48	0	1	2	1	6	16	97	13,9
31	BINJAI	1	6	0	0	0	1	2	2	12	1,71
32	PADANGDEMPILAN	3	15	0	0	0	0	6	6	30	4,29
33	CUNUNGBITOL	0	1	0	0	1	5	1	1	9	1,29
	PROVSU	59	330	0	10	13	31	52	205	700	100

Sumber Data:Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Pada tabel 10.5 menunjukkan tentang jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian yang ada di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017. Tempat kejadian bisa di rumah tangga, tempat kerja, fasilitas umum dan lainnya. Jika dilihat dari tempat terjadinya

kekerasan yang dalam di rumah tangga menjadi tempat yang sering terjadi kekerasan sebanyak 389 kasus menyusul di tempat lainnya sebesar 257 kasus maka untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan menjadi urutan yang pertama, terjadi 71 kasus, disusul Kabupaten Tebing Tinggi 38 kasus.

Fasilitas Umum juga menjadi tempat yang sangat riskan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih pada tabel 10.5 kekerasan yang terjadi di fasilitas umum di Kota Tebing Tinggi menjadi kasus yang paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu terjadi 8 kasus pada tahun 2017. Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Kabupaten/ Kota yang menduduki urutan pertama terjadi kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja.



Gambar 10.8. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian



Gambar 10.9. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian

10.6. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Tabel 10.6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

NO		Jenis Layanan Yang Diberikan														Total	
		Peningkatan pengetahuan		Pelayanan kesehatan		Rehabilitasi Sosial		Peningkatan dan Bantuan Hukum		Peningkatan & ReinTEGRASI		Peningkatan dan Rasa Aman		Mediasi			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	NIAS	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
2	MARONINGGATAN	3	26	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	31
3	TARANULU SELATAN	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
4	TARANULU TENGAH	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
5	TARANULU UTARA	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
6	LOUBAYAN	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
7	LABUHAN	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
8	AYAHAN	8	37	1	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	51
9	SEMAILUN	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
10	CARI	1	17	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	21
11	KARD	4	53	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	60
12	LOUBAYAN	0	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25
13	TANGAT	9	40	0	1	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	50
14	NIAS SELATAN	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15	HUMBANG SELATAN	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
16	PAKAKHARAT	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
17	SANJER	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
18	NIHAYAN TENGAH	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
19	BATUBARA	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
20	PADANG LAHAS UTARA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21	PADANG LAHAS	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
22	LABUHAN BATU SELATAN	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
23	LABUHAN BATU UTARA	10	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
24	NIAS UTARA	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
27	TANJUNG BALAI	4	11	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18
28	PERAWANG SANTAR	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	ILUNG HINSA	0	62	1	10	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	73
30	MEDAN	27	66	0	2	0	3	0	9	0	1	0	0	0	0	0	104
31	BINJAI	3	9	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14
32	PAKANG BEMAH	6	23	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	31
33	LOUBAYAN	1	8	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
Jumlah		127	505	2	21	0	4	5	46	0	7	0	0	0	0	1	708

Sumber Data: Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017

Simfoni PPA (Sistem Informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak) suatu sistem informasi yang memuat data/ informasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Informasi yang terdapat pada Simfoni PPA diperoleh dari data yang diinput dari lembaga/ unit-unit layanan yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga/ unit tersebut, seperti P2TP2A, Unit PPA Polres, Rumah Sakit, LSM pemerhati perempuan dan anak, Pukesmas.

Menurut jenis layanan yang diberikan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

Menurut jenis layanan yang diberikan, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara mendapat layanan :

- a. Pelayanan Pengaduan
- b. Pelayanan Kesehatan Rehabilitas Sosial sebanyak 4 orang Perempuan.
- c. Penegakan dan Bantuan Hukum
- d. Pemulangan dan Reintegrasi
- e. Perlindungan Rasa Aman
- f. Mediasi

Berdasarkan jenis kelamin korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara banyak yang dialami oleh perempuan termasuk anak perempuan sebanyak 585 orang dan anak laki-laki sebanyak 122 orang. Dengan jumlah korban terbanyak di Kota Medan yaitu sebanyak 93 orang perempuan termasuk anak yang terdiri dari 66 orang perempuan termasuk anak dan 27 orang anak laki-laki sedangkan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak paling rendah adalah di Kabupaten Nias Barat yaitu sebanyak 0 kasus, namun hal ini tidak menggambarkan bahwa di Kabubapten Nias Barat sama sekali tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara Umum dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Nias Barat belum di input di Aplikasi Simfoni-PPA.



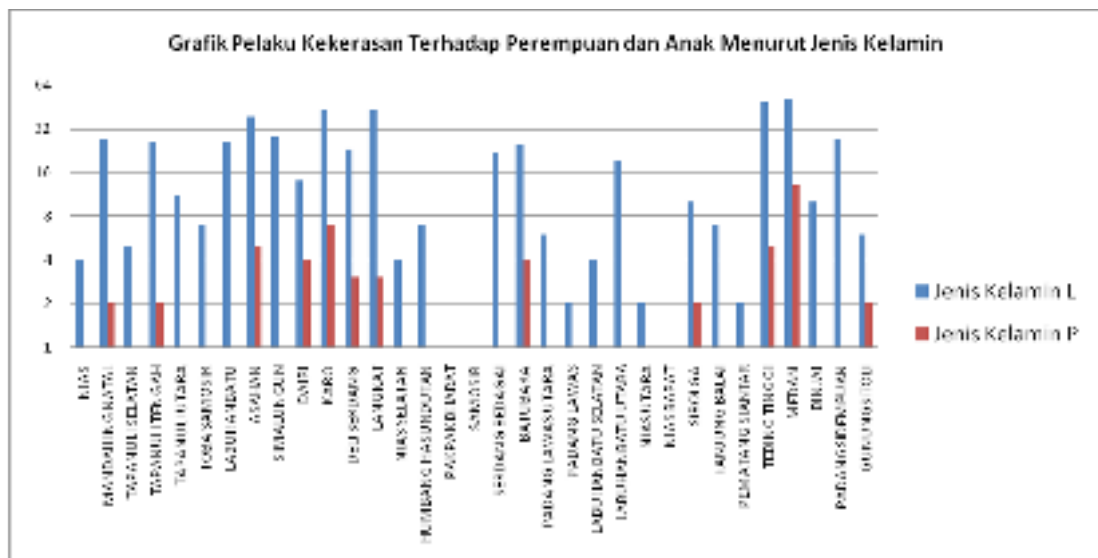
10.7 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 10.7 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

N O	KAB./KOTA	Jenis Kelamin		Kelompok Umur		
		L	P	Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas
1	NIAS	4	0	0	0	4
2	MANDAILING NATAL	27	2	5	3	21
3	TAPANULI SELATAN	5	1	1	1	3
4	TAPANULI TENGAH	26	2	2	7	19
5	TAPANULI UTARA	11	0	1	1	9
6	TOBA SAMOSIR	7	0	1	2	4
7	LABUHANBATU	26	1	1	2	23
8	ASAHAN	39	5	3	10	31
9	SIMALUNGUN	28	0	4	3	21
10	DAIRI	14	4	2	1	15
11	KARO	43	7	0	17	33
12	DELI SERDANG	23	3	6	8	12
13	LANGKAT	43	3	6	8	32
14	NIAS SELATAN	4	0	0	0	4
15	HUMBANG HASUNDUTAN	7	0	0	0	7

16	PAKPAK BHARAT	1	0	0	0	1
17	SAMOSIR	1	0	1	0	0
18	SERDANG BEDAGAI	22	0	5	8	9
19	BATUBARA	25	4	7	3	19
20	PADANG LAWAS UTARA	6	0	0	1	5
21	PADANG LAWAS	2	0	0	0	2
22	LABUHANBATU SELATAN	4	1	0	2	3
23	LABUHANBATU UTARA	19	1	1	6	13
24	NIAS UTARA	2	0	0	0	2
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	10	2	3	2	7
27	TANJUNG BALAI	7	1	2	2	4
28	PEMATANG SIANTAR	2	0	0	0	2
29	TEBING TINGGI	49	5	7	10	37
30	MEDAN	52	13	3	4	58
31	BINJAI	10	1	1	1	9
32	PADANGSIDEMPUAN	27	0	3	5	19
33	GUNUNGSITOLI	6	2	0	1	7
	PROVSU	552	58	65	108	435

Sumber Data:Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017



Gambar 10.11. Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin



Gambar 10.12. Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur

10.8 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban, Jenis kelamin Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Tabel 10.8 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban, Jenis kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

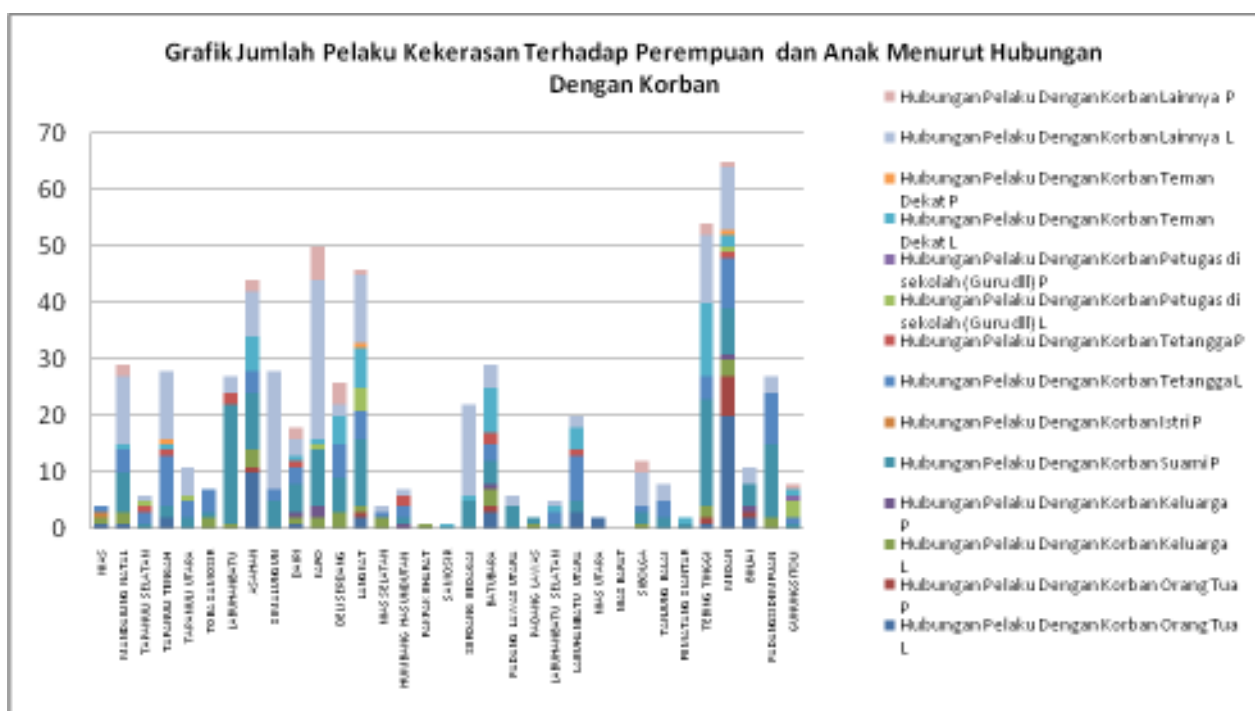
N O	KAB./KOTA	Hubungan Pelaku Dengan Korban													
		Orang Tua		Keluarg a		Suami	Istri	Tetangga		Petug as di sekol ah (Guru dll)		Tema n Dekat		Lainnya	
		L	P	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P
1	NIAS	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MANDAILING NATAL	1	0	2	0	7	0	4	0	0	0	1	0	12	2
3	TAPANULI SELATAN	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0
4	TAPANULI TENGAH	2	0	0	0	2	0	9	1	0	0	1	1	12	0
5	TAPANULI UTARA	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	5	0
6	TOBA SAMOSIR	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
7	LABUHANBATU	0	0	1	0	21	0	0	2	0	0	0	0	3	0
8	ASAHAN	10	1	3	0	10	0	4	0	0	0	6	0	8	2
9	SIMALUNGUN	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	21	0
10	DAIRI	1	0	1	1	5	0	3	1	0	0	1	0	3	2
11	KARO	0	0	2	2	10	0	0	0	1	0	1	0	28	6
12	DELI SERDANG	0	0	3	0	6	0	6	0	0	0	5	0	2	4
13	LANGKAT	2	1	1	0	12	0	5	0	4	0	7	1	12	1

14	NIAS SELATAN	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	1	0
16	PAKPAK BHARAT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SAMOSIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	SERDANG BEDAGAI	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	16	0
19	BATUBARA	3	1	3	1	4	0	3	2	0	0	8	0	4	0
20	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0
21	PADANG LAWAS	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	LABUHANBATU SELATAN	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0
23	LABUHANBATU UTARA	3	0	0	0	2	0	8	1	0	0	4	0	2	0
24	NIAS UTARA	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	2
27	TANJUNG BALAI	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0
28	PEMATANG SIANTAR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
29	TEBING TINGGI	1	1	2	0	19	0	4	0	0	0	13	0	12	2
30	MEDAN	20	7	3	1	8	0	9	1	1	0	2	1	11	1
31	BINJAI	2	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0
32	PADANGSIDEMPUAN	0	0	2	0	13	0	9	0	0	0	0	0	3	0
33	GUNUNGSITOLI	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	1
	PROVSU	48	12	31	7	150	1	86	11	11	1	54	3	168	23

Sumber Data:Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017

Dari tabel 10.8 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut hubungan dengan korban bahwa orang tua, keluarga, suami istri, tetangga, petugas disekolah(guru), teman dekat dan lainnya, yang paling banyak melakukan kekerasan adalah lainnya dengan jumlah 168 orang, kemudian suami sebanyak 150 orang, kemudian diikuti oleh tetangga sebanyak 86 orang dari kondisi ini menggambarkan bahwa pelaku kekerasan(suami) berada pada tingkatan kedua paling banyak melakukan kekerasan yang seharusnya suami memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak berbanding terbalik dengankondisi tabel diatas, demikian juga tetangga yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak malah menjadi pelaku kekerasan.

Yang menarik dari tabel diatas bahwa orang tua juga melakukan kekerasan orang tua laki-laki ataupun perempuan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak-anaknya hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pola asuh anak yang tidak benar, sehingga menimbulkan sikap sewenang-wenang terhadap anak.



10.13. Grafik Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban

10.9 Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang yang tereksplorasi.

Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang antara lain :

1. Pengiriman buruh migran perempuan dibawah umur
2. Pembantu rumah tangga
3. Prostitusi
4. Pengantin pesanan, kawin kontrak
5. Pekerja anak dalam situasi buruh
6. Pengedar Narkoba
7. Perdagangan bayi dan transplantasi organ tubuh

Jumlah korban perdagangan orang dapat dilihat pada tabel 10.9.

Tabel 10.9 Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

N O	KAB./KOTA	Kelompok Umur				Total	
		0-18 Thn (Anak)		>18 Thn (Dewasa)			
		L	P	L	P	L	P
1	NIAS	0	0	0	0	0	0
2	MANDAILING NATAL	0	0	0	0	0	0
3	TAPANULI SELATAN	0	0	0	0	0	0
4	TAPANULI TENGAH	0	0	0	0	0	0
5	TAPANULI UTARA	0	0	0	0	0	0
6	TOBA SAMOSIR	0	0	0	0	0	0

7	LABUHANBATU	0	0	0	0	0	0
8	ASAHAN	0	0	0	10	0	10
9	SIMALUNGUN	0	0	0	0	0	0
10	DAIRI	0	0	0	0	0	0
11	KARO	0	1	0	0	0	1
12	DELI SERDANG	0	1	0	6	1	6
13	LANGKAT	0	0	0	0	0	0
14	NIAS SELATAN	0	0	0	0	0	0
15	HUMBANG HASUNDUTAN	0	0	0	0	0	0
16	PAKPAK BHARAT	0	0	0	0	0	0
17	SAMOSIR	0	1	0	0	0	1
18	SERDANG BEDAGAI	0	0	0	0	0	0
19	BATUBARA	0	0	0	0	0	0
20	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0	0	0
21	PADANG LAWAS	0	0	0	0	0	0
22	LABUHANBATU SELATAN	0	0	0	0	0	0
23	LABUHANBATU UTARA	0	0	0	0	0	0
24	NIAS UTARA	0	0	0	0	0	0
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	0	1	0	0	0	1
27	TANJUNG BALAI	0	0	0	0	0	0
28	PEMATANG SIANTAR	0	0	0	0	0	0
29	TEBING TINGGI	0	0	0	0	0	0
30	MEDAN	2	4	0	0	2	4
31	BINJAI	0	0	0	0	0	0
32	PADANGSIDEMPUAN	0	0	0	0	0	0
33	GUNUNGSITOLI	0	0	0	0	0	0
	PROVSU	2	8	0	16	3	23

Sumber Data : Dinas PPPA melalui SIMFONI-PPA s/d bulan Oktober 2017

Korban perdagangan orang menurut kelompok umur yang menjadi banyak korban adalah diatas 18 tahun sebanyak 16 orang dengan jenis kelamin perempuan.

Kemudian 0 s/d 18 tahun sebanyak 10 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.



Gambar 10.14. Grafik Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

DAFTAR PUSTAKA

- Foucault. (1978) *The History of Sexuality*. New York: Pantheon Books.
- Hadari, Nawawi & Hadari, Martini Hadari, 1992, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional.
- Mansour Fakih, 2004, 2001 Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Bandung, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Miles. M. B. 1972. *Qualitative Data Analysis*. Penerjemah: Cecep Rohendi Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia Press,
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nyi Hadjar Dewantoro. (2000) *Wanita*. Yogyakarta : Pusat Pengembangan Komunitas Perempuan.
- Ohorella, G.A. (1992) *Peranan Wanita Indonesia Dalam Pergerakan Nasional*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ms 14.
- Ollenburger, Jane.C. et. al. (1996) *Sosiologi Wanita*. Jakarta : Rineka Cipta. Ms 143.
- Pujiati. 2007. Kelestarian Perjuangan KOWANI dalam Pembangunan Wanita: Analisis Masa Kolonial dan Pasca Kolonial. Universiti Sains Malaysia: Disertasi S3.
- Pujiati. 2009. Anak Putus Sekolah Di Desa Sendang Rejo Kabupaten Langkat. USU: Laporan Penelitian Hibah Bersaing Dikti tahun 2009 dan 2010.
- Sadli, Saparinah (2010) *Berbeda tapi Setara Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, Jakarta, Kompas.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Perlindungan Anak.